

**ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
TERHADAP KUALITAS PEMERINTAHAN DAN  
KINERJA EKONOMI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SKRIPSI**

**Disusun oleh :**

**Sri Andayani  
105020100111076**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

"Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur"

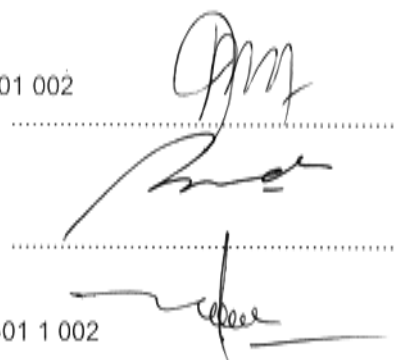
Yang disusun oleh :

Nama : Sri Andayani  
NIM : 105020100111076  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal **12 Maret 2014** dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Ferry Prasetya, SE.,M.App.Ec.Int.  
NIP. 132 310 387 19801228 200501 002  
(Dosen Pembimbing)
2. Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.  
NIP. 19620315 198701 1 001  
(Dosen Penguji I)
3. Dr. Ghozali Maski, SE.,MS.  
NIP. 131 573 944 19580927 198601 1 002  
(Dosen Penguji II)



Malang, 7 April 2014  
Ketua  
Jurusan Ilmu Ekonomi,



Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.  
NIP. 19620315 198701 1 001

# LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul :

**Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**

Yang disusun oleh :

Nama : Sri Andayani  
 NIM : 105020100111076  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  
 Jurusan : S-1 Ilmu Ekonomi  
 Konsentrasi : Keuangan Negara & Daerah

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Ketua  
 Jurusan Ilmu Ekonomi,  
  
 Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.  
 NIP. 19620315 198701 1 001

Malang, 3 Maret 2014  
 Mengetahui,

Dosen Pembimbing,

  
 Ferry Prasetya, SE.,M.App.Ec.Int.  
 NIP. 132 310 387 19801228 200501 002



# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Sri Andayani  
 Tempat, tanggal lahir : Tuban, 4 Januari 1992  
 NIM : 105020100111076  
 Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi  
 Konsentrasi : Keuangan Negara & Daerah  
 Alamat : Jl. Bunga Kopi No.12A, Malang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur**

yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesariaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 3 Maret 2014

Mengetahui,  
 Dosen Pembimbing,



Ferry Prasetya, SE.,M.App.Ec.Int.  
 NIP. 132 310 387 19801228 200501 002

Yang membuat pernyataan,



Sri Andayani  
 NIM. 105020100111076

Mengetahui,  
 Ketua  
 Jurusan Ilmu Ekonomi,


Dwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D.  
 NIP. 19620315 198701 1 001

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Sri Andayani  
 Tempat, tanggal lahir : Tuban, 4 Januari 1992  
 NIM : 105020100111076  
 Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi  
 Konsentrasi : Keuangan Negara dan Daerah  
 Alamat : Jl. Goa Suci No.13, Wangun, Kec. Palang, Kab. Tuban

### Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 2 Wangun Lulus Tahun 1998-2004
2. SMP Negeri 1 Palang Lulus Tahun 2004-2007
3. SMA Negeri 4 Tuban Lulus Tahun 2007-2010
4. S1 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (2010-2014)

### Pengalaman Organisasi :

Staff Advokasi dan Kesejahteraan Masyarakat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2010/2011

### Pengalaman Kepanitiaan :

1. Asisten Koordinator (Asko) Administrasi Acara Bakti Sosial BEM FEB UB 2011
2. Asisten Koordinator (Asko) Administrasi Acara Seminar Nasional BEM FEB UB 2011

### Prestasi :

1. Peserta *High School Tax Road Show* 2009 sebagai ajang Duta Pajak wiayah Jawa Timur 2009
2. Nominasi Oral Presentation untuk *Call of Paper 11<sup>th</sup> Acara Hokkaido Indonesian Student Association Scientific Meeting* di Japan 2013

#### Pengalaman Kerja dan Magang :

1. Tim Lapang dalam penelitian “Program Prioritas Pemerintah Jawa Timur : JAMKESDA”, 2012
2. Key Puncher (Entry Data) dalam rangka “Resertifikasi Kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH)” yang bekerja sama dengan TNP2K dan Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Juni-Agustus 2013
3. Tenaga Pengajar dan Pembantu di MI Diponegoro Kedung Kandang Kota Malang dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik FEB UB, April-Mei 2013
4. Team *Surveyor* dalam penelitian “Penyusunan Strategi Percepatan Investasi di Kabupaten Banyuwangi”, April 2014

#### Penelitian dan Karya Ilmiah :

Paper “*Waste Management Programs in Rural Areas Based on Eco-friendly: Reduce, Reuse, and Recycle*”, 11<sup>th</sup> Hokkaido Indonesian Student Association Scientific Competition Japan





## *Motto*

**“Any Problems There Eventually”**

**So that “ Strong to Get Something  
Good”**



## My Best Regards TO ...

My parent giving me a strength

My big family giving me a support

Halim and Friends giving me a spirit





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya tanpa jeda sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi Di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur” Penyusunan Skripsi ini ditujukan untuk melengkapi persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dalam Skripsi ini, pokok-pokok bahasan yang disajikan meliputi pendahuluan, kajian teori, pembahasan yang terdiri dari *pertama*, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan. *Kedua*, pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi. *Ketiga*, pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi. Selanjutnya yaitu penjabaran mengenai implikasi kebijakan yang relevan terkait dengan temuan dalam hasil dan pembahasan penelitian.

Dengan selesainya penyusunan Skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Candra Fajri Ananda, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
2. BapakDwi Budi Santoso, SE.,MS.,Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya.
3. Ferry Prasetya, SE.,M.App.Ec.Int. selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan dukungan dan pengarahan dalam pembuatan Skripsi.

4. Kedua Orang tua yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan dukungan kepada penulis baik berupa materiil maupun non materiil.
5. Sahabat-sahabatku, Bunga Hidayati S.E, Indah Rahmawati, Qhusnul Khotimah, Febri Rudiansah S.E, Raisal Fahrozi Lubis, Noor Aini Fitria Halim Burhani yang telah memberikan semangat dalam pengerjaan dan untuk yang terspesial “Halim Burhani” yang telah meringankan segala rintangan dalam pengerjaan Skripsi.
6. Pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak dukungan atas penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Skripsi ini bermanfaat serta dapat memberikan tambahan wawasan bagi semua pihak. Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih terdapat kekurangan baik pada teknik penulisan maupun materi, Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan Skripsi.

Malang, 12 Maret 2014

Penulis

Sri Andayani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN

HALAMAN RIWAYAT HIDUP

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iii

DAFTAR TABEL ..... vi

DAFTAR GAMBAR ..... vii

ABSTRAKSI ..... viii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 10

1.3 Tujuan Penelitian ..... 11

1.4 Manfaat Penelitian ..... 12

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dan Kualitas Pemerintahan ..... 14

2.2 Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Ekonomi ..... 25

2.3 Keterkaitan Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi ..... 34

2.4 Penelitian Terdahulu ..... 35

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis ..... 50



2.6 Hipotesis .....	52
---------------------	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Pendekatan Penelitian .....	56
3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	56
3.2.1 Populasi .....	56
3.3 Jenis Data .....	57
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian...	57
3.4.1 Variabel Penelitian .....	57
3.4.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	58
3.5 Metode Pengumpulan Data .....	60
3.6 Metode Analisis Data .....	60
3.6.1 Metode <i>Partial Least Squares</i> .....	61
3.6.2 Spesifikasi Model .....	63
3.6.3 <i>Goodness of Fit</i> .....	67
3.6.4 Pengujian Hipotesis .....	68

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian .....	70
4.1.1 Desentralisasi Fiskal di Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur....	70
4.1.1.1 Rasio Pendapatan PAD dan BHPBP Terhadap Belanja Daerah..	70
4.1.1.2 Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap Dana Alokasi Umum	72
4.1.2 Kualitas Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur.....	74
4.1.2.1 Indeks Akses Lahan .....	74
4.1.2.2 Indeks Biaya Transaksi .....	76

4.1.2.3 Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik .....	77
4.1.2.4 Indeks Perizinan Usaha .....	79
4.1.3 Kinerja Ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur .....	80
4.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	80
4.1.3.2 Pendapatan Perkapita .....	82
4.1.3.3 Pengangguran .....	83
4.2 Pengujian Model dengan <i>Partial Least Squares</i> (PLS) .....	85
4.2.1 Pengujian <i>Goodness Of Fit</i> Model Pengukuran Refleksif .....	85
4.2.2 Pengujian <i>Goodness Of Fit</i> Model Pengukuran Struktural .....	90
4.2.3 Hasil Pendugaan Model Pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	91
4.2.3.1 <i>Outer Model</i> Variabel Desentralisasi .....	91
4.2.3.2 <i>Outer Model</i> Variabel Kualitas Pemerintahan .....	92
4.2.3.3 <i>Outer Model</i> Variabel Kinerja Ekonomi .....	93
4.2.4 Hasil Pendugaan Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ) .....	94
4.3 Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian .....	98
4.3.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan .....	98
4.3.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi .....	100
4.3.3 Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Kinerja Ekonomi ...	103
4.3.4 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Melalui Kualitas Pemerintahan .....	105

## **BAB V PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	106
5.2 Saran .....	107

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	110
-----------------------------	-----

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : <i>Political Accountability and Voter Welfare Theory</i> .....	20
Tabel 2.2 : Daftar Penelitian Terdahulu .....	39
Tabel 3.1 : Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	58
Tabel 3.2 : Perbandingan Metode Path, PLS, SEM .....	60
Tabel 4.2.1 : Hasil <i>Loading Factor</i> .....	86
Tabel 4.2.2 : Hasil <i>Composite Reliability</i> .....	87
Tabel 4.2.3 : Hasil <i>Average variance extracted</i> .....	88
Tabel 4.2.4 : Hasil Validitas Diskriminan .....	89
Tabel 4.2.5 : Hasil Perhitungan $R^2$ Pada Variabel Endogen .....	90
Tabel 4.2.6 : Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Desentralisasi Fiskal .....	91
Tabel 4.2.7 : Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Kualitas Pemerintahan .....	92
Tabel 4.2.8 : Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Kinerja Ekonomi .....	93
Tabel 4.2.8 : Hasil Pengujian Hipotesis dalam <i>Inner Model</i> .....	94



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	: Agregasi Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota tahun 2011	3
Gambar 1.2	: Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota tahun 2011 .....	6
Gambar 2.1	: <i>Tax Rate and Consumption Growth</i> .....	28
Gambar 2.2	: Kerangka Pemikiran Teoritis .....	51
Gambar 3.1	: Diagram Jalur Antar Variabel dalam Penelitian .....	64
Gambar 4.1.1	: Rasio PAD dan BHPBP Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota tahun 2011 .....	71
Gambar 4.1.2	: Rasio PAD terhadap DAU .....	73
Gambar 4.1.3	: Indeks Akses Lahan Kabupaten/Kota Tahun 2011 .....	75
Gambar 4.1.4	: Indeks Biaya Transaksi Kabupaten/Kota Tahun 2011....	76
Gambar 4.1.5	: Indeks Keamanan & Penyelesaian Konflik Tahun 2011...	78
Gambar 4.1.6	: Indeks Perizinan Usaha Tahun 2011.....	79
Gambar 4.1.7	: Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011.....	81
Gambar 4.1.9	: Pendapatan Perkapita Tahun 2011 .....	82
Gambar 4.1.10	: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota .....	84
Gambar 4.2.1	: Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis <i>Inner Model</i> .....	95

## ABSTRAKSI

Andayani, Sri. 2014. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya. Ferry Prasetya, SE.,M.App.Ec.Int.

Penelitian ini menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Indikator yang digunakan oleh masing-masing variabel laten dalam penelitian ini ada ukuran desentralisasi penerimaan yaitu 1) rasio PAD dan BHPBP terhadap pengeluaran pemerintah daerah; 2) rasio PAD terhadap DAU, untuk indikator kualitas pemerintahan menggunakan akses lahan, biaya transaksi, keamanan dan penyelesaian konflik dan perizinan usaha. Sedangkan untuk indikator kinerja ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan pengangguran. Adapun metode analisis yang digunakan yakni menggunakan alat analisis *Partial Least Squared* dan perolehan data dilakukan dengan akses data sekunder publikasi dari sumber terkait dalam periode setahun yakni tahun 2011.

Hasil penelitian *pertama*, menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap kualitas pemerintahan secara negatif, di mana lemahnya akses informasi mengenai *incumbent* mengakibatkan voter tidak mampu mengontrol dan memonitoring politisi sebagai pihak yang berwenang dalam meningkatkan *interest voter*. Sehingga adanya desentralisasi fiskal yang memberikan otoritas perluasan basis pajak di daerah direspon negatif oleh masyarakat. *Kedua*, desentralisasi fiskal berpengaruh dalam peningkatan input publik melalui desentralisasi fiskal dapat mendorong pengeluaran pemerintah lebih baik sehingga hal ini dapat menstimulus kinerja ekonomi di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

**Kata kunci:** Desentralisasi Fiskal, Kualitas Pemerintahan, Kinerja Ekonomi, Cross-Section, *Partial Least Squares*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Keputusan otonomi daerah satu dekade silam telah melahirkan hubungan baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait sumber daya penting keuangan sebagai faktor pendukung penting dalam proses dan perjalanan otonomi daerah atau yang disebut dengan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan desentralisasi fiskal merupakan reformasi konstitusi yang ditandai dengan pelimpahan wewenang tentang pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan secara luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal ini dapat diartikan sebagai anugerah bagi daerah, mengingat bahwa sistem desentralisasi mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat lokal. Dengan demikian karena daerah lebih mengetahui preferensi kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya maka keuntungan informasi yang diperolehnya dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga mampu mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat melalui kinerja ekonomi yang lebih baik.

Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum dipandang dari kewenangan pengeluaran yang mana daerah diberikan diskresi untuk membelanjakan sumber fiskalnya melalui dukungan dana transfer (Oktarida, 2012 dan Parhah, *tanpa tahun*). Padahal, pada prinsipnya pelimpahan wewenang yang dimaksud tidak hanya sekedar menjalankan delegasi fiskal dari pemerintah



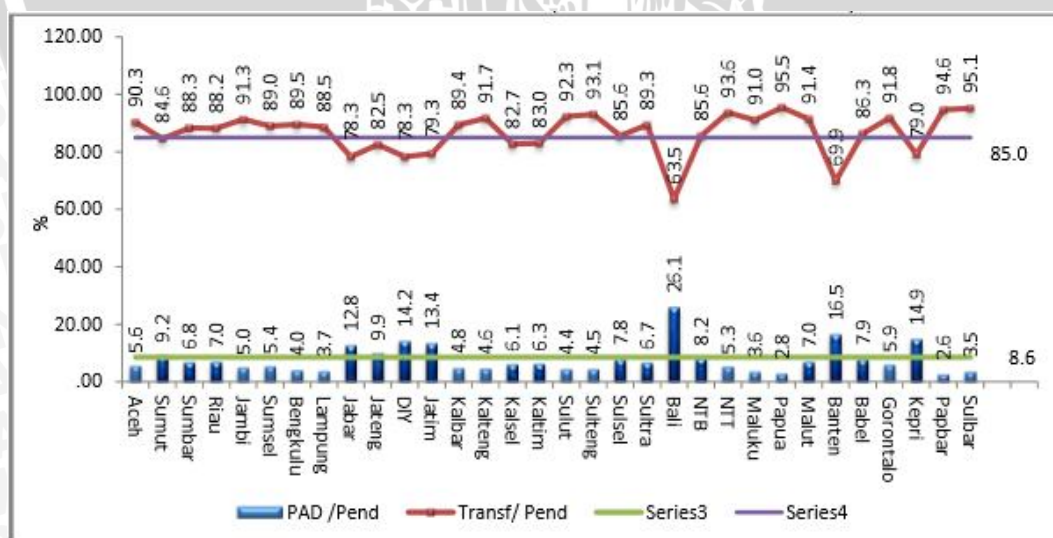
pusat semata akan tetapi kewenangan fiskal untuk memenuhi tuntutan kemandirian fiskal (Adi,2005) dalam kerangka otonomi daerah.

Hal ini lah yang menjadikan kemandirian daerah adalah dambaan bagi penyelenggaraan desentralisasi, pencapaian kemandirian daerah dapat terwujud jika daerah mampu mengelola keuangannya sesuai dengan kreativitas dan potensi yang dimilikinya. Oleh sebab itu, diskresi pengeluaran yang mengandalkan sumber pendanaanya dari suntikan dana bukan bersumber dari pendapatan daerahnya sendiri mengakibatkan dikresi pengeluaran semacam itu belum mampu menjelaskan parameter desentralisasi fiskal dengan tepat (Ebel & Yilmaz, 2002). Dengan demikian perlu adanya upaya-upaya penguatan peran kapasitas fiskal yang pada gilirannya daerah akan mampu memenuhi kebutuhan dan segala bentuk pendanaan kebutuhan masyarakat atau pembangunan sesuai dengan prioritas daerahnya bersumber dari pendapatan daerah sendiri berdasarkan diskresi dan kewenangan daerah. Hal ini lah yang menjadikan desentralisasi pendapatan menjadi krusial dalam implementasi desentralisasi fiskal.

Implementasi desentralisasi fiskal di ruang lingkup daerah kabupaten/kota merupakan atmosfer desentralisasi fiskal yang paling dekat dengan masyarakat secara langsung, ini artinya bahwa serangkaian otoritas fiskal daerah kabupaten/kota memegang peranan penting bagi bagi kesejahteraan masyarakat. Misal, otoritas fiskal pendapatan daerah yang terlalu eksekutif melalui upaya penetapan tarif retribusi dan pajak daerah yang terlalu tinggi dapat menurunkan aktivitas perekonomian daerah itu sendiri dan begitu juga sebaliknya. Oleh sebab itu lokus dari penelitian ini yakni pada ruang lingkup daerah kabupaten/kota.

Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur merupakan daerah-daerah yang mampu menunjukkan performa kinerja keuangan daerah yang relatif cukup bagus di era desentralisasi fiskal, hal ini ditunjukkan dengan kemampuan daerah untuk mencapai proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah yang tinggi hingga melebihi rata-rata nasional serta tingkat proporsi transfer terhadap pendapatan yang berada di bawah rata-rata nasional. Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh daerah-daerah tersebut ternyata masih menunjukkan performa keuangan daerah yang kurang, dalam arti pada tingkat rata-rata rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 13,4% dan rasio transfer terhadap pendapatan daerah sebesar 79,3% merupakan kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal yang masih lemah. Sebagai ilustrasi kemandirian fiskal di daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut.

**Gambar 1.1 : Perbandingan Agregasi Kemandirian Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan Provinsi Indonesia Lainnya Tahun 2011**



Sumber : DJPK, Deskripsi & Analisis APBD tahun 2011



Sebagaimana hasil pengamatan pada ilustrasi data tersebut, kinerja keuangan daerah di Jawa Timur menunjukkan posisi di atas rata-rata untuk proporsi PAD dalam pendapatan daerah dan proporsi dana transfer di bawah rata-rata nasional. Besaran kontribusi PAD pada pendapaan daerah terlihat diiringi dengan kontribusi dana transfer pada pendapatan daerah secara negatif. Ini artinya ketika daerah mampu meningkatkan kontribusi PAD secara maksimal maka akan menurunkan kontribusi dana transfer terhadap pendapatan daerah dan ini artinya ketika daerah masih belum mampu meningkatkan kontribusi PAD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah maka daerah masih saja akan mengalami ketergantungan pada dana transfer.

Pada kenyataanya daerah dihadapkan pada tingkat diskresi penerimaan yang rendah karena pengaturan kewenangan perpajakan yang kurang mendukung *local taxing power* (Zulianto, 2010). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khusaini (2006) bahwa pemerintah pusat masih memiliki wewenang terkait dengan aspek-aspek penerimaan, ini artinya desentralisasi fiskal penerimaan di Indonesia dapat dikatakan masih sempit. Sebagaimana juga ditunjukkan dengan tingkat kemandirian daerah untuk mayoritas daerah di Jawa Timur kurang dari 50% dan ketergantungan pada daerah masih kian tinggi (di atas 50%) di masa otonomi daerah seperti saat ini.

Mengamati dari tingkat diskresi dan otoritas penerimaan yang dimiliki daerah saat ini yang sedemikian rupa maka daerah perlu meningkatkan kretivitas pengelolaan penerimaan dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal guna meningkatkan kemandirian daerah. Sehingga dalam hal ini desentralisasi penerimaan akan menjadi menarik untuk dikaitkan dengan kualitas pemerintahan (*governance quality*), kualitas pemerintahan yang dimaksudkan yakni tentang bagaimana pola perilaku tata kelola pemerintahan dalam menyikapi otoritas



penerimaan yang diberikan oleh pusat dalam mengelola sumber daya dan input publik di daerah masing-masing.

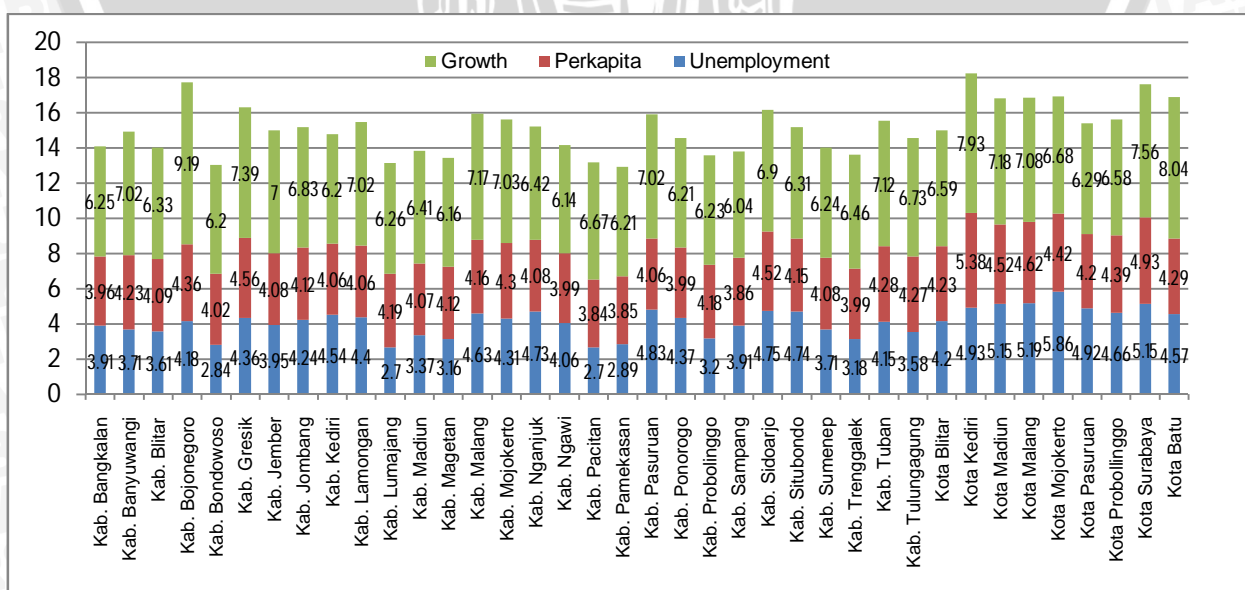
Realitanya, sebagian besar pemerintah daerah di Jawa Timur dipandang dari sisi level pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam mengemban tugas dan fungsi sebagai pelayan publik dikatakan masih relatif kurang baik. Hal ini ditunjukkan dengan hanya terdapat 2 daerah di Provinsi Jawa Timur yang berhasil mencapai prestasi terbaik, daerah tersebut adalah Kabupaten Pacitan dan Jombang (Kemendagri, 2011). Selain itu dipandang dari tingkat Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED), hanya terdapat 11 daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang mampu meraih posisi 20 besar terbaik yakni Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Batu, Magetan, Probolinggo, Lamongan, Tulungagung, Blitar, Kota Kediri, Ngawi dan Nganjuk (KPPOD, 2012). Ini artinya, sebagian besar daerah belum mampu memaksimumkan upaya reformasi pelayanan publik baik dari sisi pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas maupun kreativitas kebijakan tata kelola usaha daerah di masa desentralisasi seperti saat ini.

Selain untuk mendukung peningkatan kualitas pemerintahan, sejatinya desentralisasi fiskal juga diharapkan mampu meningkatkan kinerja ekonomi. Sebagaimana yang diungkapkan pada teori *endogenous growth* di mana keputusan pengambilan kebijakan oleh pemerintah ini pada nantinya akan mempengaruhi upaya peningkatan dan penurunan investasi *human capital* melalui subsidi *training* atau *tax treatment of the returns* selanjutnya melalui subsidi penelitian dan pengembangan keilmuan ini akan mendorong inovasi sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi (Hindriks & Myles, 2004) dan berkembangnya kelembagaan-kelembagaan tata kelola

pemerintahan akan mendorong pertumbuhan pada era pasca desentralisasi (McChulock & Malesky,2010).

Oleh sebab itu, implementasi desentralisasi fiskal yang didukung dengan kualitas pemerintahan seperti prestasi 20 besar terbaik dalam hal Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yakni Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Batu, Magetan, Probolinggo, Lamongan, Tulungagung, Blitar, Kota Kediri, Ngawi dan Nganjuk serta Jombang dan Pacitan yang meraih prestasi 10 besar daerah terbaik dalam hal pertanggungjawaban dan penyelenggaraan daerah maka tidak menutup kemungkinan peluang bagi daerah-daerah terbaik tersebut untuk mendorong kinerja ekonomi akan semakin terbuka lebar. Hal tersebut lah yang kemudian menciptakan kinerja ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur menunjukkan perbedaan di antara masing-masing daerah. Beberapa daerah telah menunjukkan prestasi kinerja ekonomi yang bagus dan di sisi lainnya justru menghasilkan kinerja ekonomi yang buruk. Sebagai gambaran kinerja ekonomi yang dihasilkan dapat dilihat pada gambar 1.2 sebagai berikut.

**Gambar 1.2 :Kinerja Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012 (data diolah)



Bagi daerah yang memiliki tata kelola ekonomi yang kreatif dan bijaksana serta dukungan kapasitas pemerintah yang baik akan menciptakan kinerja ekonomi yang baik pula. Seperti halnya kemampuan menghadirkan investor yang mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh sebab itu keberadaan tata kelola daerah memiliki peran bagi pencapaian kinerja ekonomi daerah.

Kinerja ekonomi dipandang dari sisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi semata juga belum tentu menjamin tercapainya tingkat pengangguran yang rendah di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Beberapa daerah dengan perekonomian eksis seperti Kota Surabaya, Kota Sidorjo dan Kota Kediri yang notabennya adalah daerah para investor justru sebanding dengan tingginya penganggurannya. Sejumlah 55% daerah dengan tingkat pengangguran di atas rata-rata dan mayoritas diduduki oleh daerah-daerah yang notabennya dominan pada kawasannya investor khususnya bidang industri seperti Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Gresik dan Kota Pasuruan, dsb.

Justru untuk daerah-daerah kecil seperti Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek dan Kab. Tulungagung, dsb yang menghasilkan tingkat pengangguran relatif rendah. Tingginya angka pengangguran di masing-masing daerah biasanya terjadi akibat tingginya jumlah penduduk angkatan kerja yang tidak mampu memasuki lapangan kerja baru akibat lemahnya ketrampilan yang dimilikinya. Dengan kata lain hadirnya pertumbuhan ekonomi tinggi bagi daerah maju belum mampu memproduksi tingkat pengangguran rendah. Walaupun dengan tingkat pengangguran tinggi beberapa daerah menunjukkan pendapatan perkapita yang sepadan juga. Bahkan secara keseluruhan tingkat pendapatan perkapita di masing-masing daerah tidak menunjukkan kesenjangan yang ekstrim.



Kota Kediri menduduki pendapatan perkapita tertinggi dan disusul dengan Kota Surabaya. Hal ini dapat saja terjadi mengingat bahwa dibandingkan dengan Kota Kediri, Kota Surabaya lebih padat akan penduduk sehingga pendapatan perkapita lebih kecil dibandingkan dengan Kota Kediri. Sedangkan di sini terlihat juga bahwa daerah-daerah yang kurang pesat dalam eksistensi pertumbuhan ekonomi menunjukkan pendapatan perkapita yang rendah juga seperti Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Tuban, dsb. Sehingga setidaknya pertumbuhan ekonomi yang tinggi mewujudkan pendapatan perkapita yang tinggi pula bagi daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung terkait penelitian ini yakni seperti analisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi (Adi, 2005) di mana hasil yang diperoleh ialah pertumbuhan ekonomi signifikan lebih baik selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dibandingkan sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sedangkan Rodriguez-pose & Kroijer (2009) yang mengkaji mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis menyatakan bahwa ada korelasi negatif antara pengeluaran dana transfer kepada pemerintah sub-nasional terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi sebaliknya kecenderungan korelasi positif desentralisasi pendapatan (Taxes assigned) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana penelitian terdahulu terkait analisis keterkaitan kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi yang mana menyatakan berkembangnya kelembagaan-kelembagaan tata kelola pemerintahan akan mendorong pertumbuhan pada era pasca desentralisasi McChulock & Malesky (2010). Sedangkan Badjun (2005) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa ada hubungan positif antara kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua, penelitian dari Aidt, et.al (2007) yang menganalisis mengenai hubungan

antara rezim tata kelola pemerintahan, korupsi dan pertumbuhan dan hasilnya menunjukkan rezim yang memiliki kualitas lembaga politik yang tinggi, korupsi berdampak secara negatif terhadap pertumbuhan.

Analisis lainnya yang tidak sejalan dengan pernyataan tersebut yakni menyatakan bahwa desentralisasi menurunkan tingkat kualitas pemerintahan. Hasil ini dapat ditemui dari hasil analisis terbaru Bartolini & Santolini (2013) di negara-negara OECD yang mengungkapkan bahwa kemandirian fiskal mengakibatkan kualitas tata kelola pemerintahan menurun.

Implementasi desentralisasi fiskal di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur belum sepenuhnya mendorong kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi seperti yang diharapkan. Sebagaimana yang dapat dilihat penyelenggaraan desentralisasi fiskal masih menyisakan sejumlah masalah seperti rendahnya kualitas pemerintahan dan tingginya tingkat pengangguran di sejumlah daerah di Jawa Timur. Oleh sebab itu kemudian penulis tertarik untuk mengerucutkan unit analisisnya pada area Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan studi kasus tahun 2011. Mengingat sebagian besar penelitian terdahulu menggerakkan kajiannya pada analisis keterkaitan desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi dan atau desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintahan saja serta kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi secara parsial. Maka penulis tertarik untuk mengaitkan desentralisasi fiskal, kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi secara simultan.

Sehingga harapannya mampu menunjukkan gambaran baru dari desentralisasi fiskal yang kemudian dikaitkan dengan kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi yang kemudian mampu memberikan implikasi kebijakan nyata bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Atas dasar teori yang



menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh terhadap kinerja ekonomi baik secara langsung maupun tidak secara langsung yang mana melalui peran kualitas pemerintahan. Dengan demikian judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi Di Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bagian dari reformasi konstitusi yang sangat penting, hal ini dikarenakan implementasi desentralisasi fiskal memberikan kesempatan bagi daerah untuk bereksperimen fiskal sesuai dengan kreativitas masing-masing daerah dalam menunjang kebutuhan prioritas dan konkrit daerahnya secara efektif dan efisien. Sehingga akan menciptakan percepatan kesejahteraan masyarakat ukuran-ukuran kinerja ekonomi. Prestasi kinerja keuangan di masa desentralisasi fiskal yang lebih baik di keseluruhan daerah Provinsi Jawa Timur ironisnya belum menstimulus eksistensi perubahan kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi yang sepadan baiknya di masing-masing daerah di Provinsi Jawa Timur.

Penyelenggaraan desentralisasi fiskal justru menciptakan masing-masing daerah menunjukkan outcome yang berbeda satu sama lain. Beberapa daerah menunjukkan prestasi yang menakjubkan setelah mengimplemetasikan desentralisasi fiskal seperti perbaikan-perbaikan kinerja ekonomi, di sisi lain justru memunculkan kondisi kelambatan bahkan keterpurukan yang disebabkan pengalihan kewenangan-kewenangan secara luas terhadap daerah tanpa diikuti sumber daya yang memadai. Hal demikian telah disadari sebelumnya bahwa



daerah yang memiliki faktor *endowment* akan relatif lebih siap menerima tuntutan kemandirian dibandingkan dengan daerah yang kurang memiliki.

Terlepas dari faktor tersebut, walaupun faktor *endowment* yang rendah akan tetapi mampu mencetak kinerja ekonomi yang luar biasa dikarenakan keberadaan tata kelola ekonomi daerah yang berkualitas serta terintegrasi dengan kegiatan usaha dan stakeholder yang terkait. Sehingga dapat menumbuhkan eksistensi perekonomian, seperti investasi, konsumsi, dll. Sehingga melihat perbedaan outcome masing-masing daerah yang dihasilkan oleh sistem desentralisasi maka hal ini mengisyaratkan bahwa ada perbedaan tata kelola pemerintahan yang menciptakan kesenjangan level kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di masing-masing daerah sehingga menimbulkan perbedaan kinerja ekonomi. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi ?
3. Bagaimana pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa sebagai salah satu wilayah yang potensial, implementasi desentralisasi fiskal di daerah-daerah Provinsi Jawa Timur belum mampu meningkatkan percepatan kinerja ekonomi yang lebih baik secara serempak serta munculnya kesenjangan prestasi kinerja ekonomi antar daerah sebagai

signal perbedaan tata kelola daerah yang berbeda satu sama lain, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan
2. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian ini yang diketahui sebelumnya, maka seyogyanya penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat antara lain sebagai berikut :

1. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam proses perumusan kebijakan ekonomi yang tepat dan komprehensif
2. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya selama desentralisasi fiskal
3. Sebagai gambaran konkrit mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi dan kualitas pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur pada khususnya
4. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah khasanah keilmuan pada khususnya mengenai dampak desentralisasi terhadap kualitas pemerintahan

dan kinerja ekonomi bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti lainnya pada khususnya

5. Menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengenai pembahasan dalam penelitian.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dan Kualitas Pemerintahan

Dukungan teori yang mampu menjelaskan mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap perekonomian dan pelayanan publik yakni *fiscal federalism theory*. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan teori ini dibagi dalam dua perspektif yaitu teori tradisional atau teori generasi pertama (*First Generation Theories*) dan teori perspektif baru atau teori generasi kedua (*Second Generation Theories*). Dalam pandangan teori generasi pertama terdapat dua pendapat yang menekankan keuntungan alokatif desentralisasi, diantaranya adalah *pertama*, mengenai penggunaan *knowledge in society*, Implementasi desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah daerah mampu menyelaraskan penyediaan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara spesifik (Oates, 2007) karena desentralisasi mampu menciptakan kemudahan dalam proses perolehan informasi yang efisien dari masyarakat lokal untuk pemerintah. *Kedua*, Tiebout Model yang mana menunjukkan bahwa persaingan pemerintah dan kompetisi antar daerah mengenai alokasi pengeluaran publik tidak menutup kemungkinan masyarakat akan memilih barang dan jasa publik sesuai dengan preferensi masyarakat.

Perhatian teori generasi pertama lebih mengarah pada kemampuan daerah untuk mencapai kondisi *self financing* dalam pembiayaan pengeluaran. Sedangkan pada teori generasi kedua (*Second Generation Theory*) lebih menekankan pada pentingnya *revenue* dan *expenditure assignment* antar level pemerintahan. Teori ini menjelaskan bagaimana desentralisasi fiskal mampu

berpengaruh terhadap perilaku pemerintah daerah. Artinya bahwa ketika pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam merancang peraturan tentang ekonomi lokal, otomatis campur tangan pemerintah pusat menjadi terbatas.

Sehingga, teori generasi kedua mendasarkan pada dua mekanisme dalam menyelaraskan antara kepentingan pemerintah daerah dengan kemakmuran ekonomi, interaksi horizontal antar daerah, interaksi vertikal antar pemerintahan. Mekanisme tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu a) Keadaan mobilitas pasar barang dan jasa yang tinggi menjadi ruang bagi terciptanya kompetisi antara pemerintah daerah sebagai insentif dalam penyediaan layanan publik. Sehingga melalui persaingan pemerintah dalam hal penyediaan layanan publik akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebaliknya jika dari sisi kelembagaan dan penyediaan layanan publik tidak harmonis dengan pasar dan masyarakat maka akan menimbulkan mobilitas negatif bagi pertumbuhan ekonomi produksi ke daerah lain yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menurun; b) Keterkaitan yang erat antara penerimaan pemerintah daerah dengan pengeluaran daerah juga menjadi insentif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran daerah. Dengan demikian transfer dari pemerintah pusat akan menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. dengan kata lain pembatasan redistribusi pemerintah pusat kepada daerah akan menciptakan insentif bagi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi pasar.

Adapun teori desentralisasi fiskal melalui pendekatan Neo Klasik dengan asumsi bahwa masyarakat lokal memiliki preferensi yang homogen sehingga pengambilan keputusan atau tata kelola pemerintahan di tingkat pemerintahan terendah terkait pelayanan publik akan bekerja optimal dibanding terpusat (Parhah,2013).Hammond & Tosun (2006) mendefinisikan desentralisasi



sebagai pengalihan fungsi administratif dan fiskal. Memandang dari sisi fiskal, desentralisasi fiskal mengacu pada penyerahan kapasitas dan otoritas kepada daerah untuk mengidentifikasi serta mengumpulkan pajak dan pendapatan lain, mengelola sumber daya publik dan menciptakan pembelanjaan untuk ketersediaan layanan publik (Aristovnik,2012).

Dengan demikian akan memunculkan hak krusial menjalankan pemerintahan bagi pemerintah daerah dalam hal pengambilan keputusan mengenai anggaran pemerintah serta bagaimana memperoleh dan membelanjakannya (Davas, et al, 1987). Meluasnya kewenangan dan diskresi fiskal ini berdampak pada peningkatan tuntutan tanggung jawab kemandirian untuk meningkatkan kapasitas fiskal dalam rangka menyeimbangi tanggung jawab yang diemban oleh daerah selama pelaksanaan desentralisasi.

Faktor kesiapan segala sumber daya sangat menentukan derajat kemandirian daerah. Ketika daerah tidak mampu lagi menyeimbangkan antara anggaran kebutuhan penyediaan layanan publik dengan tingkat pendapatan yang dimiliki, maka dapat memicu ketidakseimbangan fiskal oleh sebab itu transfer fiskal menjadi sangat penting bagi kelangsungan pemenuhan layanan publik (Uchimura & Suzuki,2009). Oleh karena itu desentralisasi dapat dikatakan sebagai instrumen yang mampu menjaga stabilitas kondisi ekonomi nasional, karena bantuan transfer keuangan ke daerah menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat di daerah (Hanafi dan Mugroho,2009).

Mengukur desentralisasi fiskal pada umumnya oleh peneliti sebelumnya menggunakan ukuran pembagian alokasi pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat (seperti halnya, Mello & Barenstein (2001); Altunbas & Thornton (2012); Kyriacou & Roca-Sagales (2009); dll). Para



peneliti tersebut sebagian besar mengacu pada ukuran desentralisasi GFS (Government Finance Statistic) fiskal yang dibentuk oleh IMF. Namun ternyata ukuran ini sepenuhnya belum mampu mencerminkan derajat desentralisasi fiskal, karena sejatinya tanpa adanya pengontrolan pertimbangan kemandirian pendapatan dan pengeluaran yang tinggi (diskresi fiskal), pemilihan pejabat secara desentralisasi. Maka pembagian pengeluaran kepada pemerintah daerah sebagai variabel desentralisasi hanya sedikit dalam menjelaskan level desentralisasi (Ebel & Yilmaz, 2002). Sehingga, elemen diskresi dan otonomi fiskal menjadi poin penting dalam menilai seberapa besar derajat desentralisasi fiskal *"a system is more fiscally decentralized the greater the proportion of tax-revenues and expenditures "owned" by lower tiers of government "* (Kyriacou & Roca-Sagales, 2009).

Merujuk pada konsep di atas maka indikator desentralisasi fiskal Uchimura & Suzuki (2009) menggolongkan beberapa indikator desentralisasi yang setidaknya melengkapi ukuran desentralisasi fiskal yang lebih tepat, antara lain sebagai berikut :

1. Bagian alokasi pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran

$$RLE = \frac{\sum_i LE_i}{(\sum_i LE_i + CE)} \dots\dots\dots(1)$$

Dimana :

RLE = rasio belanja daerah terhadap total pengeluaran fiskal (belanja daerah + pusat ) yang mana membandingkan tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah dengan pemerintah pusat

LE = belanja daerah

CE = belanja pusat

i = pemerintah daerah (i)

2. Bagian alokasi pendapatan daerah terhadap total pendapatan

$$RLR = \frac{\sum_i LR_i}{(\sum_i LR_i + CR)} \dots\dots\dots(2)$$

Dimana :

RLR = rasio pendapatan daerah

LR<sub>i</sub> = Pendapatan daerah i (tidak termasuk dana transfer dari pusat)

CR = pendapatan pemerintah pusat

3. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer

$$DFT = \frac{\sum_i FT_i}{(\sum_i LTR_i)} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

DFT = rasio dana transfer terhadap total pendapatan daerah

FT<sub>i</sub> = dana transfer dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah (i)

LTR<sub>i</sub> = total pendapatan pemerintah daerah (i)

4. Kemandirian fiskal daerah

$$FA = \frac{\sum_i LOR_i}{(\sum_i LTR_i)} \dots\dots\dots(4)$$

Dimana :

FA = rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah



$LOR_i$  = pendapatan asli daerah (i) (Tax revenues + non-tax revenues)

Di Indonesia LOR (Local Own Revenue) disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah yang mana terdiri dari 3 sumber pendapatan yakni retribusi dan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

##### 5. Diskresi pengeluaran daerah

$$FD = \frac{\sum_i GR_i}{(\sum_i LTR_i)} \dots \dots \dots (5)$$

Dimana :

FD = ratio of general revenue to local total revenues

$GR_i$  = lain-lain pendapatan daerah yang sah (i) (dana bagi hasil dari provinsi + dana bagi hasil pusat +DAU)

Implementasi desentralisasi fiskal menempatkan pemerintah daerah mampu menyelaraskan penyediaan layanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara spesifik (Oates,2007). Selain daripada itu desentralisasi memberikan keuntungan yang mengarah pada perbaikan kualitas pemerintahan sebagaimana yang telah disebut oleh Faguet (2011) yaitu antara lain :

*“ a) it will improve the accountability and responsiveness of government by altering its structure so as to increase citizen voice and change the deep incentives that public officials face (Faguet, 2012), b) reduce abuses of power by transferring certain central government functions and resources to lower levels, c) improve political stability by giving aggrieved minorities control over subnational governments with limited power over issues that affect them directly, and d) increase political competition by creating many smaller arenas that politicians vie to control “.*

Singkat maksud pernyataan diatas yaitu desentralisasi mampu meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas, mengurangi penyalahgunaan wewenang melalui fungsi nyata pemerintah pusat dan sumber daya terhadap



pemerintah yang lebih rendah, memperbaiki stabilitas politik dan meningkatkan persaingan politik. Beberapa poin keuntungan desentralisasi diatas mengisyaratkan langkah reformasi desentralisasi sebagai pilihan terbaik untuk mengatasi permasalahan kualitas pemerintahan yang kian menjamur di era sentralisasi, seperti berkembangbiaknya tindakan KKN tidak lain salah satunya wujud dari dampak pelaksanaan sistem pemerintahan yang berpola sentralistik-monopolistik (Sumarto,dkk.,2004). Mengingat ketidaksesuaian perilaku tidak hanya terjadi di tingkatan atas, Ivanyna & Shah (2010) juga mempertegas bahwa permasalahan gangguan fungsi sektor publik seperti lemahnya transparansi & partisipasi dan sistem peradilan, begitu juga permasalahan baru munculnya elit lokal, memburuknya manajemen ekonomi makro karena lemahnya disiplin fiskal dan perilaku penyimpangan fiskal oleh unit sub-nasional dapat diatasi dengan langkah solutif lokalisasi.

Selain dari pada itu argumen dasar desentralisasi adalah mekanisme efektif bagi akuntabilitas pemerintah ialah kompetisi antar daerah dapat melatih kedisiplinan dan menghentikan kekuatan monopoli pemerintahan yang memusat (Hindriks & Myles,2004:462). Untuk melihat logika dari argumen tersebut maka dapat dilihat pada ilustrasi tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 : **Political Accountability and Voter Welfare Theory**

	State <i>a</i>	State <i>b</i>
Policy <i>A</i>	0,3	<i>r</i> ,0
Policy <i>B</i>	<i>r</i> , 1	0,1

Sumber : Hindriks & Myles, 2004 (Intermediete Public Economics.hal:462)

Kompetisi yang dapat terjadi dari ilustrasi gambar di atas ialah misalkan *state a* adalah politisi membuat keputusan baik dan buruk pada *state b*. Maka jika pemerintah mengadopsi kebijakan A, dimana hal ini lebih baik di *state a* atau kebijakan B di mana lebih baik di *state b*. Dengan kata lain pemilihan kebijakan A oleh *state a* maka akan mengakibatkan relatif buruk bagi *state b*. Begitu juga untuk kebijakan B yang diadopsi oleh *state b* maka akan mengakibatkan *state a* relatif lebih buruk. Hal ini lah yang kemudian menstimulus masing-masing politisi berlomba untuk meningkatkan akuntabilitasnya dalam rangka mempertahankan kedudukannya melalui pilihan rakyat.

Secara umum tata kelola pemerintahan adalah ilmu perilaku dan kinerja pemerintah (Dethier,1999). Dengan memfokuskan satu pandangan bahwa tata kelola pemerintahan adalah kemampuan pemerintah untuk menginternalisasi suatu eksternalitas (Kong,2011). Menyoroti pada sisi *good governance*, Treisman (2000) mendefinisikan kualitas pemerintah tentang bagaimana penyediaan barang dan jasa publik yang diminta oleh publik dapat terpenuhi dengan biaya minimal pada beban pajak dan peraturan. Sedangkan Kyriacou & Roca-Sagales (2009) mengungkapkan bahwa pernyataan bahwa kualitas pemerintahan adalah tinggi jika sektor publik tidak mendistorsi peran swasta (menghormati hak milik, tidak terlalu berintervensi), administrator efisien (rendah korupsi, birokrasi pendek, tinggi kepatuhan pajak), menyediakan barang-barang publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur,dll) dan terakhir memungkinkan dan melindungi kebebasan politik. Singkatnya kualitas pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagaimana pemerintah menjalankan perilaku dan kinerja dilingkungan pemerintahan berdasarkan fungsi, peran, amanat, tanggung jawab dan kaidah yang berlaku dalam menjalankan serangkaian aktivitas ekonomi ataupun non-ekonomi.



Mengadopsi dari hasil konferensi nasional tentang kemandirian daerah dan *local good governnace* sebagaimana yang dirilis oleh UNDP (2002), ada beberapa 10 prinsip local good governance yang dapat dijadikan sebagai indikator kualitas pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. *Participation*, melibatkan masyarakat luas untuk mengemukakan pendapat mereka secara lisan maupun tulisan dalam proses pengambilan keputusan daerah serta menjunjung tinggi hak-hak politik, sipil dan manusia
2. *Rule of Law*, proses penegakan hukum yang adil tanpa memandang status,kekayaan atau jabatan seseorang serta adanya perlindungan dan penghargaan hak-hak kepemilikan individu. Disisi lain juga menilai tentang kualitas pelaksanaan kontrak, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan adanya kriminalitas dan kekerasan.
3. *Transparency*, menciptakan keterbukaan informasi oleh pemerintah terhadap masyarakat melalui kemudahan masyarakat untuk mengakses informasi penyediaan layanan publik, dsb.
4. *Equality*, membuka kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanya dengan pilihan-pilihan yang mereka tentukan.
5. *Responsiveness*,menumbuhkan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat atas kebutuhan dan keinginan mereka.
6. *Vision*, menciptakan landasan daerah pada visi dan startegi yang mana melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut.
7. *Accountability*, meningkatkan tanggung jawab pembuat kebijakan atas segala keputusan yang diambil berdasarkan keinginan masyarakat.
8. *Supervision*,menumbuhkan upaya-upaya supervisi (mengkoordinasi, mengarahkan dan mengontrol) selama jalannya pemerintahan dan



melaksanakan pembangunan melalui pelibatan sektor swasta dan masyarakat umum.

9. *Efficiency & Effectiveness*, penggunaan sumberdaya sebaik mungkin dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan. Effect :mengukur kompetensi birokrasi dan kualitas pelayanan masyarakat.

10. *Profesionalism*, meningkatkan kapasitas dan disposisi moral bagi pemerintah sehingga lebih cepat, akurat dan mampu dalam menyediakan pelayanan publik.

Menambahkan indikator kualitas pemerintahan diatas, Bank Dunia (2005) telah menyimpulkan enam indikator tata kelola dan tiga diantaranya melengkapi indikator yang telah tersebut diatas yaitu antara lain:

1. Ketidakstabilitas Politik dan Kekerasan - mengukur tingkat kemungkinan adanya ancaman kekerasan terhadap, atau perubahan pada, pemerintah, termasuk terorisme.
2. Beban Peraturan - mengukur sejauh mana dampak dari kebijakan pasar yang tidak bersahabat
3. Kontrol Korupsi - mengukur sejauh mana kekuatan publikatas keuntungan pribadi, termasuk korupsi skala besar dan kecil serta state capture

Menurut OECD (Organization for Economic and Cooperation Development) poin penting dari derajat desentralisasi fiskal adalah diskresi fiskal pemerintah daerah dalam menentukan secara mandiri atas basis dan tarif pajak, dengan kata lain pendapatan bersumber dari pajak dan retribusi yang relatif tinggi mengindikasikan pengeluaran daerah sebagian besar terpenuhi oleh "own tax revenue" ini berarti menunjukkan desentralisasi fiskal yang tinggi pula.

Mengingat tujuan implementasi desentralisasi yakni salah satunya menciptakan kualitas pemerintahan yang lebih baik serta menjunjung tinggi dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas. Maka penelitian sebelumnya memperkuat postulat tersebut dengan bukti yang didasarkan pada studi empirisnya bahwa desentralisasi dan tata kelola pemerintahan memiliki hubungan positif, yakni ketika total pendapatan daerah (pendapatan bukan pajak, dana grant dan transfer) yang lebih tinggi dari pada pemerintah pusat "*higher levels of government*" (Mello & Barenstein, 2001). Penelitian lain menunjukkan hasil bahwa pemerintah daerah yang memiliki *share of fiscal revenues and expenditure* yang lebih tinggi di suatu negara menunjukkan angka korupsi yang rendah (Altunbas & Thornton, 2012). Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil kajian Ivanyina & Shah (2010) dengan adanya pelimpahan wewenang kepada daerah dapat menurunkan intensitas penyuapan dan jumlah suap yang diterima oleh pejabat pemerintahan baik dari rumah tangga maupun perusahaan, hasil metode kuantitatif membuktikan ada hubungan negatif antara desentralisasi dengan persepsi korupsi secara signifikan. Selain itu desentralisasi menjadikan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan akan masyarakat yang mana ditunjukkan dengan meningkatnya pengeluaran pendidikan dan kesehatan di Kabupaten di Indonesia (Sjahir & Kis-Katos, 2011).

Hasil studi empiris berbanding terbalik dengan hasil kajian pada umumnya dari Bartolini & Santolini (2013), dengan menggunakan indikator kualitas pemerintahan yang dipublikasi oleh World Bank yakni efektivitas, kualitas peraturan, tata hukum dan pengendalian korupsi dan lima derajat otonomi fiskal, hasil menunjukkan hubungan negatif antara otonomi fiskal dan kualitas pemerintahan. Semakin tinggi otonomi fiskal yang dilimpahkan pada pemerintah



daerah maka semakin rendah kualitas pemerintahan suatu negara. Treisman (2000) menambahkan bahwa dari tipe-tipe desentralisasi yang digunakan (*structural, decision, resource, electoral, institutional*) cenderung menyebabkan kualitas pemerintahan menurun yang mana dengan bukti empiris persepsi korupsi tinggi di negara yang terdiri dari jumlah pemerintahannya besar secara vertikal.

## 2.2 Keterkaitan Desentralisasi Fiskal dan Kinerja ekonomi

Satu dekade lalu, eksperimen membuktikan implementasi desentralisasi efektif diterapkan pada 80% dari seluruh negara di dunia, sejak itu negara-negara lain mulai mengikuti seperti Bolivia, Kamboja, Ethiopia, Perancis, Indonesia, Jepang, Peru, Afrika Selatan, Korea Selatan, Uganda, Inggris dan lain-lain (Faguet, 2011). Hal ini mengingatkan bahwa desentralisasi membawa dampak yang menguntungkan karena beberapa alasannya yang mendasar yaitu 1) pemerintah daerah lebih mengetahui akan potensi dan kebutuhan yang dipimpinnya, sehingga pelayanan publik dapat disesuaikan dengan apa yang menjadi prioritas kebutuhan daerah (Tiebout, 1956 dan Oates, 1972 dalam Oates, 2007); 2) meningkatkan kompetisi fiskal antar daerah serta menuntut adanya efisiensi pengadaan layanan publik; 3) mendorong kebebasan untuk menciptakan inovasi dan eksperimen dalam mengadopsi kebijakan publik baru, sehingga desentralisasi sebagai wadah untuk meghadirkan kretivitas fiskal (Oates, 2007); kedekatan dan keuntungan informasi dapat meningkatkan kapabilitas pemerintah dalam penyediaan layanan publik yang lebih berkualiats sehingga hal ini mampu meningkatkan efisiensi ekonomi (Rodriguez-Pose & Kroijer, 2009) dan pada akhirnya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi (Zhang & Zou, 1996; Hammond & Tosun, 2006; Lessman, 2009).



Berdasarkan konsep mengenai pertumbuhan ekonomi yang diungkapkan oleh Lipsey, et.al (1987) menafsirkan pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan potensial yang disebabkan oleh perubahan penyediaan faktor produksi (tenaga kerja dan modal) atau produktivitas faktor produksi (output per unit input faktor produksi). Peningkatan jumlah dan kualitas barang-barang ini secara ekonomi memang bukanlah suatu yang terjadi secara alami akan tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut.

Menurut teori Schumpeter yang menitikberatkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dari keberadaan pengusaha dalam menciptakan inovasi-inovasi yang menguntungkan. Menurut Schumpeter, perekonomian yang sedang tidak berkembang dapat menstimulus pengusaha menciptakan inovasi. Atas dasar ekspektasi keuntungan lebih dari inovasi tersebut maka pengusaha akan melakukan peminjaman modal dan penanaman modal sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kegiatan ekonomi suatu negara. Namun, pada saat perekonomian telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi justru menyebabkan keterbatasan untuk menciptakan inovasi sehingga laju pertumbuhan ekonomi menjadi lambat dimana kondisi ini telah berada pada *stationary state* (Sukirno, 2002).

Neo-klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow memandang bahwa pertumbuhan ekonomi dibentuk dari perkembangan faktor-faktor produksi. Bentuk persamaan yang diciptakan yaitu :

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Di mana :

$\Delta Y$  = tingkat pertumbuhan ekonomi

$\Delta K$  = tingkat pertambahan barang modal

$\Delta L$  = tingkat pertambahan tenaga kerja

$\Delta T$  = tingkat pertambahan teknologi

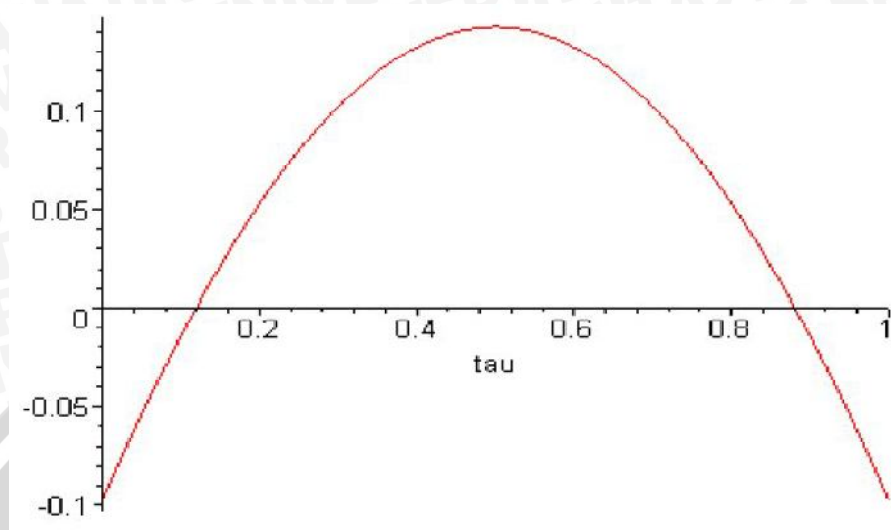
Selain dari pada itu, dari sisi lain teori pertumbuhan ekonomi yang memasukkan unsur pengeluaran pemerintah sebagai *endogenous variable*, maka dapat dijelaskan bagaimana desentralisasi fiskal mempengaruhi kinerja ekonomi melalui *The Tiebout Model* dengan asumsi *citizen mobility* yang sebagaimana dibangun oleh Charles M. Tiebout (Hyman, 1983) menjelaskan bahwa :

*"The level and mix of local expenditures and taxes are likely to exhibit wide variations among local political. Therefore, many citizens will choose to live in communities where the government budget best satisfies their own preferences for public service, provided they are not restricted in their mobility among communities. Thus, government expenditure and revenue patterns tend to be set on the local level and the mobile citizen maximizes personal well being by choosing to live in some particular political jurisdiction".*

Keberadaan desentralisasi yang menciptakan *political jurisdiction* pada masing-masing tingkatan pemerintahan mendorong manusia untuk memilih daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik sehingga hal ini lah yang kemudian mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah cenderung untuk menggerakkan perbaikan layanan publik.

Oleh sebab itu kesejahteraan yang tinggi perlu dibayar dengan harga layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yakni disebut pajak. Eksistensi input publik memperbaiki peran positif bagi pengeluaran publik dan sebagai mekanisme langsung di mana kebijakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Melalui *Endogenous Growth Model* dapat diterangkan bagaimana pajak dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2.1 : Tax Rate and Consumption Growth



Sumber : Hindriks & Myles (2004)

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah yang dibiayai oleh pajak (*public input*). Pada tingkat input publik yang rendah pertumbuhan negatif, selanjutnya dengan tingkat pajak yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi (g). Namun pada akhirnya pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang terlalu eksekif akan menurunkan pertumbuhan ekonomi disebabkan tingkat pajak yang terlalu tinggi sehingga mendistorsi ekonomi.

Kajian pembuktian teori menunjukkan hasil analisis bahwa desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di China di pertengahan 1980an (Lin & Liu, 2000). Pendapat lainnya dari Hammond & Tosun (2006) melalui studinya di wilayah metropolitan dan non-metropolitan U.S menunjukkan hasil hubungan negatif antara desentralisasi lokal dan pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah non-metropolitan. Sedangkan ada



hubungan sebaliknya “positif” di wilayah metropolitan. Sedikit berbeda dengan studi di Indonesia oleh Adi (2005) yang menggerakkan penelitiannya di kabupaten dan kota se Jawa bali selama periode sebelum dan sesudah otonomi daerah, hasil yang diperoleh ialah pertumbuhan ekonomi signifikan lebih baik selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dibandingkan sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penelitian terbaru di Indonesia lainnya yang senada oleh Yulindra (2012) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap PDRB secara signifikan di wilayah Sumatera Barat.

Namun, disisi lain justru berbanding terbalik dengan apa yang telah dinyatakan diatas. Sebuah penelitian terdahulu oleh Zhang & Zou (1996) ada hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi China. Serupa, di 21 negara OECD (1990-2005) menunjukkan hubungan negatif signifikan (Rodriguez-Pose, Andres & Ezcurra, Roberto, 2010). Hasil penelitian yang sejalan dari Rodriguez & Kroijer (2009) menganalisis hubungan antara level desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di 16 negara Central and Eastern European selama periode 1990-2004, ukuran desentralisasi fiskal yang digunakan yakni antara lain : 1) pengeluaran pemerintah sub-nasional terhadap pengeluaran total; 2) pendapatan pajak terhadap total pendapatan dan dana bagi hasil; 3) transfer ke pemerintah sub-nasional terhadap total pendapatan dan bagi hasil subnasional, dalam penelitiannya ini menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara pengeluaran pemerintah dan pengeluaran dan transfer ke pemerintah sub-nasional terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di CEE selama periode penelitian secara signifikan. Sedangkan pajak daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi secara berkorelasi positif. Pendapat lain yang serupa justru menyatakan dengan tegas

bahwa desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi tidak ada hubungan sama sekali di negara OECD tahun 1975-2001 (Baskaran & Feld, 2009).

Terlepas dari polemik yang mewarnai kajian tentang desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa aksioma menyebutkan bahwa menilai kinerja ekonomi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi saja melainkan perlu memasukkan kondisi-kondisi riil lainnya yang mempengaruhi seluruh stakeholder yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Menurut Khramov & Lee (2013) memandang indikator kinerja ekonomi bukanlah variabel yang berdiri sendiri. Menurutnya, Indikator kinerja ekonomi dikategorikan menjadi empat variabel yang mampu mempengaruhi elemen rumah tangga, perusahaan dan pemerintah secara simultan yakni :

1. Tingkat inflasi, pengukuran kondisi ekonomi moneter
2. Tingkat pengangguran, pengukuran kondisi produksi ekonomi
3. Defisit anggaran terhadap GDP ( $\frac{Def}{GDP}$ ), pengukuran terhadap kondisi fiskal ekonomi
4. Pertumbuhan GDP riil, sebagai pengukuran agregat kinerja ekonomi secara keseluruhan

Sedangkan menurut Ristek menggolongkan kinerja ekonomi berbasis pengetahuan Indonesia menjadi 12 yaitu 1) GDP (miliar US \$); 2) Pertumbuhan GDP (%); 3) GDP per Kapita (US \$); 4) IPM (Indeks Pembangunan Manusia); 5) Indeks Kemiskinan (%); 6) Rating Risiko Gabungan (CRR); 7) Pengangguran (%); 8) Pekerja di sektor pertanian (%); 9) Pekerja di sektor industri (%); 10) Pekerja di sektor jasa (%); 11) Pekerja berusia 15 ke atas setiap sektor (Juta orang); 12) Konsumsi listrik (kWh per kapita).



Sebagaimana Parhah (tanpa tahun) menyebutkan bahwa salah satu sasaran umum desentralisasi fiskal di Indonesia ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sehingga, ada sebuah gagasan yang menyebabkan sebagian besar negara mengaplikasikan strategi atau mempertajam inisiatif desentralisasi bagi yang telah mengaplikasikannya ialah desentralisasi dapat mengangkat permasalahan, termasuk masalah kemiskinan (Malik, 2008). Kemiskinan memiliki konsep yang luas, secara konsep ekonomi didefinisikan *"in terms of the external circumstances which condition a person's behavior, especially the behavior he displays in economic transaction, buying consumption items, selling productive services, securing professional advice, etc"* (Watts, 1964). Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi akan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat primer seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

*"The goal of many decentralization reforms is to empower local communities through their local governments; to provide a more equitable allocation of resources; and to assure improvement in the delivery of key services, such as education and health care. In the context of lesser developed economies, assuring equity –in the form of policies designed to alleviate poverty- take on even greater significance (USAID, 2006)".*

Desentralisasi fiskal memiliki dampak penting terhadap pemberdayaan masyarakat, mengingat kedekatan dan informasi pemerintah daerah akan kondisi serta potensi daerah yang dipimpinnya. Dengan kata lain, implementasi desentralisasi fiskal memfasilitasi pemerintah daerah untuk berkreasi dalam menciptakan kebijakan fiskal untuk alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan daerah guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.



Sapulveda & Martinez-Vasques (2010) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat berdampak secara langsung terhadap kemiskinan atau ketidakmerataan pendapatan dimisalkan, pergerakan menuju desentralisasi fiskal mungkin akan mengubah campuran pajak dan komposisi pengeluaran publik, dan pada gilirannya dapat berdampak pada pajak dan pengeluaran tak terduga. Disamping itu, mungkin mendorong pergerakan masyarakat untuk meraih standart hidup yang lebih baik. Pendapatan pajak yang mempertimbangkan penetapan tarif dan basis pajak yang pro-terhadap rakyat miskin, dapat juga sebagai langkah konkrit upaya pengentasan kemiskinan. Sebaliknya, dampak secara tidak langsung ditransmisi melalui jumlah faktor sosiologi-ekonomi yang mungkin dipengaruhi proses desentralisasi fiskal, dan pada gilirannya dapat mempengaruhi kemiskinan dan distribusi pendapatan. Melalui pertumbuhan ekonomi tujuan utama kebijakan reformasi *market-based* ekonomi dapat berdampak pada perbaikan standar hidup secara tidak langsung (Martinez-Vasques & Rider, 2006).

Hasil Sapulveda & Martinez-Vasques (2010) mengutarakan hasil kajiannya bahwa desentralisasi fiskal berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan dengan jaminan *general government* (pemerintah pusat, pemerintah bagian, dan pemerintah daerah) mampu berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi (paling tidak 12 % atau lebih) atau pengeluaran sub-nasional lebih kecil dari ketiga pemerintahan tersebut.

Namun, Steiner (2005) menyatakan kealpaan dari pendapat diatas yang menjamin pengentasan kemiskinan pada *expenditure assignment*, menurutnya desentralisasi dapat mempengaruhi penurunan kemiskinan jika dengan mengkombinasikan pelimpahan tanggung-jawab pengeluaran dan

kekuatan peningkatan pajak (mis. *local tax power*) bagi pemerintah yang lebih rendah (*lower levels of government*). Sebagaimana pernyataan terbaru yang serupa juga menyebutkan hasil analisisnya bahwa kemandirian fiskal pendapatan dan pengeluaran di provinsi berdampak dalam pengentasan kemiskinan, bukti yang ditunjukkan ialah rasio pengeluaran dan pendapatan Provinsi berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Pakistan (Faridi et.al, 2013). Sehingga dalam hal, untuk menciptakan penurunan kemiskinan secara produktif diperlukan ukuran-ukuran dan pilihan kebijakan yang tepat guna memperbesar keuntungan dan memperkecil resiko yang mungkin muncul dari implementasi instrumen desentralisasi fiskal (Malik, 2008).

Tolok ukur lain yang dapat mengidentifikasi kesejahteraan masyarakat ialah tingkat pengangguran, Pengangguran menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah istilah untuk orang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Dengan kata lain dapat dikatakan pengangguran terjadi ketika seseorang memasuki angkatan kerja akan tetapi pada saat itu juga tidak sedang memiliki profesi tetap dan atau sedang mencari pekerjaan.

Produktivitas tenaga kerja dapat mendorong individu untuk memperbaiki taraf hidup baik secara ekonomi maupun sosial. Sehingga semakin tinggi tingkat pengangguran dapat dikatakan taraf hidup masyarakat yang semakin rendah, dan sebaliknya. Kajian empiris di negara Pakistan oleh Faridi et.al (2012) menyatakan pentingnya otonomi fiskal dalam penciptaan kesempatan kerja, hasil analisis menunjukkan pengaruh positif dan signifikan desentralisasi pengeluaran terhadap penciptaan lapangan kerja. Sedangkan dari sisi desentralisasi pendapatan justru berbanding terbalik, dalam arti pengaruh negatif desentralisasi



pendapatan mengakibatkan tidak tepat dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, kebijakan pelimpahan tanggung jawab pengeluaran kepada pemerintah daerah sebagai langkah solutif untuk mengurai permasalahan tingkat pengangguran yang tinggi.

### 2.3 Keterkaitan Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi

*Government is partly endogenous to the process of economic growth* (Dethier,1999), dimana teori yang menjelaskan disebut *Models of Endogenous Growth* yang mana mengasumsikan bahwa kapital adalah satu-satunya input dan constant return to scale, sehingga dalam bentuk formula dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_t = F(K_t, H_t)$$

Keterangan :  $Y_t$  = Pertumbuhan

$K_t$  = Capital Stock

$H_t$  = Human Capital

Hal yang dapat diterangkan dari formula tersebut terkait dengan penjelasan pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu *"The government can encourage (or discourage) investment in human capital through subsidies to training or the tax treatment of the return. Subsidies to research and development can encourage innovation* (Hindriks and Myles, 2004.hal.561) dan kemudian akan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa endogenous growth sebuah pilihan keterkaitan pertumbuhan yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan.

Sehingga aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah dalam mengelola administrasinya di dalam pengelolaan ekonomi (Kuncoro,2012). Dengan kata lain tinggi rendahnya aktivitas ekonomi yang timbul



merupakan hasil dari kebijakan administrasi yang dibuat oleh pemerintah. Dengan kata lain kinerja ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh independensi variabel ekonomi semata akan tetapi ada variabel politik dan lingkungan kelembagaan yang menciptakan aktivitas ekonomi muncul. Hal demikian lah yang menyebabkan keberadaan tata kelola pemerintahan (membuat dan melaksanakan kebijakan publik) sebagai aktor ekonomi di suatu masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kualitas pemerintahan berperan penting terhadap kinerja ekonomi (Kong,2011). Pendapat Dethier (1999) menyimpulkan beberapa pemikiran di atas bahwa kesejahteraan dan redistribusi merupakan *outcome* ekonomi yang dimunculkan oleh kombinasi variabel ekonomi yaitu efisiensi serta peran kekuasaan, ideologi dan kepercayaan dari variabel politik dan sosiologi.

Mengingat kinerja ekonomi merupakan wujud dari proses kolaborasi multidemensi variabel dan elemen yang bertindak didalamnya, maka secara umum ukuran kinerja ekonomi yang sering kali menjadi fokus pembahasan ialah pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana didukung oleh pernyataan oleh Badjun (2005) menyebutkan bahwa akumulasi faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh prosedur-prosedur yang mengacu pada pemberdayaan kekuatan penanganan atau intervensi di lingkungan kelembagaan. Sedangkan kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh penciptaan pola kelembagaan berkualitas yang tidak terlepas dari unsur-unsur politik, ekonomi dan sosial budaya dalam proses rancangan kebijakan publik pemerintah (Sumarto,dkk.,2004).

Dalam penelitian Kong (2011) juga menunjukkan bahwa endogenitas kualitas pemerintahan dan tahap pembangunan berdampak signifikan pada hubungan tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Kendatipun

demikian pengaruh kualitas pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari sudut kontribusi pengeluarannya terhadap output ekonomi yang dinamakan GDP (PDRB) melainkan ada variabel fundamental yang lebih penting dalam mempengaruhi output. Seperti halnya meningkatkan atau memperbaiki sumber daya manusia, kreasi penciptaan kelembagaan baru dan efisiensi input yang digunakannya (Dethier,1999).

Menitik beratkan pertumbuhan ekonomi pada kontribusi investasi dan inovasi maka tidak lepas dari peran aktivitas pengusaha untuk menghadirkan modal serta pembaharuan teknologi. Keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi kebijakan yang lebih efektif dan stabil serta kerangka kelembagaan market-enhancing akan mendorong terciptanya tingginya investasi dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. *“Governance matters mainly in an indirect way by identifying a causal relationship from good governance to more effective policy reforms and a more stable and market-enhancing institutional framework, which, in turn, lead to higher investment and economic growth”* (Ahrens & Meurers, 2002).

Pernyataan senada juga ditambahkan oleh Kong (2011) bahwa kualitas pemerintahan merupakan fundamental bagi upaya percepatan kinerja ekonomi. Bergeraknya kemampuan tata kelola yang bagus melalui keputusan kebijakan publik seperti perlindungan hak milik, penegakan hukum yang berlaku dan stabilitas ekonomi dapat menstimulus peningkatan kegiatan investasi yang pada akhirnya dapat menaikkan tingkat pertumbuhan. Pentingnya menarik investor agar optimis memulai aktivitas investasi yang dijalankannya juga diperkokoh oleh teori pertumbuhan yang dicetuskan oleh Schumpeter bahwa keberadaan investor untuk menciptakan inovatif dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Investasi-investasi penting dan menguntungkan sedemikian mampu menumbuhkan



lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pendapat lain mengenai keterkaitan aspek tata kelola yang baik terhadap pertumbuhan ialah pentingnya transparansi dan manajemen keuangan yang baik dimana untuk mencapai langkah stabilitas yang berkelanjutan dan pertumbuhan yang lebih berkualitas di wilayah, perlu diawali dari pengupayaan manajemen keuangan yang baik dan peningkatan transparansi keuangan karena dimungkinkan dapat mendorong peningkatan prospek untuk partisipatif kinerja fiskal dan lingkungan investasi yang lebih menguntungkan (Parry,2007).

Aidt,et.all (2007) berpendapat bahwa *"In the regime with high quality political institutions, corruption has a substantial negative impact on growth. In the regime with low quality institutions, corruption has no impact on growth"*. Sebagai bentuk cacat dari tata kelola pemerintahan "korupsi" memiliki dampak yang menandakan negatif pada pertumbuhan ekonomi ketika suatu kelembagaan pada level tinggi. Dengan kata lain, kelembagaan yang tinggi dapat mengontrol intensitas tindakan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, Sebaliknya pada rendahnya kualitas kelembagaan, tinggi rendahnya tindakan korupsi tidak berimplikasi apapun terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ada postulat yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial, selain memperhatikan proses perpajakan, redistribusi dan peraturan juga perlu adanya reformasi yang mengarah pada desain proses dan skema pada komitmen kredibilitas (Dethier,1999) dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimum. Selain daripada itu, memandang bahwa Sumarto,et.al (2004) menyatakan hasil penelitiannya bahwa daerah-daerah yang mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang lebih



bagus relatif mengalami penurunan kemiskinan yang lebih cepat dibandingkan daerah yang buruk akan tata kelolanya.

#### 2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi. Beberapa pendapat secara umum menyatakan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kualitas pemerintahan seperti Altunbas & Thornton(2012), Ivanyina & Shah (2010), Sjahrir & Kis-Katos(2011), dan Mello & Barenstein(2001) dan begitu juga positif terhadap kinerja ekonomi seperti Yulindra (2012), Jin & Zou(2005), Adi (2005), dan Lin & Liu (2000). Namun, ada juga yang menyatakan bahwa ada pengaruh negatif desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan seperti Bartolini & Santolini (2013) begitu juga negatif terhadap kinerja ekonomi seperti (Rodriguez-Pose, Andres & Ezcurra, Roberto(2010), Rodriguez & Kroijer (2009), dan Zhang & Zou (1996). bahkan tidak ada pengaruh atau hubungan yang dibentuk desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi seperti yang ditemukan oleh Baskaran & Feld (2009). Begitu juga dengan pengaruh yang dibentuk oleh kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi, beberapa menyatakan positif seperti Kong (2011), Badjun (2005) dan negatif seperti Aidth,et.all (2007). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1 mengenai daftar penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 2.2 : Daftar Penelitian Terdahulu Mengenai Desentralisasi Fiskal, Kualitas Pemerintahan dan Kinerja Ekonomi

No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
1	Fiscal Autonomy and Quality of Governance in OECD Countries	David Bartolini & Raffaella Santolini, 2013	Menganalisis pengaruh tingkat kemandirian fiskal pemerintah sub-central terhadap kualitas tata kelola pemerintahan	Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Pengestimasi dengan 3 langkah: 1) OLS estimator (sebagian); 2) FEVD estimator (sebagian) 3) OLS estimator (seluruhnya) Variabel yang digunakan 1) variabel dependen : <i>quality of governance</i> (QI); 2) variabel independen : RAIs <i>indicator</i> (kemandirian pajak, keleluasaan kebijakan dan kedalaman institusi); 3) variabel kontrol : GDP perkapita (LnGDPpc), ukuran populasi (LnPop), persentase populasi yang tinggal di perkotaan (LnUrban), pemilihan negara/provinsi ( <i>Elected state/prov</i> ), umur partai ( <i>PartyAge</i> ), frasionalisasi partai pemerintah (GovFrac).	Hasil pengaruh dari variabel independen dan kontrol terhadap QI : 1. variabel independen : RAIs indicators (kemandirian pajak (negatif; signifikan; tidak kuat), keleluasaan kebijakan (negatif; signifikan; kuat) dan kedalaman institusi (negatif; signifikan hanya pada estimasi IV-FEVD); 2. variabel kontrol : GDP perkapita (LnGDPpc: positif; signifikan), ukuran populasi (LnPop: positif; signifikan pada IV-FEVD; tidak kuat),	Penelitian ini menggunakan ukuran kualitatif untuk kemandirian fiskal ( <i>fiscal autonomy</i> ) sehingga para penulisnya menyatakan hasil penelitiannya kontras dengan hasil empiris yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan ukuran kuantitatif.

No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
					persentase populasi yang tinggal di perkotaan (LnUrban:signifikan pada pooled dan FE estimator;tidak kuat), pemilihan negara/provinsi (Elected state/prov:positif;signifikan), umur partai (PartyAge:positif;signifikan pada OLS-pooled estimation;tidak kuat), frasionalisasi partai pemerintah (GovFrac:positif;signifikan with the exception of the within results;tidak kuat).	
2	Fiscal Decentralization and Governance	Yener Altunbas & John Thorton, 2012	Menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dengan aspek korupsi pemerintahan	Penelitian ini menggunakan 2 metode : 1. Regesi Cross-Section (OLS Estimation) 2. Estimasi Panel (IV Estimation) Variabel : 1. Dependen : Korupsi 2. Independen : a) Desentralisasi fiskal (data	Koefisien semua indikator desentralisasi fiskal negatif dan signifikan. koefisien pada log populasi menunjukkan positif dan signifikan, log real GDP per capita negatif dan signifikan	Dalam penelitian ini pertama, indikator desentralisasi tidak hanya pendapatan dan pengeluaran tetapi juga memasukkan pengaturan administrasi. Kedua, sebagai



No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
				<p>set: Pendapatan pemerintah subnasional (<i>state and local</i>); upaya pajak (<i>tax effort</i>); pengeluaran; kompensasi pekerja (<i>the wage bill</i>), b) <i>Administrative Decentralization</i> (3 variabel dummy pengaturan institusi; c) <i>Political Representation</i> (<i>index of press freedom</i>, variabel dummy yang mengindikasikan variabel dummy untuk menunjukkan apakah negara telah mempertahankan lembaga-lembaga demokratis selama terus menerus sejak tahun 1950, variabel dummy untuk menunjukkan bahwa suatu negara adalah <i>presidential democracy</i>, d) <i>Base Control</i> (GDP per capita; populasi; variabel dummy yang menunjukkan apakah negara adalah pengekspor utama bahan bakar; level negara pada</p>	<p>pada seluruh regresi. Pengekspor bahan bakar signifikan hanya pada regresi IV, rasio fraksionalisasi etnis tidak signifikan.</p> <p>➤ Desentralisasi mengurangi korupsi bahkan pada negara yang memiliki perwakilan politik (<i>political representatation</i>) yang berlevel tinggi.</p>	<p>penyeimbang literatur pada faktor penentu korupsi sebagaimana akuntabilitas politik sebagai penjelasnya.</p>

No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
				fraksionalisasi etnis)		
3	Fiscal Decentralization, Revenue and Expenditure Assignments, and Growth in China	Jing Jin & Heng-fu Zou, 2005	Meneliti hubungan antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi pada dua fase desentralisasi fiskal di China (1979-1993 & 1994-1999)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metode : 1) Analisis Regresi , 2) semua koefisien diestimasi menggunakan <i>Fixed-Effect</i> untuk mengoreksi autokorelasi dan heterokedastisitas panel.</li> <li>• Variabel : (1979-1993) Desentralisasi Fiskal : <i>revenue&amp;expenditure assignment</i>, tingkat pajak pusat; (1994-1999) <i>intergovernmental transfer</i>, tingkat pajak &amp; tingkat pajak pusat.</li> <li>• Variabel Kontrol : penjumlahan investasi kotor, tingkat pertumbuhan ekonomi tenaga kerja dan net-ekspor dan lag tingkat inflasi di propinsi.</li> </ul>	(1979-1993) : pengeluaran memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan pendapatan berhubungan positif dan untuk tingkat pajak pusat positif dan signifikan. seluruh variabel kontrol signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Propinsi (1994-1999) : pengeluaran tidak signifikan, pendapatan positif dan signifikan. untuk variabel kontrol semuanya sesuai estimasi positif dan signifikan kecuali lag tingkat inflasi yang berhubungan negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Penelitian ini menggunakan dua fase desentralisasi fiskal dan hasil kajian tentang hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi berbeda satu sama lain.
4	Fiscal	Andreas	Menganalisis hubungan	• Metode yang digunakan	• Pengeluaran	Penelitian ini dirasa

No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
	Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe	Rodrigues-Pose & Anne Kroijer, 2009	antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi di eropa tengah dan timur.	regresi berganda (fixed effect regression) • Variabel : 1. Dependenden : GDP <i>per capita growth rate</i> 2. Independen : 1. Control variabel (pertumbuhan populasi, initial level of GDP per capita, rasio investasi terhadap GDP, a <i>growth deflator</i> , number of computer per 1000 inhabitant, akumulasi modal manusia by illiteracy); 2. Fiscal decentralization (pengeluaran subnational, pendapatan pajak, transfer dari pemerintah pusat, pendapatan subnasional, ketidakseimbangan vertikal)	subnasional dan pajak subnasional berkorelasi negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan transfer negatif dan tidak signifikan. • Semua variabel kontrol signifikan kecuali IT (number of computer per 1000 inhabitant)	menarik dengan mengambil kasus eropa pusat dan timur karena kawasan ini telah merubah sistem pemerintahannya untuk menjadi lebih terdesentralisasi setelah paham komunisme runtuh.
5	Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is there a Relationship?	Thushyanthan Baskaran & Lars P.Feld, 2009	Mengkaji hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi untuk 23 negara OECD selama 1975-2001	• Metode : Regresi ( <i>Pooled OLS, random effect and fixed effect</i> ) , adapun langkah-langkahnya : 1. <i>yearly panel data</i> ; 2. <i>controlling for short-term variability</i> ; 3. <i>Explaining the fixed effects by decentralization and fiscal federalism</i>	Desentralisasi pendapatan negatif dan signifikan pada pooled OLS dan REM dan menjadi tidak signifikan ketika kedua desentralisasi digabungkan. Bagi hasil signifikan dan positif pada ketiga	Penelitian ini menggunakan pengukuran 2 desentralisasi pendapatan yang memiliki proxy yang berbeda sehingga hal ini cukup membedakan penelitian ini dengan



No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dependen : pertumbuhan ekonomi</li> <li>2. Independen : <i>revenue decentralization</i> 1 (penjumlahan seluruh pendapatan pajak pemerintah <i>sub-federal</i> , <i>revenue decentralization</i> 2 (penjumlahan semua pendapatan pajak dari pajak bagi hasil untuk yang mana pemerintah sub-federal mungkin menentukan pendistribusian pendapatan atau rincian alokasi lain dari sistem perpajakan gabungan dan kemudian membagi jumlah dengan pendapatan pajak total pemerintah, produktivitas tenaga kerja, bagi hasil investasi, Pajak/GDP, pendidikan, pertumbuhan penduduk, lag GDP per pekerja, keterbukaan, inflasi, dan federasi.</li> </ol> </li> </ul>	metode tersebut, albeit tidak signifikan pada random dan fixed effect model. Pendidikan positif tapi tidak signifikan, pertumbuhan penduduk sama sekali tidak signifikan dan negatif pada pooled OLS dan random effect. Lag GDP per pekerja negatif dan signifikan pada random dan fixed effect model. Bagi hasil pajak negatif dan hanya signifikan pada <i>fixed effect model</i> .	lainnya.
6	Fiscal and Political Decentralization	Andreas P.Kyriacou & Oriol Roca-	Menganalisis hubungan antara desentralisasi fiskal dan politik dengan	Variabel yang digunakan antara lain : 1) Kualitas pemerintah; 2) Desentralisasi	Desentralisasi fiskal mempengaruhi kualitas pemerintah	Minimnya kajian penelitian sebelumnya yang

No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
	and Government Quality	Sagales, 2010	kualitas pemerintah	Fiskal; 3) <i>Electoral Decentralitation</i> ; 4) <i>Decision-making Decentralization</i> ; 5) <i>Check and balance</i> ; 6) <i>Unitarism</i> , 7) <i>Democratic Maturity</i> ; 8) <i>State antiquity</i> ; 9) GDP perkapita; 10) <i>Size of Government</i> ; 11) Penduduk; 12) Keterbukaan; 13) <i>Fractionalization</i> ; 14) Legal Origin; 15) Afiliasiasi Kepercayaan; 16) <i>Party Age</i> ; 17) <i>Government Farctionalization</i> ; 18) Suara dan Tanggung Jawab; 19) <i>Number of Tiers</i>	secara positif. Akan tetapi arah hubungan ini menjadi negatif ketika dikombinasikan dengan desentralisasi politik. Keadaan hubungan tersebut tetap berpengaruh negatif ketika yang mengontrol adalah <i>degree of democratic maturity</i> akan tetapi menghilang ketika yang mengontrol adalah " <i>the extent of experience with statehood or public administration</i> "	mengkombinasikan antara desentralisasi fiskal dengan politik untuk menunjukkan hubungannya terhadap kualitas pemerintah. Penelitian ini juga menggunakan data set baru untuk menganalisis hubungan anantara desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintah. Serta menggunakan estimasi data ganda yakni cross-section dan fixed effect panel.
7	The Quality of Governance and Economic Growth In Croatia	Marijana Badjun, 2005	Menunjukkan pembedaan dan pentingnya penyertaan secara eksplisit kualitas tata kelola dalam perdebatan tentang pertumbuhan ekonomi di Kroasia.	1. Metode : GLS ( <i>weighted least squares method</i> ), analisis kuantitatif dilakukan terpisah ke dalam dua grup. 2. Variabel : 1. Dependen : <i>Per capita GDP in 1999 international dollars 1990 (dlog(BDP))</i> 2. Independen : <i>Rule of law, Spread of</i>	1. Real GDP dan <i>rule of law</i> . sampel EU-14 +11 transition countries menunjukkan positif dan signifikan; sampel EU-14 countries menunjukkan positif dan signifikan, sampel 11 transition	Untuk kualitas tata pemerintahan difokuskan pada dua faktor yaitu <i>rule of law</i> (ketegasan hukum) dan <i>quality of public administration</i> (kualitas administrasi publik) .

No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
				corruption, starting a company, corruption Perception Index (CPI)	countries menunjukkan positif dan signifikan. 2. <i>Real per Capita</i> GDP dan <i>extent of corruption</i> : sampel gabungan negara hasilnya positif dan signifikan, EU-14 countries hasil positif tapi tidak signifikan dan sampel 11 negara hasil positif dan signifikan.	
8	Fiscal Decentralization and The Quality of Government : Evidence From Panel Data	Andreas P. Kyriacou & Orio Roca-Sagales, 2009	Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintah ( <i>Quality of Government</i> )	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi panel via <i>two-stage least square</i> untuk menyelesaikan masalah endogenitas dalam regresi panel antara <i>government Quality</i> dengan Decentralization Fiscal. Variabel yang digunakan antara lain : 1) <i>Government Quality</i> ; 2) <i>Fiscal Decentralization</i> ; 3) <i>Income</i> ; 4) <i>Government Size</i> ; 5) <i>Population</i> ; 6) <i>Democracy</i> ; 7) <i>Checks and Balances</i> ; 8)	Berdasarkan sampel yang digunakan yakni pada 29 negara miskin, menengah dan kaya. Hasil menunjukkan desentralisasi fiskal mempengaruhi kualitas pemerintah secara positif di negara miskin dan menengah, dampak negatif justru terjadi pada negara kaya. tetapi hubungan positif di negara	Memperluas definisi kualitas pemerintah dengan memasukkan faktor korupsi dan kualitas birokrasi untuk mengukurnya. Serta menyandingkannya dengan sampel negara klasifikasi negara miskin & menengah dan maju guna menghasilkan temuan yang menarik.



No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
				<i>Election; 9) Autonomy; 10) Legislative Fractionalization; 11) Party Age</i>	msikin ini dirubah menjadi negatif oleh variabel desentralisasi politik ( <i>election and autonomy</i> ) dan sebaliknya variabel ini justru meningkat (positif) pada negara kaya.	
9	The Impact of Governance on Economic Growth: Further Evidence for Africa	Bichaka Fayissa & Christina Nsiah, 2010	Pertama, menyelidiki efek dari indeks variasi tata pemerintahan ekonomi negara-negara Afrika Sub-Sahara sambil mempertimbangkan sumber-sumber konvensional pertumbuhan. Kedua, menyelidiki apakah dampak indikator-indikator tata pemerintahan yang berbeda oleh distribusi bersyarat pertumbuhan ekonomi. Terakhir menginvestigasi apakah dampak tata pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkat	1. Metode : <i>Random Effect Estimation, Fixed Effect Estimation</i> 2. Variabel : <i>GDP per Capita, School enrollment, secondary + tertiary, crde oil include Lease Condensate Production, Aid, Foreign direct investment, Gross Fixed capital formation. Household final consumption expinditure per capita, trade as a percent of GDP, Age depency ratio, telephone mainlines, Voice and akuntabilitas index, government effectiveness index, regulatory quality index, rule of law index, control of corruption index,</i>	Hasil menunjukkan bahwa tata pemerintahan yang baik atau kurang aktif berkontribusi terhadap kesenjangan pendapatan per kapita antara warga kaya dan miskin di Afrika. Selain itu hasil mengindikasikan bahwa peran tata pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi tergantung pada jenis dan level pertumbuhan pendapatan dibawah pertimbangan	Kajian ini mengintegrasikan situasi pemerintahan negara Afrika sub-sahara yang berbeda satu sama lain.

No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
			relatif pertumbuhan	$(vap+psp+gep+rqp+rlp+ccp/6)$	negara-negara.	
10	Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Priyo Hari Adi, 2005	Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi	Metode : Uji T dan analisis varian (ANOVA) Variabel : PDRB , Pendapatan perkapita pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Jawa Bali	Desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi	
11	Tata Kelola Pemerintahan dan Penanggulangan Kemiskinan : Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia	Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi dan Alex Arifianto, 2004	Mengetahui dampak praktek-praktek buruk tata kelola pemerintahan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di Indoensia	Metode : Regresi Variabel : Laju penurunan jumlah penduduk miskin, budaya birokrasi, biaya perijinan usaha, PDRB, PAD per kapita, belanja rutin per kapita, belanja pembangunan perkapita	Budaya birokrasi dan biaya perijinan yang lebih baik berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan	
12	Does Better Local Governance Improve District Growth Performance in Indonesia	Neil McCulloch & Edmund Malesky, 2011	Mengetahui pengaruh tata kelola pemerintahan terhadap kinerja ekonomi di Indonesia	Metode : korelasi dan regresi Variabel : Data set tata kelola ekonomi daerah (KPPOD), pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan per kapita, jumlah penduduk, proporsi populasi dengan tingkat pendidikan SLTP, kontribusi pertambahan terhadap PDB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubungan tata kelola pemerintahan dengan kinerja ekonomi relatif kecil</li> <li>• proporsi populasi dengan tingkat pendidikan SLTP, kontribusi pertambahan terhadap PDB berpengaruh secara langsung terhadap tata kelola pemerintahan maupun kinerja</li> </ul>	

No.	Judul	Pengarang & Tahun	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian & Variabel	Hasil Penelitian	Posisi Peneliti
13	The Effect of Fiscal Decentralization on Local Economic Growth in Sumatera Barat Province	Sonni Yulindra, 2012	Menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Sumatera Barat	Metode : Regresi Variabel : GDRP, FD 1,2,3, Initial GRDP, jumlah penduduk, jumlah pekerja, rata-rata pendidikan	ekonomi Hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara signifikan	

Sumber : Peneliti, 2013



## 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

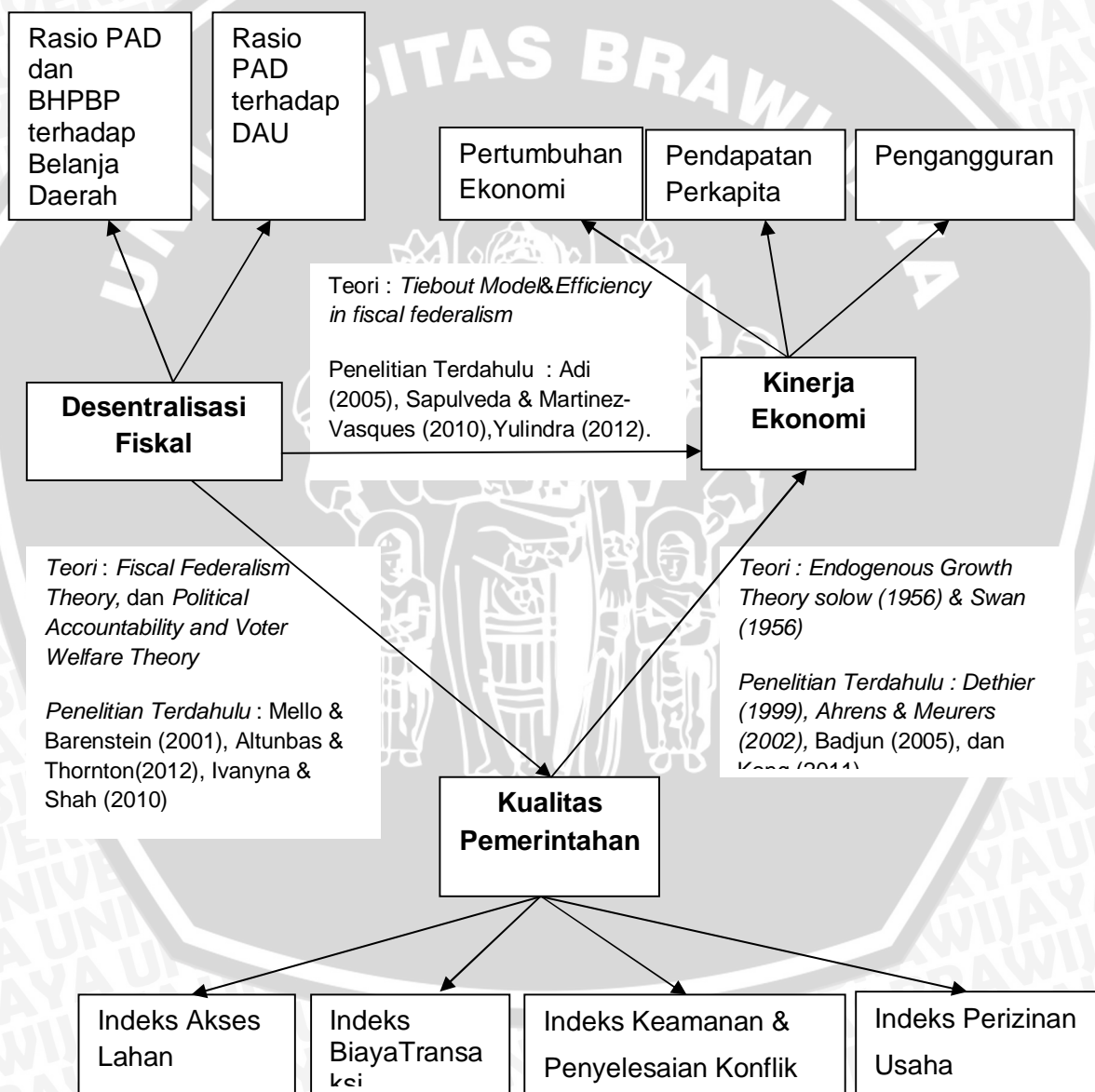
Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan adanya pelimpahan sumber daya fiskal ke daerah tidak lain adalah agar daerah mampu memenuhi pelayanan publik sebaik mungkin. Namun di sisi lain tujuan yang dikehendaki ialah agar dengan adanya transfer sumber daya fiskal tersebut dapat dijadikan modal untuk menggali potensi pendapatan untuk menambah kekuatan fiskal dalam memenuhi tugas dan perannya sebagai penyedia barang dan jasa publik sehingga daerah menjadi mandiri sesuai dengan makna dari otonomi daerah sendiri.

Sesuai dengan anggapan pada umumnya bahwa desentralisasi mampu meningkatkan kinerja ekonomi yakni menjadi lebih baik. Alasan bahwa pemerintah daerah lebih dekat dengan informasi mengenai kebutuhan, sumber daya, potensi masyarakat dan daerah yang dipimpinnya sehingga menjadi lebih peka dalam pelayanan publik baik dalam hal pengentasan permasalahan daerah ataupun penciptaan ketepatan anggaran publik. Dengan demikian akan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang pada akhirnya mampu meningkatkan income atau yang sering dikenal "Pendapatan Domestik Regional Bruto". Namun, hal demikian dapat tercapai jika pemerintah adalah sekumpulan orang yang memiliki sumber daya manusia yang tinggi, kapasitas pemerintah yang baik dan sesuai amanah serta terintegrasi dengan tanggung jawab yang dijalankannya dengan kata lain tata kelola pemerintahan yang baik akan berkontribusi terhadap pencapaian kinerja ekonomi yang tinggi.

Secara teoritis implementasi desentralisasi fiskal di daerah memiliki hubungan terhadap kinerja ekonomi secara langsung maupun tidak langsung melalui kualitas pemerintahan, dimana kinerja ekonomi dapat diukur dari

income yang direfleksikan pada PDRB, pendapatan perkapita dan pengangguran. Sebagaimana hasil analisis terhadap efek hubungan langsung antara desentralisasi fiskal dengan kinerja ekonomi daerah dan kualitas pemerintahan dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Peneliti, 2013

## 2.6 Hipotesis

Teori desentralisasi fiskal melalui pendekatan Neo Klasik dengan asumsi bahwa masyarakat lokal memiliki preferensi yang homogen sehingga pengambilan keputusan atau tata kelola pemerintahan di tingkat pemerintahan terendah terkait pelayanan publik akan bekerja optimal dibanding terpusat. Oleh sebab itu argumen dasar desentralisasi adalah mekanisme efektif bagi akuntabilitas pemerintah ialah kompetisi antar daerah dapat melatih kedisiplinan dan menghentikan kekuatan monopoli pemerintahan yang memusat (Hindriks & Myles, 2004:462). Sebagaimana juga dipaparkan dalam *Political Accountability and Voter Welfare Theory* dengan asumsi voter mampu mengetahui dan mengontrol *incumbent*, bahwa pengadopsian kebijakan yang lebih baik oleh pemerintahan daerah satu akan mengakibatkan kebijakan daerah lain relatif lebih buruk sehingga hal ini mendorong para politisi untuk memperbaiki akuntabilitasnya. Penelitian Mello & Barenstein (2001) menyatakan hasil bahwa desentralisasi dan tata kelola pemerintahan memiliki hubungan positif, yakni ketika total pendapatan daerah (pendapatan bukan pajak, dana grant dan transfer) yang lebih tinggi dari pada pemerintah pusat "*higher levels of government*".

Kemudian dari pada itu, penyelenggaraan desentralisasi fiskal akan mampu mempengaruhi kinerja ekonomi, sebagaimana teori yang mendukung dapat diadopsi dari *The Tiebout Model* dengan asumsi *citizen mobility* yang sebagaimana dibangun oleh Charles M. Tiebout (Hyman, 1983) menjelaskan bahwa :

*"The level and mix of local expenditures and taxes are likely to exhibit wide variations among local political. Therefore, many citizens will choose to live in communities where the government budget best satisfies their own preferences for public service, provided they are not restricted in their mobility"*



*among communities. Thus, government expenditure and revenue patterns tend to be set on the local level and the mobile citizen maximizes personal well being by choosing to live in some particular political jurisdiction”.*

Keberadaan desentralisasi yang menciptakan *political jurisdiction* pada masing-masing tingkatan pemerintahan mendorong manusia untuk memilih daerah yang mampu memproduksi tingkat kesejahteraan yang tinggi melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik sehingga hal ini lah yang kemudian mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah cenderung untuk menggerakkan perbaikan layanan publik.

Sebagaimana penelitian Adi (2005) di Kabupaten dan Kota se Jawa bali selama periode sebelum dan sesudah otonomi daerah, hasil yang diperoleh ialah pertumbuhan ekonomi signifikan lebih baik selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dibandingkan sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal. Melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran kinerja ekonomi maka hasil Sapulveda & Martinez-Vasques (2010) menunjukkan hasil kajiannya bahwa desentralisasi fiskal berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan dengan jaminan *general government* (pemerintah pusat, pemerintah bagian, dan pemerintah daerah) mampu berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi (paling tidak 12 % atau lebih) atau pengeluaran sub-nasional lebih kecil dari ketiga pemerintahan tersebut.

Selain itu, Badjun (2005) menyebutkan bahwa akumulasi faktor pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh prosedur-prosedur yang mengacu pada pemberdayaan kekuatan penanganan atau intervensi di lingkungan kelembagaan. Dengan kata lain kinerja ekonomi merupakan hasil intervensi dari pemerintahan, adapun teori pendukung yang dpaat diadopsi dari *Models of Endogenous Growth* yang mana mengasumsikan bahwa kapital adalah satu-satunya input dan constant return to scale.

Hal yang dapat diterangkan dari formula tersebut terkait dengan penjelasan pengaruh kualitas pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu *"The government can encourage (or discourage) investment in human capital through subsidies to training or the tax treatment of the return. Subsidies to research and development can encourage innovation* (Hindriks and Myles, 2004.hal.561) dan kemudian akan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa endogenous growth sebuah pilihan keterkaitan pertumbuhan yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan.

Pernyataan senada juga ditambahkan oleh Kong (2011) bahwa kualitas pemerintahan merupakan suatu fundamnetal yang berdampak pada percepatan kinerja. Bergeraknya kemampuan tata kelola yang bagus melalui keputusan kebijakan publik seperti perlindungan hak milik, penegakan hukum yang berlaku dan stabilitas ekonomi dapat menstimulus peningkatan kegiatan investasi yang pada akhirnya dapat menaikkan tingkat pertumbuhan.

Berdasarkan pada ulasan kajian teori dan hasil penelitian di atas maka hipotesis yang dapat dibangun dari penelitian ini adalah :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi melalui kualitas pemerintahan di Indonesia atau terdapat

pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi tidak secara langsung melalui kualitas pemerintahan di Indonesia





### BAB III

## METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada pemaparan rumusan masalah beserta tujuan yang dikehendaki oleh peneliti dalam hasil analisis ini yakni melihat nilai keterkaitan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka pendekatan tepat yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell (1994) mendefinisikan metode kuantitatif sebagai penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat di mana peneliti menyusun subyek secara acak ke dalam kelompok.

### 3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pengaruh masing-masing ukuran desentralisasi fiskal di antaranya yakni proporsi pendapatan “asli” daerah menutupi belanja daerah dan rasio PAD terhadap DAU. Selain dari pada itu, objek dari penelitian ini adalah kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi. Kualitas pemerintahan yang di maksud di sini yakni diukur dari 4 indikator yakni indeks akses lahan, indeks biaya transaksi, indeks keamanan dan penyelesaian konflik, dan indeks perizinan usaha. Sedangkan untuk kinerja ekonomi menggunakan 3 ukuran yaitu antara lain ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, pengangguran.

#### 3.2.1 Populasi

Populasi merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi unit analisis dalam penelitian. Pada penelitian ini menggunakan populasi mencakup seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

### 3.3 Jenis Data

Jenis data yang dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber melalui media cetak atau elektronik lainnya dalam bentuk publikasi dan dokumentasi.

### 3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

#### 3.4.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yakni variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang variabilitasnya diasumsikan ditentukan oleh faktor-faktor yang berada di luar model, yang mana pada penelitian ini tergambar pada variabel desentralisasi fiskal sedangkan variabel endogen dapat diartikan sebagai variabel yang variabilitasnya dijelaskan oleh variabel eksogen ataupun endogen yang berada dalam suatu model yang dibangun, dalam penelitian ini variabel endogen digunakan pada variabel kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi. Untuk variabel eksogen yakni :

1. Desentralisasi Fiskal (DF), di mana yang terdiri dari 2 indikator yang digunakan yaitu :
  - a.  $X_1$ , Rasio PAD dan BHPBP terhadap belanja daerah
  - b.  $X_2$ , Rasio PAD terhadap DAU

Sedangkan variabel endogen yang terdapat pada penelitian ini antara lain :

1. Kualitas Pemerintahan (KP), di mana yang terdiri dari 4 indikator yang digunakan yaitu :
  - a.  $Y_{1,1}$ , Indeks akses lahan
  - b.  $Y_{1,2}$ , Indeks biaya transaksi
  - c.  $Y_{1,3}$ , Indeks keamanan & penyelesaian konflik
  - d.  $Y_{1,4}$ , Indeks perizinan usaha



2. Kinerja Ekonomi (KE), terdiri dari 3 indikator yang digunakan meliputi :
  - a.  $Y_{2,1}$ , Pertumbuhan ekonomi
  - b.  $Y_{2,2}$ , Pendapatan perkapita
  - c.  $Y_{2,3}$ , Tingkat pengangguran

### 3.4.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Mengingat beragamnya komponen yang dapat menjelaskan konsep desentralisasi fiskal, tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi maka berdasarkan pada tujuan utama penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan desentralisasi fiskal, tata kelola pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi maka peneliti memfokuskan masing-masing variabel, sebagaimana yang disebutkan di bawah ini.

Tabel 3.1 : Definisi Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Definisi	Referensi	Sumber data
1	Rasio penjumlahan PAD dan BHPBP terhadap belanja daerah ( $X_1$ )	Kemandirian daerah yang ditunjukkan dengan perbandingan total PAD dan BHPBP terhadap total belanja daerah pada tahun bersangkutan	Uchimura & Suzuki (2009), Bird (2000), Khusaini (2006)	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 2011
2	Rasio PAD terhadap DAU ( $X_2$ )	Kemandirian fiskal daerah yang dilihat dari rasio PAD terhadap DAU yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali penerimaan daerah	Uchimura & Suzuki (2009), Bird (2000), Khusaini (2006)	Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan (DJPK) 2011
3	Indeks Akses Lahan ( $Y_{1,1}$ )	Indeks yang diterbitkan oleh KPPOD, merupakan penilaian terhadap kualitas akses lahan di Kabupaten dan Kota meliputi kepengurusan sertifikat tanah, perolehan tanah, frekuensi pengurusan tanah, frekuensi kasus konflik kerjasama atas penggunaan tanah dan dampak lahan bagi kelangsungan usaha	McChulloch & Malesky (2011), Dethier (1999), Treisman (2000)	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2011



4	Indeks biaya transaksi ( $Y_{1.2}$ )	Indeks yang diterbitkan oleh KPPOD, merupakan penialain kualitas penetapan kebijakan biaya transaksi yang meliputi antara lain pajak, retribusi, biaya transaksi lainnya baik legal maupun ilegal.	McChulloch & Malesky (2011), Kyriacou & Roca-Sagales (2009), Treisman (2000)	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2011
5	Indeks keamanan dan penyelesaian konflik ( $Y_{1.3}$ )	Indeks yang diterbitkan oleh KPPOD, menilai kualitas pertanggungjawaban/kinerja pemerintah untuk menciptakan keamanan berusaha meliputi fungsi pencegahan, pengamanan dan penanganan gangguan ketertiban umum dan pelanggaran hukum.	McChulloch & Malesky (2011), Kyriacou & Roca-Sagales (2009), Treisman (2000)	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2011
6	Indeks perizinan usaha ( $Y_{1.5}$ )	Indeks yang diterbitkan oleh KPPOD, menilai kualitas pemerintahan yang dipandang dari persentase perusahaan yang memiliki tanda daftar perusahaan, kemudahan perolehan TDP, tingkat biaya dan persepsi terhadap TDP, kualitas pelayanan izin usaha, keberadaan mekanisme pengaduan, persentase tingkat hambatan izin usaha.	McChulloch & Malesky (2011), Kyriacou & Roca-Sagales (2009), Treisman (2000)	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) 2011
7	Laju pertumbuhan ekonomi ( $Y_{2.1}$ )	Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) termasuk migas dan non-migas (%)	Dethier (1999), Jin & Zou (2005), Adi (2005), McChulloch & Malesky (2011)	Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011
8	Pendapatan perkapita ( $Y_{2.2}$ )	Produk Domestik Regional Bruto terhadap dibagi total jumlah penduduk kab/kota dimana yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat.	Dethier (1999), Jin & Zou (2005), Adi (2005), McChulloch & Malesky (2011)	Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011
9	Pengangguran ( $Y_{2.3}$ )	Pertumbuhan angka penduduk yang berada pada kondisi dimana tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu dan sedang berusaha untuk dapat pekerjaan (%)	Hammond & Tosun (2009), Faridi et al (2012)	Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011

Sumber : Peneliti, 2013

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu upaya pengumpulan data dari menelaah publikasi Badan Pusat Statistik, Komisi Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan sesuai dengan keperluan data yang terkait dengan pembahasan dan tujuan penelitian.

### 3.6 Metode Analisis Data

Berdasarkan pada penggunaan variabel yang telah dijelaskan di atas yakni adanya penggunaan variabel laten (*unobserve*) dan adanya keterkaitan di antara variabel pada penelitian, maka alat analisis regresi biasa tidak dapat digunakan sebagai metode analisis yang tepat disebabkan masalah asumsi klasik (multikolinearitas). Sehingga setidaknya ada 3 metode analisis yang digunakan model struktural yang dapat digunakan dalam penelitian ini yakni Path, PLS dan SEM. Adapun mengenai perbandingan beberapa kriteria yang dimiliki masing-masing metode tersebut yang mana di jelaskan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2 : Perbandingan Path, PLS dan SEM

Kriteria	Path	PLS	SEM
Landasan teori	Kuat	Kuat maupun lemah, bahkan eksploratif	Kuat
Bentuk hubungan antar variabel	Linear	Linear	Linear
Model Struktural	Rekursif	Rekursif	Rekursif dan Nonrekusif
Asumsi Distribusi	Normal	Tidak diperlukan; pendekatan <i>resampling</i> dengan <i>Bootstrapping</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normal</li> <li>• Tidak diperlukan; pendekatan <i>resampling</i> dengan <i>Bootstrapping</i></li> </ul>



Model Pengukuran	Di luar permodelan		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Total Skor</li> <li>• Rata-rata skor</li> <li>• Rescoring</li> <li>• Skor Faktor</li> <li>• Skor komponen utama</li> <li>• Indikator terkuat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Refleksif</li> <li>• Formatif</li> </ul>	Refleksif
Ukuran Sampel	Sampel minimal 10 kali jumlah variabel ( <i>rule of thumb</i> dari <i>multivariate analysis</i> )	Sampel minimal 30-50 atau sampel besar di atas 200	Sampel minimal direkomendasikan 100-200
Modifikasi Model	Tidak ada modifikasi	Tidak memerlukan modifikasi indeks, korelasi antar indikator	Jika model tidak fit dapat dilakukan modifikasi, dengan penuntun berupa indeks modifikasi
Goodness of fit	Koefisien determinasi total	<i>Q-square predictive relevance</i> , yang pada dasarnya adalah sama dengan koefisien determinasi total	RMSEA, <i>Chisquare/DF</i> , dll (terdapat sebanyak 26 jenis <i>goodness of fit</i> )
Pengujian model	Teori Trimming, membuang jalur yang nonsignifikan	Teori Trimming, membuang jalur yang nonsignifikan	Teori Trimming, membuang jalur yang nonsignifikan
Output	Faktor determinan, pengujian model	Faktor determinan dan model struktural, pengujian model, uji validitas dan realibilitas	Faktor determinan dan model struktural, pengujian model, uji validitas dan realibilitas

Sumber : Peneliti,2013

### 3.6.1 Metode Partial Least Squares (PLS)

Berdasarkan pada ketiga metode alternatif yang telah tersebut di atas, dengan beberapa pertimbangan kelemahan ataupun kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing alat analisis di atas maka peneliti memutuskan untuk menggunakan metode Partial Least Squares untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Pemilihan metode Partial Least Squares didasarkan atas beberapa alasan yaitu pertama, landasan teori yang dibangun hanya didukung oleh sekumpulan pendapat dan hasil penelitian terdahulu yang mana hal tersebut



menjadikan teori yang dibangun kurang kuat sehingga PLS dapat digunakan sebagai konfirmasi teori. Kedua, asumsi distribusi normal tidak terpenuhi pada sejumlah data yang digunakan dalam penelitian.

Pemodelan struktural indikator pada PLS bersifat refleksif ataupun formatif. Indikator refleksif mengasumsikan bahwa variabel konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator (seolah-olah arah hubungan dibangun dari konstruk menuju indikator). Sehingga dengan kata lain jika ada perubahan pada salah satu indikator maka akan berdampak pada indikator yang lain dengan arah yang tidak berbeda. Ciri-ciri indikator refleksif menurut Jaya & Sumertajaya (2008) yaitu antara lain:

1. Arah hubungan sebab-akibat yang dimunculkan seakan-akan berasal dari variabel laten menuju indikator
2. Masing-masing indikator diharapkan saling berkorelasi
3. Penghilangan satu indikator dari model indikator tidak akan berpengaruh pada variabel konstruk
4. Menghitung munculnya kesalahan pengukuran (error) pada tingkat indikator

Sedangkan indikator formatif mengasumsikan bahwa indikator adalah variabel yang mempengaruhi variabel konstruk. Ini artinya perubahan pada salah satu indikator formatif tidak mesti akan diikuti oleh indikator lainnya layaknya pada indikator refleksif. Namun, cukup jelas bahwa perubahan nilai pada indikator formatif akan mempengaruhi nilai variabel konstruksya. Adapun ciri-ciri indikator formatif menurut Jaya & Sumertajaya (2008) yaitu antara lain :

1. Arah hubungan sebab-akibat seakan-akan dibangun dari indikator menuju variabel laten
2. Antar indikator diasumsikan tidak berkorelasi satu sama lain (tidak diperlukan uji konsistensi internal atau Alpha Cronbach)
3. Penghilangan satu indikator formatif akan mempengaruhi variabel konstruk
4. Kesalahan pengukuran ditempatkan pada level konstruk (Zeta)

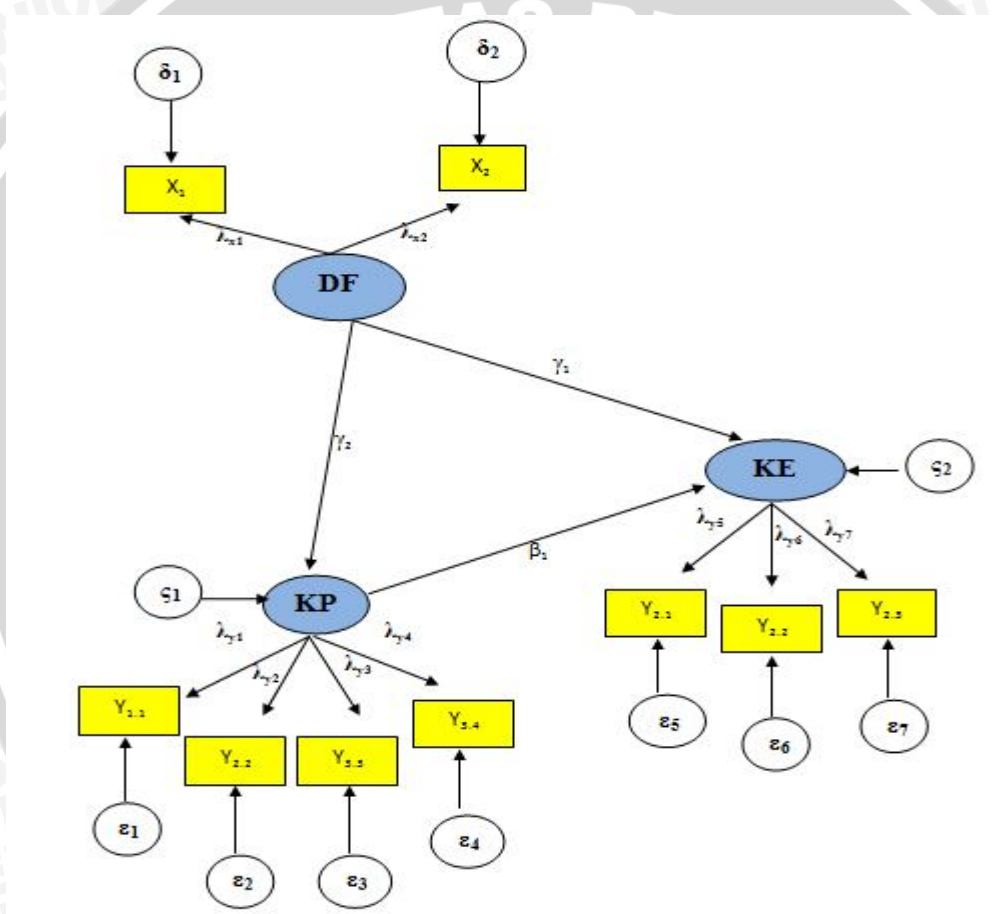
PLS dirancang untuk model rekursif sehingga dalam model hubungannya tidak membalikkan pengaruh yang telah diterima oleh variabel konstruk (endogen) terhadap variabel konstruk lainnya (eksogen). Dengan kata lain hubungan yang dibentuk antar variabel konstruk ialah searah. Sehingga model yang dapat dibentuk terbagi menjadi dua yakni hubungan eksogen terhadap endogen dan hubungan endogen terhadap endogen.

### 3.6.2 Spesifikasi Model

Spesifikasi model dalam PLS dikenal 3 model yakni *pertama*, Inner model, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (structural model) yang menjelaskan hubungan antar variabel laten yang dibentuk berdasarkan pada kerangka teori substansif yang dibentuk dalam penelitian. *Kedua*, outer model, merupakan spesifikasi hubungan antar variabel konstruk dengan indikatornya masing-masing. Pada outer model terdiri dari yakni model indikator reflektif dan formatif. *Ketiga*, Weight relations, yang mana merupakan nilai prediksi dari variabel konstruk yang dibentuk.

Sebagai langkah penting dalam metode PLS adalah mengkonstruksikan diagram jalur setelah perancangan model struktural (*inner model*) dan model pengukuran (*outer model*). Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis yang ditetapkan oleh peneliti maka gambar diagram jalur yang dapat dibangun yakni sebagai berikut.

Gambar 3.1 : Diagram Jalur Antar Variabel dalam Penelitian



Sumber : Peneliti, 2013

Keterangan :

DF = Desentralisasi Fiskal

KP = Kualitas Pemerintahan



KE = Kinerja Ekonomi

$\lambda_x$  = *Loading factor* variabel eksogen

$\lambda_y$  = *Loading factor* variabel endogen

$\Lambda_x$  = Matriks *loading factor* variabel laten eksogen

$\Lambda_y$  = Matriks *loading factor* variabel laten endogen

$\beta$  = Koefisien pengaruh variabel endogen terhadap variabel endogen

$\gamma$  = Koefisien pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

$\zeta$  = Galat model

$\delta$  = Galat pengukuran pada variabel manifest untuk variabel laten eksogen

$\varepsilon$  = Galat pengukuran pada variabel manifest untuk variabel laten endogen

Selanjutnya, bentuk konversi diagram jalur pada model PLS (gambar 8) ke dalam bentuk persamaan *outer model*, *inner model* dan *weight relations* dapat ditulis sebagai berikut

a) **Outer model** :

Untuk variabel eksogen Desentralisasi Fiskal (refleksif)

$$X_1 = \lambda_{x1}DF + \delta_1$$

$$X_2 = \lambda_{x2}DF + \delta_2$$

Untuk variabel endogen Kualitas Pemerintahan (reflektif)

$$Y_1 = \lambda_{y1.1}KP + \varepsilon_1$$

$$Y_2 = \lambda_{y1.2}KP + \varepsilon_2$$

$$Y_3 = \lambda_{y1.3}KP + \varepsilon_3$$

$$Y_4 = \lambda_{y1.4}KP + \varepsilon_4$$

Untuk variabel endogen Kinerja Ekonomi (reflektif)

$$Y_1 = \lambda_{y2.1}KE + \varepsilon_5$$

$$Y_2 = \lambda_{y2.2}KE + \varepsilon_6$$

$$Y_3 = \lambda_{y2.3}KE + \varepsilon_7$$

b) **Inner Model :**

Untuk hubungan desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintahan

$$KP = \gamma_2DF + \zeta_1$$

Untuk hubungan desentralisasi fiskal dan kualitas pemerintahan terhadap

$$KE = \gamma_1DF + \beta_1KP + \zeta_2$$

c) **Weight relation :**

Nilai pada masing-masing variabel konstruk yang diprediksi dalam PLSialah

Untuk sebagai berikut :

$$\zeta = \sum_{kb} W_{kb} X_{kb}$$

$$\eta = \sum_{ki} W_{ki} Y_{ki}$$

Keterangan :

$W_{kb}$  dan  $W_{ki}$  adalah k *weight* yang digunakan untuk membentuk estimasi variabel laten ( $\zeta_b$ ) dan endogen ( $\eta_i$ ).

### 3.6.3 Goodness of Fit

#### a) Outer Model

*Loading factor*, di mana menunjukkan korelasi antara skor indikator reflektif dengan skor variabel latennya. Pengambilan jumlah indikator laten yang relatif sedikit, nilai loading 0,5 – 0,6 di rasa cukup untuk memenuhi persyaratan korelasi terhadap variabel konstruknya.

*Composite reliability*, menunjukkan nilai pengukuran dari kelompok indikator yang mengukur variabel konstruknya, akan baik jika nilanya lebih besar dari 0,7 (Jaya & Sumertajaya, 2008).

*Average variance extracted, square root of average variance extracted* (AVE) adalah metode untuk menilai *discriminan validity*. Nilai AVE diharuskan di atas 0,50.

*Discriminant validity*, membandingkan nilai *squares root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk lainnya. Discriminant validity yang baik jika nilai AVE konstruk lebih tinggi dari pada korelasi dengan seluruh konstruk lainnya. Setidaknya nilai AVE harus mencapai 0,50 sebagai standar kelolosan uji *discriminnat validity*.

*Cross Loading*, merupakan ukuran lain dari validitas diskriminan. Diharapkan tiap indikator memiliki *loading* yang lebih tinggi untuk tiap variabel laten yang diukur dibandingkan dengan indikator untuk menilai variabel laten lainnya.

#### b) Inner Model

Berbeda dengan penentuan *Goodness of Fit* pada *outter model*, terdapat tiga macam kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu :



*R-squares*, untuk variabel laten endogen. Hasil  $R^2$  sebesar 0.67, 0.33 dan 0.19 untuk variabel laten endogen dalam model struktural masing-masing menyatakan bahwa model tersebut adalah *baik, moderat* dan *lemah*.

*Estimasi Koefisien Jalur*, nilai estimasi untuk hubungan jalur harus signifikan. Nilai signifikansi dalam model struktural diperoleh dengan prosedur *bootstrapping*. Melalui prosedur ini, akan didapatkan nilai t-statistik dan signifikansi dari koefisien parameter yang sesuai dengan jumlah sampel yang dianalisis.

$F^2$  untuk *effect size*, terdapat 3 kriteria penilaian dalam  $f^2$ , yaitu bernilai 0.02, 0.15, 0.35. Untuk variabel laten masing-masing diinterpretasikan memiliki pengaruh yang lemah, medium, atau besar pada tingkat struktural. Relevansi prediksi ( $Q^2$  dan  $q^2$ ), nilai  $Q^2$  digunakan untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan estimasi parameternya. Sementara nilai  $q^2$  digunakan untuk menilai dampak relatif model struktural terhadap pengukuran variabel dependen laten. Pada inner model yang digunakan ialah *Q-Squares* yang menunjukkan kemampuan estimasi parameternya dalam menjelaskan model. Model dapat dikatakan *predictive relevance* jika nilai *Q-squares*  $> 0$  dan begitu pula sebaliknya.

#### 3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ( $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\lambda$ ) pada metode PLS dilakukan dengan metode resampling Bootstrap. Pengujian statistik yang digunakan ialah uji T (*T-test*), sebagaimana hipotesis dapat ditulis sebagai berikut :

*Untuk outer model*, mempresentasikan pengaruh masing-masing indikator terhadap variabel konstruknya :

$H_0 : \lambda_i = 0$  lawan

$$H_1 = \lambda_i \neq 0$$

Untuk inner model, mempresentasikan pengaruh variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen :

$$H_0 : \gamma_i = 0 \text{ lawan}$$

$$H_1 = \gamma_i \neq 0$$

Untuk inner model, mempresentasikan pengaruh variabel konstruk endogen terhadap endogen :

$$H_0 : \beta_i = 0 \text{ lawan}$$

$$H_1 = \beta_i \neq 0$$

Keluaran *t-test* akan menghasilkan output yang mana dapat disimpulkan bahwa signifikan jika memenuhi syarat  $p\text{-value} \leq 0,05$  (taraf kesalahan), sedangkan jika nilai  $p\text{-value}$  lebih besar berarti menunjukkan kondisi sebaliknya. Ketika hasil pengujian pada *outter model* menunjukkan signifikansi berarti indikator yang digunakan dapat dijadikan sebagai pengukur variabel konstruk. Sedangkan, hasil signifikan dari pengujian *inner model* berarti pengaruh yang diberikan satu variabel laten terhadap variabel lainnya ialah bermakna. Dengan kata lain, perubahan yang dibentuk dari satu variabel laten akan mempengaruhi pengaruh variabel laten lainnya.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Variabel Penelitian

##### 4.1.1 Desentralisasi Fiskal Di Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur

Implementasi desentralisasi fiskal pada tahun 2001 silam telah membawa berbagai dampak pelimpahan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang utuh dan bertanggung jawab yang mana menyiratkan akan tuntutan kemandirian daerah baik dari sisi pengelolaan pendapatan maupun pengeluaran daerah yang mencakup mengenai penerimaan-penerimaan pajak dan non-pajak serta pembelanjaan-pembelanjaan publik, pembangunan dan lainnya untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dipimpinnya. Sebagai salah satu sumber pendanaan daerah, desentralisasi pendapatan merupakan kebijakan yang tepat guna mendukung tujuan kemandirian yang seutuhnya bagi daerah. Dengan demikian, menilai pelaksanaan desentralisasi fiskal di setidaknya dapat dilihat dari dua ukuran kemandirian daerah yakni proporsi pendapatan daerah memenuhi belanja daerah dan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap DAU dari pemerintah pusat.

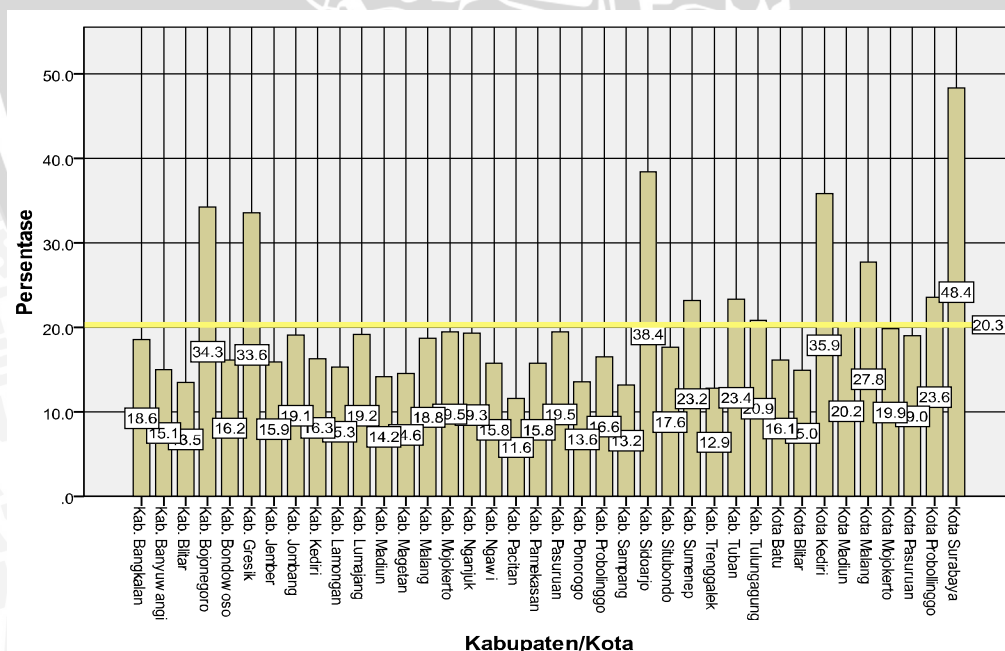
##### 4.1.1.1 Rasio PAD dan BHPBP terhadap belanja daerah

Pertanggungjawaban yang krusial bagi pemerintah terhadap masyarakat ialah penyediaan layanan publik melalui pengalokasian anggaran yang berpihak bagi kesejahteraan masyarakat. Tercapainya aspirasi dan kebutuhan prioritas



daerah melalui pendanaan utama pendapatan daerah tanpa menggantungkan sumber dana transfer dari pemerintah pusat berarti menunjukkan performa daerah tinggi di masa desentralisasi. Oleh karena itu, semakin tinggi proporsi pendapatan daerah dalam mendanai belanja daerah menunjukkan derajat kemandirian daerah yang semakin tinggi pula dan begitu juga sebaliknya semakin rendah berarti menunjukkan rendahnya derajat desentralisasi fiskal yang semakin rendah. Seiring dengan berjalannya waktu dan beragamnya sumber daya dan kapasitas daerah mendayagunakan sumber-sumber penerimaan serta keberagaman kebutuhan pendanaan belanja daerah oleh masing-masing daerah di Jawa Timur sehingga menciptakan warna perbedaan derajat desentralisasi fiskal di Jawa Timur. Di bawah ini ditampilkan gambar mengenai hal itu.

**Gambar 4.1.1 :Rasio PAD dan BHPBP Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2011**



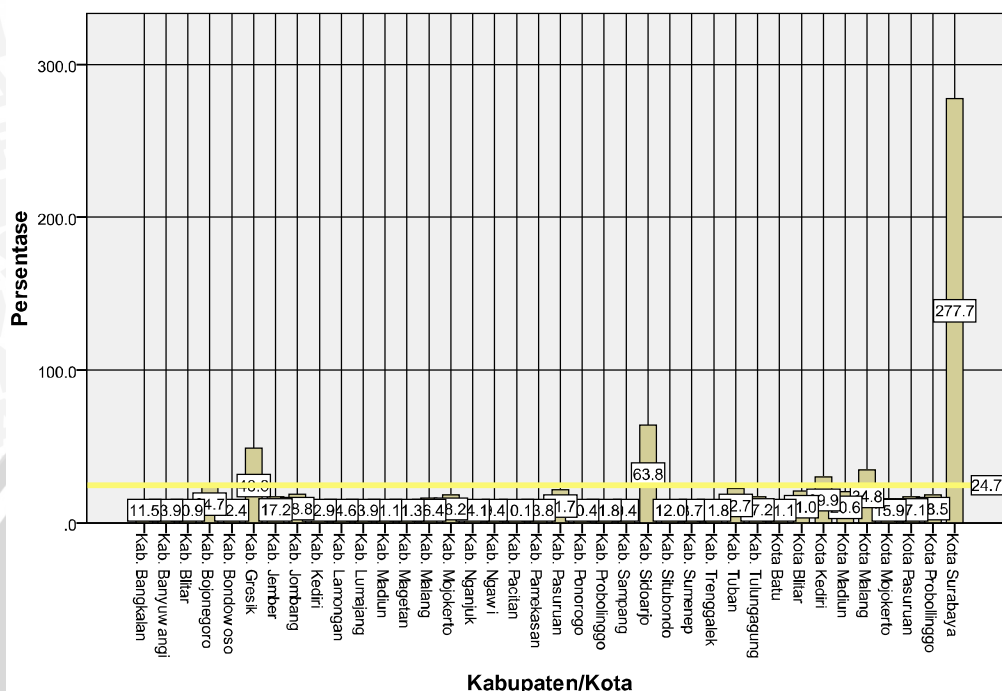
Sumber : DJPK,2011 (Data Diolah)

Berdasarkan gambar di atas, rata-rata derajat tanggung jawab daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang mana dilihat dari proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah adalah 20,31% dan terdapat 26% (10 kab./kota) daerah dengan rasio belanja modal diatas rata-rata provinsi. Dengan kata lain proporsi pendapatan daerah terhadap total belanja daerah untuk daerah di Jawa Timur masih banyak di bawah rata-rata ditunjukkan dengan sejumlah 74% (28 kab/kota) daerah memiliki proporsi pendapatan daerah dalam memenuhi belanja daerah di bawah kemampuan fiskal rata-rata 20,13%. Adapun 5 daerah dengan kapasitas pendapatan tertinggi di antara daerah lainnya lain yakni Kota Surabaya (48,38%), Kab. Sidoarjo (38,43%), Kota Kediri (35,88%), Kab. Bojonegoro (34,30%), Kab. Gresik (33,60%). Sedangkan tingkat proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah terendah yakni antara lain Kabupaten Pacitan (11,65%), Kab. Trenggalek (12,86%), Kab. Sampang (13,25%), Kab. Blitar (13,50%) dan Kab. Ponorogo (13,57%).

#### **4.1.1.2 Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Dana Alokasi Umum (DAU)**

Implementasi desentralisasi fiskal yang mengukur kemandirian daerah dipandang dari sudut pandang lainnya yakni rasio PAD terhadap DAU. Ukuran ini menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio yang dihasilkan berarti daerah mampu mengelola sumber-sumber pendapatan dengan kreativitas yang tinggi secara mandiri dan begitu pula sebaliknya. Dengan demikian derajat desentralisasi fiskal yang tinggi dalam hal ini dapat ditunjukkan dengan kemandirian daerah yang tinggi pula. Di bawah ini ditunjukkan gambar kemandirian daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sebagai ilustrasi kemampuan masing-masing daerah dalam mengelola pendapatan sebagai berikut.

Gambar 4.1.2 : Rasio PAD terhadap DAU Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2011



Sumber : DJPK, 2013 (data diolah)

Hal yang dapat dideskripsikan dari gambar tersebut, secara rata-rata rasio PAD terhadap DAU adalah 24.74%. Pada tahun 2011 terdapat sejumlah 87% daerah mendominasi rasio PAD terhadap DAU di bawah rata-rata dan sejumlah 13% daerah di atas rata-rata. Adapun kondisi derajat kemandirian daerah dengan rasio PAD terhadap DAU untuk 5 daerah tertinggi di Jawa Timur yakni Kota Surabaya (277,72%), Kab. Sidoarjo (63,83%), Kab. Gresik (48,83%), Kota. Malang (34,83%) dan Kota Kediri (29,94%). Sedangkan untuk daerah-daerah yang memiliki derajat kemandirian fiskal terendah untuk indikator rasio PAD terhadap DAU terendah yakni antara lain Kab. Sumenep (8,72%), Kab. Ngawi (9,40%), Kab. Sampang (9,40%), Kab. Pacitan (10,06%) dan Kab. Ponorogo (10,39%). Terlihat bahwa daerah-daerah yang maju membuktikan rasio kemandirian yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang kurang



maju. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat perekonomian daerah yang tinggi mampu menstimulus kemandirian.

#### **4.1.2 Kualitas Pemerintahan Di Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur**

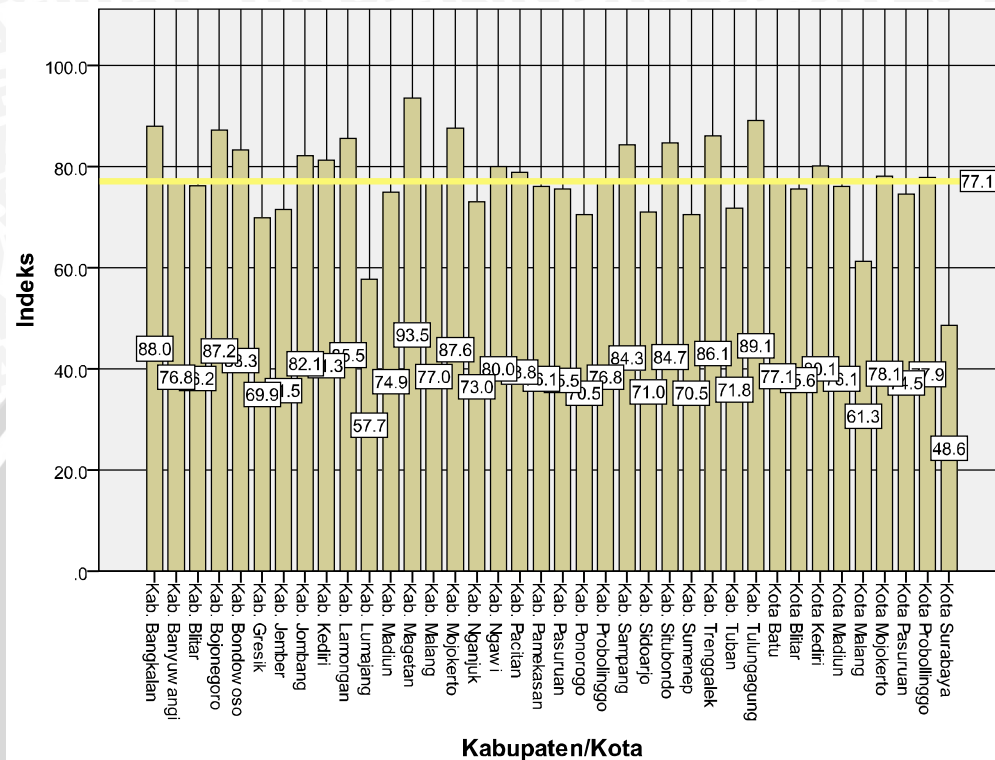
Kondisi kualitas pemerintahan dalam suatu daerah memberikan gambaran bagaimana pemerintahan bertindak untuk memimpin masyarakatnya. Melihat bahwa pemerintah adalah pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang atas keputusan yang diambil untuk mengatur yang dipimpinnya. Maka segala bentuk aktivitas yang menyangkut keberlangsungan daerah baik secara sosial, politik terlebih ekonomi akan terkait sangat erat hubungannya dengan peran pemerintah mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat intervensi pemerintah masih tinggi. Dalam penelitian ini kualitas pemerintahan dilihat dengan 4 ukuran yakni indeks akses lahan, indeks biaya transaksi, indeks keamanan & penyelesaian konflik, dan indeks perizinan usaha yang akan dideskripsikan sebagai berikut.

##### **4.1.2.1 Indeks Akses Lahan**

Sebagai bentuk kebijakan yang menunjukkan tata pemerintahan pemerintah itu baik yakni salah satunya dilihat dari pengelolaan pemerintah terhadap kebijakan yang mengatur mengenai akses lahan oleh para pelaku usaha baik dilihat dari sisi kemudahan dalam mengurus tanah, kemudahan untuk memperoleh tanah, rendahnya frekuensi kemungkinan penggusuran tanah yang terjadi, penanganan kasus konflik kerjasama atas tanah penggunaan yang baik serta dukungan-dukungan pertanahan bagi kelangsungan usaha. Oleh karena itu dengan nilai indeks yang semakin tinggi menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan daerah semakin baik.

Gambar 4.1.3 : Indeks Akses Lahan daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur

Tahun 2011



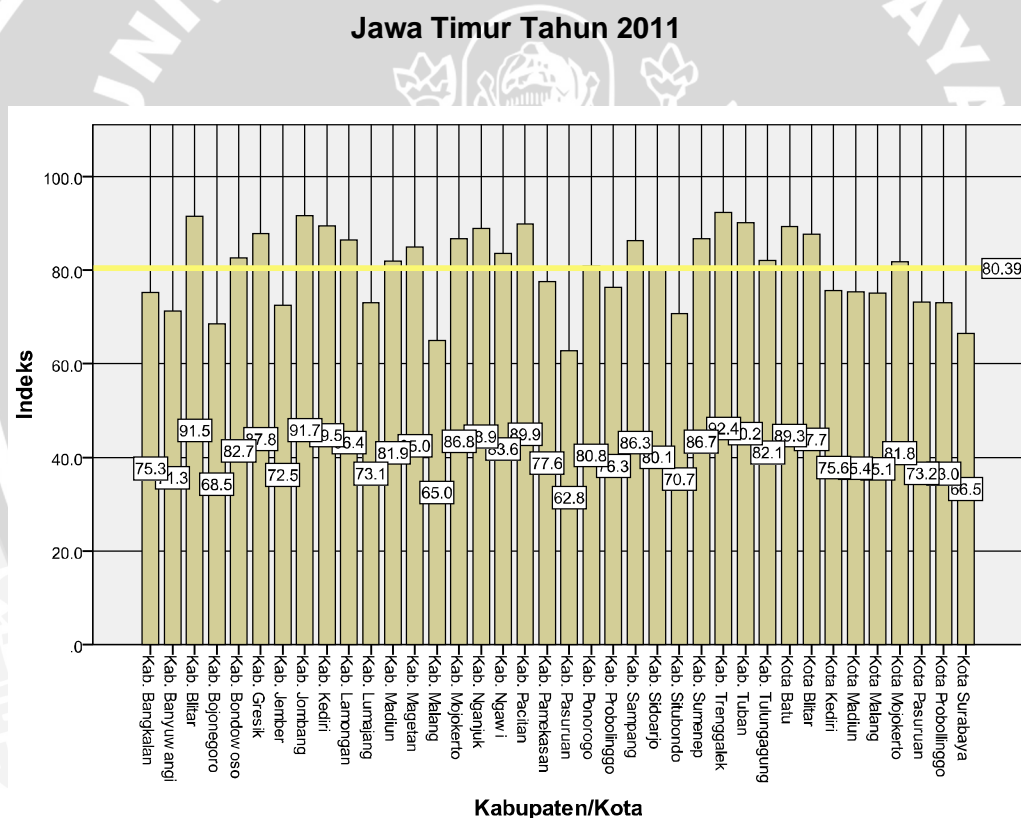
Sumber : Laporan TKED KPPOD, 2012 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2011 kondisi kualitas pemerintahan yang dapat dilihat yakni indeks akses lahan secara rata-rata adalah 77,11. Mengacu pada rata-rata tersebut, mayoritas daerah masih berada di bawah rata-rata di mana sejumlah 55% (21 daerah) kabupaten/kota berada di bawah rata-rata dan sejumlah 45% berada di atas rata-rata. Adapun beberapa daerah yang masuk dalam kategori indeks akses lahan tanah terbaik di Jawa Timur yakni Kab. Magetan (93,5), Kab. Tulungagung (89,1), Kab. Bangkalan (88), Kab. Mojokerto (87,6) dan Kab. Bojonegoro (87,2). Sedangkan untuk urutan beberapa daerah dengan indeks terendah adalah Kota Surabaya (48,6), Kab. Lumajang (57,7), Kota Malang (61,3), Kab. Gresik (69,9), Kab. Sumenep (70,5).

#### 4.1.2.2 Indeks Biaya Transaksi

Ukuran kualitas pemerintahan baik dengan menggunakan indeks biaya transaksi dapat digambarkan dengan kondisi tata kelola pemerintahan yang mencakup mengenai pengelolaan akan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha yang termasuk dalam peraturan atau surat keputusan. Sebagai gambaran kondisi biaya transaksi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur terlihat pada gambar 4.1.4 sebagai berikut.

Gambar 4.1.4 : Indeks Biaya Transaksi Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi



Sumber : Laporan TKED KPPD, 2012 (data diolah)

Kualitas biaya transaksi yang baik ialah mempertimbangkan kondisi perekonomian serta memiliki timbal balik yang sepadan dengan penyediaan layanan publik yang lebih bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya sehingga



dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Melalui ukuran ini kualitas pemerintahan dapat dikatakan baik jika tingginya tingkat kemudahan retribusi bagi kinerja perusahaan, tingkat pembayaran donasi kepada pemda yang rendah, kemudahan sumbangan kepada pemda terhadap kinerja usaha, minimnya pembiayaan biaya informal pelaku usaha terhadap kepolisian dan kemudahan biaya transaksi terhadap kinerja perusahaan.

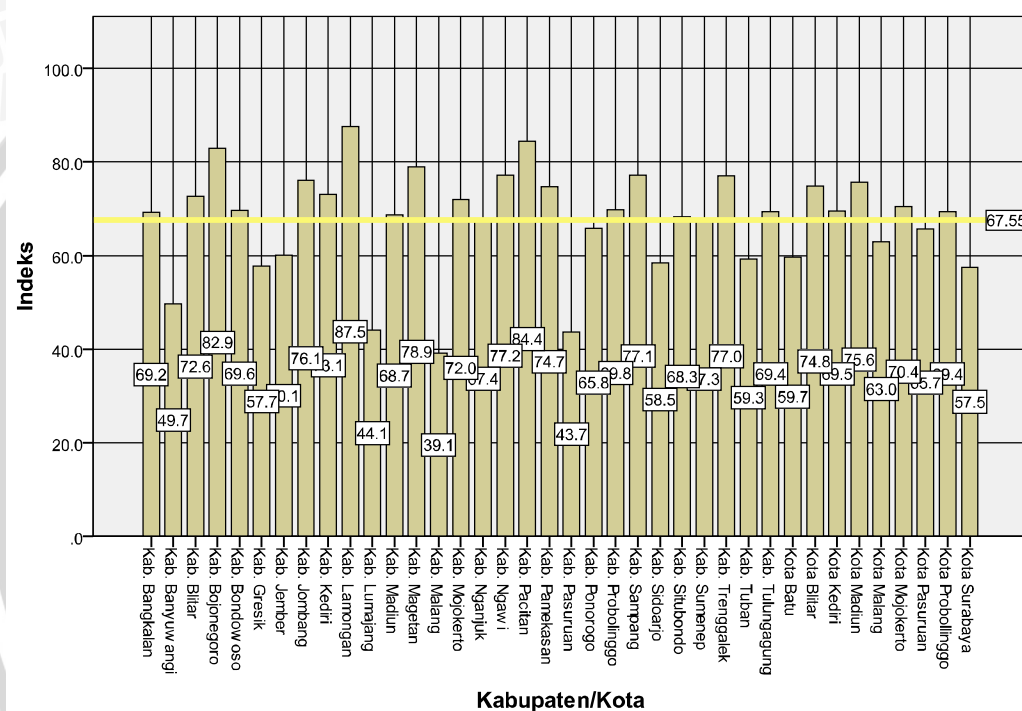
Sebagaimana yang terlihat di atas, secara rata-rata indeks biaya transaksi daerah kabupaten/kota di Jawa Timur adalah 80,39. Berdasarkan hasil mencermati data di atas dinyatakan bahwa rata-rata pencapaian indeks biaya transaksi 38 daerah kabupaten/kota yang tersebar di Jawa Timur terdapat sejumlah 55% daerah yang memiliki indeks di atas rata-rata. Sedangkan untuk jumlah daerah kabupaten/kota yang tercatat memiliki indeks akses lahan di bawah rata-rata yakni sejumlah 45% (17 daerah). Adapun prestasi beberapa daerah dengan indeks biaya transaksi terbaik yakni Kab. Trenggalek (92,4), Kab. Jombang (91,7), Kab. Blitar (91,5), Kab. Tuban (90,5), Kab. Pacitan (89,9). Sedangkan untuk 5 daerah dengan indeks biaya transaksi terendah yakni ada Kab. Pasuruan (62,8), Kab. Malang (65), Kota Surabaya (66,5), Kab. Bojonegoro (68,5), dan Kab. Situbondo (68,5).

#### **4.1.2.3 Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik**

Indeks keamanan dan penyelesaian konflik sebagai ukuran kualitas pemerintahan dapat diartikan bagaimana pemerintah daerah menjaga stabilitas dunia usaha bagi masyarakat yang dipimpinnya, termasuk memberikan rasa aman dari berbagai macam gangguan dan kriminalitas yang dapat membahayakan keberlangsungan iklim investasi yang kondusif serta kemampuan penyelesaian konflik antara stakeholder dengan baik dan bijaksana. Dengan terciptanya

jaminan keamanan dari pemerintah terhadap masyarakat akan meningkatkan perekonomian daerah itu sendiri. Di bawah ini ditunjukkan ilustrasi yang menggambarkan indeks keamanan dan penyelesaian untuk masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

**Gambar 4.1.5 : Indeks Keamanan dan Penyelesaian Konflik Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011**



Sumber : Laporan TKED KPPD, 2012 (data diolah)

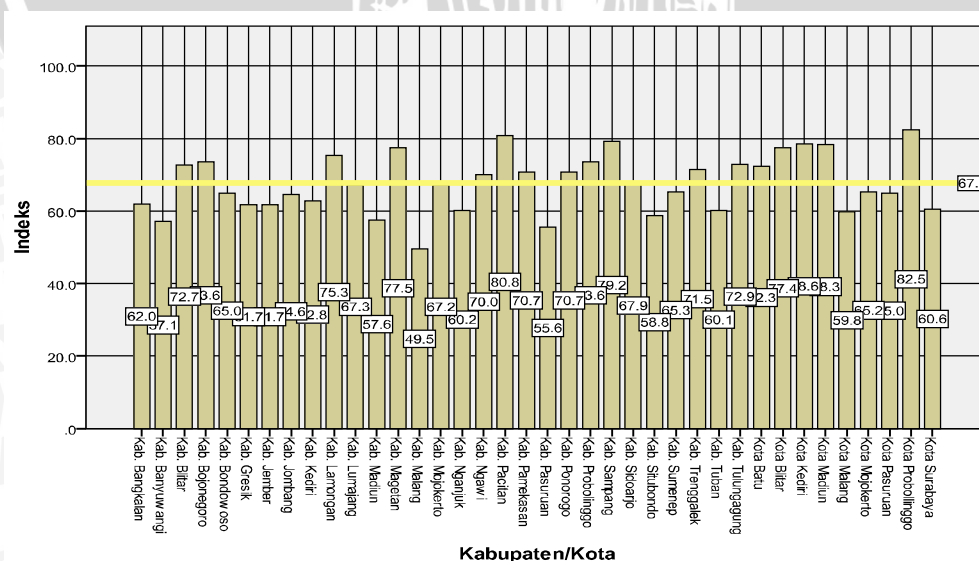
Berdasarkan data di atas rata-rata indeks keamanan dan penyelesaian konflik ialah 67,55% sehingga sejumlah 61% (23 daerah) kabupaten/kota di Jawa Timur memiliki indeks keamanan dan penyelesaian konflik di atas rata-rata dan 39% (15 daerah) kabupaten/kota di bawah rata-rata. Adapun prestasi untuk 5 daerah kabupaten/kota terbaik di Jawa Timur dengan kemampuan mencapai indeks di atas rata-rata yaitu Kab. Lamongan (87,5), Kab. Pacitan (84,4), Kab. Bojonegoro (82,9), Kab. Magetan (78,9), dan Kab. Ngawi (77,2). Sedangkan

untuk yang berada di bawah rata-rata antara lain ada Kab. Malang (39,1), Kab. Pasuruan (43,7), Kab. Lumajang (44,1), Kab. Banyuwangi (49,7) dan Kota Surabaya (57,5). Hal ini menunjukkan sebagian besar daerah kabupaten/kota di Jawa Timur telah memiliki indeks keamanan dan penyelesaian konflik di atas 50,00 sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi keamanan dan penyelesaian konflik telah cukup baik.

#### 4.1.2.4 Indeks Perizinan Usaha

Terciptanya perizinan usaha yang memperhatikan kemudahan para pelaku usaha akan mendukung tumbuh kembangnya aktivitas pelaku-pelaku usaha di suatu daerah yang kemudian akan memicu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lebih cepat. Di bawah ini ditunjukkan pencapaian indeks perizinan usaha daerah di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

Gambar 4.1.6 : Indeks Perizinan Usaha Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011



Sumber : Laporan TKED KPPOD, 2012 (data diolah)



Berdasarkan hasil pengamatan data di atas diperoleh rata-rata 67,7 dengan sejumlah 47% (18 daerah) kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai indeks perizinan usaha di atas rata-rata sedangkan sejumlah 53% (20 daerah) kabupaten/kota di bawah rata-rata. Adapun 5 daerah dengan pencapaian indeks perizinan usaha terbaik adalah Kota Probolinggo (82,5), Kab. Pacitan (80,8), Kab. Sampang (79,2), Kota Kediri (78,6) dan Kota Madiun (78,3). Sedangkan untuk daerah-daerah yang di bawah rata-rata antara lain Kab. Malang (49,5), Kab. Pasuruan (55,6), Kab. Banyuwangi (57,1), Kab. Madiun (57,6) dan Kab. Situbondo (58,8). Terlihat bahwa jumlah daerah dengan pencapaian indeks ini masih mendominasi di kalangan kabupaten/kota di Jawa Timur.

#### **4.1.3 Kinerja Ekonomi di Daerah Kabupaten/Kota Jawa Timur**

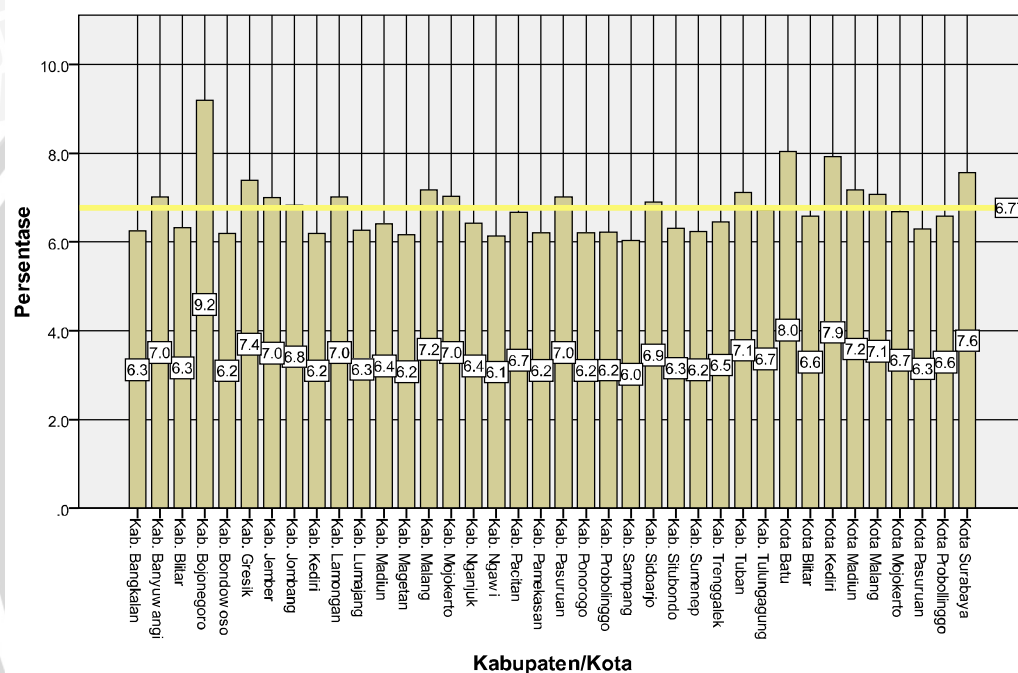
Analisis kinerja ekonomi regional tentu tidak terlepas dari serangkaian aktivitas ekonomi yang bersifat lokalisasi. Pencapaian kinerja ekonomi daerah yang baik sering dipandang dari sisi laju pertumbuhannya saja. Padahal tidak selamanya pertumbuhan ekonomi diiringi stabilitas ekonomi yang baik pula seperti tingkat pengangguran, inflasi dan pendapatan perkapita. Oleh karena itu supaya dalam penelitian ini menggunakan 3 ukuran kinerja ekonomi yakni pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan tingkat pengangguran.

##### **4.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Menilai kinerja ekonomi tidak terlepas dari pencapaian pertumbuhan ekonomi pada periode tertentu. Keberhasilan ekonomi daerah sering kali diukur dengan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang tinggi. Kondisi demikian menggambarkan meningkatnya produktivitas sektor-sektor ekonomi dan perekonomian masyarakat. Dengan berbagai karakteristik seperti faktor-faktor produksi dan sarana & prasarana di Jawa Timur menjadi faktor yang

mempengaruhi keberagaman tingkat pertumbuhan ekonomi (outcome) yang dihasilkan di masing-masing daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Melihat kondisi tersebut, gambar 4.1.7 sebagai berikut mengilustrasikan keberagaman tersebut.

**Gambar 4.1.7 : Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2011 (data diolah)

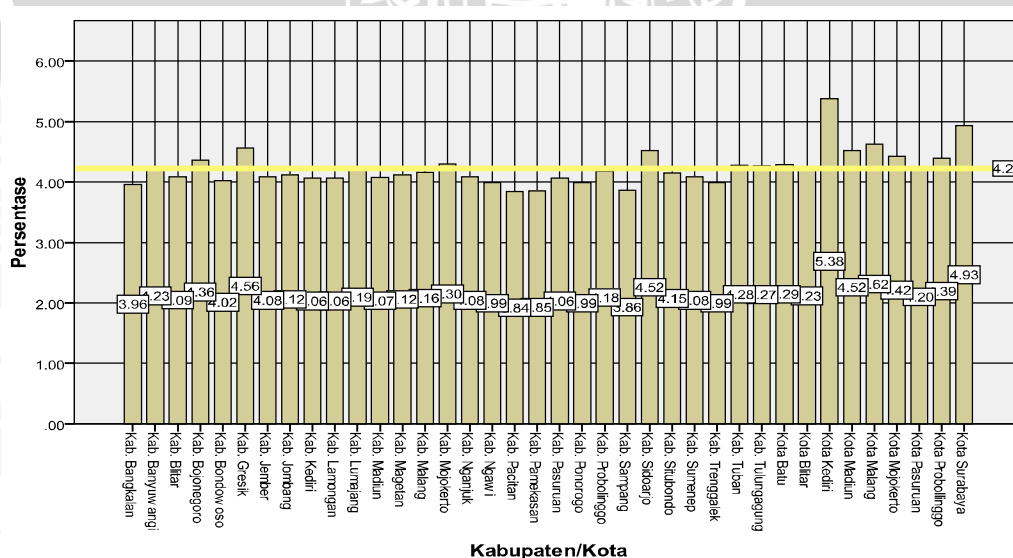
Mengamati dari data di tersebut bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah di Jawa Timur pada tahun 2011 adalah 6,76% dengan jumlah daerah kabupaten/kota di atas rata-rata sejumlah 42% (16 daerah) kabupaten/kota dan sejumlah 58% (22 daerah) kabupaten/kota di bawah rata-rata. Sebagaimana yang tampak adapun beberapa daerah yang menduduki prestasi 5 tingkat pertumbuhan tertinggi diantaranya adalah Kab.Bojonegoro (9,19%), Kota Batu (8,04%), Kota Kediri (7,93%), Kota Surabaya (7,56%), Kab.

Gresik (7,39%). Sedangkan untuk 5 daerah dengan tingkat pertumbuhan rendah pada tahun 2011 yakni Kab. Sampang (6,04%), Kab. Ngawi (6,14%), Kab. Magetan (6,16%), Kab. Kediri (6,2%), Kab. Bondowoso (6,2%). Sehingga melihat pencapaian pertumbuhan pada tahun tersebut mayoritas daerah kabupaten/kota di Jawa Timur berada pada pertumbuhan di bawah rata-rata.

#### 4.1.3.2 Pendapatan Perkapita

Selain pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dapat mengukur kinerja ekonomi dari sisi pendapatan secara rata-rata yang diperoleh penduduk atas pencapaian Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat region. Pendapatan perkapita masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja ekonomi mampu memberdayakan kesejahteraan masyarakat melalui kenaikan pendapatan yang lebih baik. Sebagai ilustrasi masing-masing pendapatan perkapita untuk masing-masing daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur di tunjukkan pada gambar 4.1.9 di bawah ini.

Gambar 4.1.9 : **Pendapatan Perkapita Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 (data diolah)



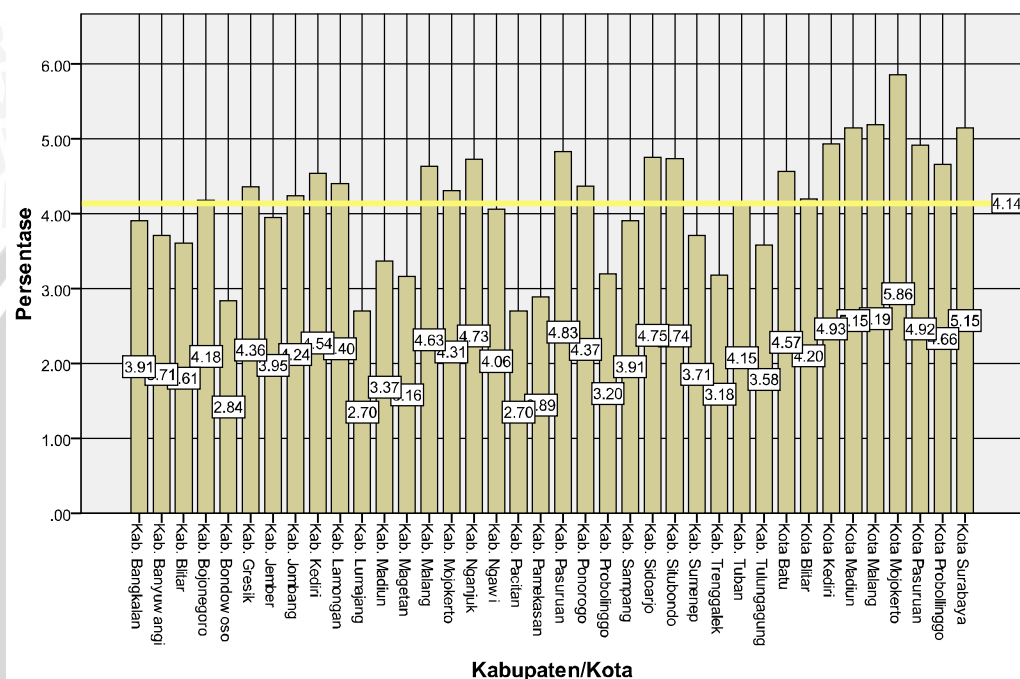
Berdasarkan hasil pengamatan data pada gambar di atas diperoleh bahwa rata-rata pendapatan perkapita di Provinsi Jawa Timur adalah Rp 24.261,- dengan sejumlah 21% (8 daerah) Kabupaten/Kota memiliki pendapatan perkapita yang melampaui rata-rata. Sedangkan 79% (30 daerah) Kabupaten/Kota di bawah rata-rata. Adapun 5 daerah yang memiliki pendapatan perkapita di atas rata-rata yakni ada Kota Kediri (Rp 241.917,-), Kota Surabaya (Rp 84.513,-), Kota Malang (Rp 41.494,-), Kab. Gresik (Rp 36.646,-) dan Kota Madiun (Rp 33.091,-). Sedangkan sejumlah sebagian besar daerah berada di bawah rata-rata pendapatan perkapita yakni 5 diantaranya memiliki pendapatan perkapita terendah adalah Kab. Pacitan (Rp 6.879,-), Kab. Pamekasan (Rp 7.015,-), Kab. Sampang (Rp 7.293,-), Kab. Bangkalan (Rp 9.192,-) dan Kab. Ponorogo (Rp 9.772,-). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah kabupaten/kota di Jawa Timur masih di bawah rata-rata.

#### **4.1.3.3 Pengangguran**

Fenomena pengangguran di Indonesia merupakan permasalahan yang tidak lagi tabu selama beberapa dekade. Ketenagakerjaan menjadi indikator dalam menilai kualitas dan produktivitas suatu negara, tingginya angkatan kerja yang menyandang suatu pekerjaan akan mendorong produktivitas dalam suatu negara, dan oleh karena itu permasalahan pengangguran yang berkelanjutan akan menurunkan tingkat produktivitas yang kemudian berpengaruh menghambat dari pada pertumbuhan ekonomi. Beragamnya faktor-faktor penyebab pengangguran juga seiring dengan keberagaman dari tingkat pengangguran yang terjadi di Provinsi Jawa Timur. Tidak lain penyebab salah satunya ialah menyempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan meningkatnya para angkatan kerja dari tahun ke tahun yang melebihi lapangan pekerjaan yang tersedia. Dibawah ini ditunjukkan mengenai penyebaran tingkat pengangguran

terbuka di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011 sebagai berikut.

Gambar 4.1.10 : **Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas, rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur adalah yakni 4,14% dengan jumlah kabupaten/kota yang berada di atas tingkat pengangguran rata-rata sejumlah 58% (22 daerah) kabupaten/kota dan sejumlah 42% (16 daerah) kabupaten/kota di bawah rata-rata atau dengan kata lain kondisi tingkat pengangguran yang lebih sedikit dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Adapun 5 daerah dengan tingkat pengangguran tinggi antara lain Kota Mojokerto (5,86%), Kota Malang (5,19%), Kota Madiun (5,15%), Kota Surabaya (5,15%) dan Kota Kediri (4,93%). Adapun 5 daerah yang mampu menekan pengangguran lebih baik antara lain Kab. Pacitan



(2,70%), Kab. Lumajang (2,70%), Kab. Bondowoso (2,84%), Kab. Pamekasan (2,89%), Kab. Magetan (3,16%). Sehingga terlihat bahwa sebagian besar daerah di Jawa Timur memiliki laju tingkat pertumbuhan pengangguran di atas rata-rata.

#### 4.2 Pengujian Model dengan Partial Least Squares (PLS)

Merujuk pada metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan analisis Partial Least Squares (PLS) untuk menguji model yang dibangun oleh penulis, yang mana dalam penggunaannya memberdayakan tiga variabel konstruk dengan indikator refleksif. Untuk menguji konstruk dengan indikator refleksif, terdapat empat macam pengujian yang harus dilakukan. Pertama, pengujian *goodness of fit* model pengukuran refleksif atau outer model. Kedua, pengujian *goodness of fit* model struktural atau inner model. Ketiga, hasil pendugaan model pengukuran (*outer model*) dan yang keempat ialah, hasil pendugaan model struktural (*inner model*).

##### 4.2.1 Pengujian *Goodness Of Fit* Model Pengukuran Refleksif (*Outer Model*)

Analisis *goodness of fit* outer model refleksif pada dasarnya ialah melihat hasil pengukuran *loading factor*, *composite reliability*, *average varianced extract (AVE)*, dan *discriminant validity* atau *cross loading*. Adapun hasil pengujian data dengan metode PLS adalah sebagai berikut :

##### 1. *Loading Factor*

Loading factor atau yang disebut dengan convergent validity dari model berindikator refleksif adalah evaluasi yang didasarkan pada korelasi antara indikator dengan konstruk yang dihitung oleh PLS. Pada PLS, nilai *convergent validity* dapat dilihat dari tabel *results for outer loading*. Ukuran refleksif dikatakan tinggi jika bernilai di atas 0,70. Akan tetapi jika ukuran tersebut



bernilai 0,50 hingga 0,60, maka ukuran ini masih dapat diterima. Hasil pengujian loading factor model penelitian secara lengkap ditunjukkan pada gambar 4.2.1 :

Tabel 4.2.1 : Hasil *Loading Factor*

Variabel	Indikator	Nilai <i>Loading Factor</i>	Keterangan
Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ )	1. Proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah ( $X_{1.1}$ )	0,9496	Valid
	2. Rasio PAD terhadap DAU ( $X_{1.2}$ )	0,9101	Valid
Kualitas Pemerintahan ( $Y_1$ )	1. Indek Akses Lahan ( $Y_{1.1}$ )	0,8117	Valid
	2. Indek Biaya Transaksi ( $Y_{1.2}$ )	0,7213	Valid
	3. Indek Keamanan & Penyelesaian Konflik ( $Y_{1.3}$ )	0,8399	Valid
	4. Indek Perizinan Usaha ( $Y_{1.4}$ )	0,6024	Valid
Kinerja Ekonomi ( $Y_2$ )	1. Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_{2.1}$ )	0,7949	Valid
	2. Pendapatan Perkapita ( $Y_{2.2}$ )	0,9160	Valid
	3. Pengangguran ( $Y_{2.3}$ )	0,7391	Valid

Sumber : Output, 2013 (data diolah)

Berdasarkan hasil *loading factor* diatas dapat dijelaskan bahwa penggunaan indikator-indikator untuk variabel konstruk desentralisasi fiskal yakni proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah dan rasio PAD terhadap DAU menunjukkan keduanya lulus uji *convergent validity* dengan nilai *outer loading* masing-masing di atas 0,50 (kriteria kelolosan uji *convergent validity*), adapun nilai untuk *outer loading* dari masing-masing indikator yang membentuk desentralisasi fiskal di atas yakni proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah senilai 0,9496 dan senilai 0,9101 untuk rasio PAD terhadap DAU.

Selanjutnya, untuk hasil *outer loading* dari indikator yang menyusun variabel konstruk kualitas pemerintahan secara keseluruhan dinyatakan valid

dengan kemampuan masing-masing indikator dalam membentuk variabel konstruksya lebih dari 0,50 (50%), di mana indikator keamanan dan penyelesaian konflik memiliki kontribusi tertinggi dengan nilai *outer loading* senilai 0,8399 (83,99%) sedangkan indikator perizinan usaha dengan nilai *outer loading* 0,6024 menempati nilai kontribusi pembentuk terhadap konstruk terendah dibandingkan indikator lainnya.

Kemudian yang terakhir, sejumlah 3 indikator yang merefleksikan kinerja ekonomi dinyatakan valid atau lolos uji *convergent validity* dengan nilai *outer loading* senilai 0,7949 untuk laju pertumbuhan ekonomi, nilai *outer loading* pengaruh sebesar 0,7391 untuk indikator pengangguran. Kemampuan tertinggi dalam mengukur kinerja ekonomi terlihat pendapatan perkapita menempati posisi tertinggi dengan *outer loading* 0,9160 atau memiliki kemampuan dalam merefleksikan variabel kinerja ekonomi sebesar 91,60%.

## 2. Composite Reliability

Uji composite reliability ialah pada dasarnya digunakan untuk mengukur konsistensi internal, dan untuk standarisasi daripada konsistensi internal tersebut nilainya harus di atas 0,7. Adapun di bawah ini hasil uji composite reliability sebagai berikut pada tabel 4.2.2.

Tabel 4.2.2 : Hasil **Composite Reliability**

Variabel	Nilai Composite Realibility
Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ )	0,9276
Kualitas Pemerintahan ( $Y_1$ )	0,8347
Kinerja Ekonomi ( $Y_2$ )	0,8593

Sumber : Output, 2013 (data diolah)



Menjelaskan dari tabel di atas sesuai dengan kriteria pemenuhan uji *composite reliability* bahwa untuk ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu desentralisasi fiskal, kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi dinyatakan telah memenuhi uji ini sebagaimana yang dapat disebutkan karena hasil dari uji *composite reliability* telah melampaui kriteria kelolosan uji reabilitas yakni masing-masing nilai *composite reliability* 0,9276 untuk desentralisasi fiskal, kualitas pemerintahan senilai 0,8347 dan kinerja ekonomi menghasilkan senilai 0,8593, sebagai bentuk pengokohan dari pada validitas uji ini maka perlu dilakukan pengujian selanjutnya untuk memastikan nilai *discriminant validity*nya.

### 3. Average variance extracted (AVE)

AVE adalah metode untuk menilai *discriminant validity*. Untuk memenuhi kriteria validitas diskriminan, nilai AVE harus di atas 0,50. Hasil uji AVE adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.3 : Hasil AVE

Variabel	AVE
Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ )	0,8651
Kualitas Pemerintahan ( $Y_1$ )	0,5618
Kinerja Ekonomi ( $Y_2$ )	0,6724

Sumber : Output, 2013

Berdasarkan pada hasil AVE di atas, terlihat bahwa seluruh variabel konstruk yang digunakan dalam penelitian ini lolos uji AVE. Adapun variabel desentralisasi fiskal lolos uji AVE dengan menunjukkan nilai AVE sebesar 0,8651 dan untuk kualitas pemerintahan sebesar 0,5618 dan kinerja ekonomi sebesar 0,6724.



#### 4. Discriminant Validity

Pengujian validitas diskriminan menggunakan nilai akar AVE yang dibandingkan dengan korelasi antar variabel laten. Adapun di bawah ini pengujian yang dapat dianalisis sebagai berikut.

Tabel 4.2.4 : Hasil Validitas Diskriminan

Variabel	AVE	Akar AVE	Skor Korelasi Antar Variabel Laten		
			DF (X <sub>1</sub> )	KP (Y <sub>1</sub> )	KE (Y <sub>2</sub> )
Desentralisasi Fiskal (X <sub>1</sub> )	0,8651	<b>0,9301</b>			
Kualitas Pemerintahan (Y <sub>1</sub> )	0,5618	<b>0,7495</b>	-0,5109		
Kinerja Ekonomi (Y <sub>2</sub> )	0,6724	<b>0,82</b>	0,6991	-0,3406	

Sumber : Output, 2013 (data diolah)

Sesuai hasil validitas diskriminan di atas maka dapat dinyatakan bahwa ketiga konstruk yang digunakan dalam penelitian ini yakni variabel desentralisasi fiskal, kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi dinyatakan lolos uji validitas diskriminan sebagaimana yang dapat disimpulkan dari tabel di atas karena nilai skor korelasi antar variabel laten pada masing-masing variabel laten menunjukkan nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan akar AVE dengan kata lain nilai akar AVE masing-masing variabel lebih tinggi dari skor korelasi antar variabel latennya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua konstruk memiliki discriminant validity yang tinggi. Dengan demikian semua konstruk tanpa terkecuali telah memenuhi *convergent validity* dan memiliki *discriminant validity* yang tinggi, sehingga akan dilanjutkan pada pengujian *goodness of fit*.

#### 4.2.2 Pengujian *Goodness Of Fit* Model Pengukuran Struktural (Inner Model)

Pengujian *goodness of fit* model struktural pada *inner model* menggunakan nilai *predictive-relevance* ( $Q^2$ ). Nilai  $R^2$  masing-masing variabel endogen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dicermati pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2.5 : Hasil Perhitungan  $R^2$  pada Variabel Endogen

Variabel Endogen	Nilai $R^2$
<b><i>Desentralisasi Fiskal (<math>X_1</math>)</i></b>	
Kualitas Pemerintahan ( $Y_1$ )	$R_1^2 = 0,2610$
Kinerja Ekonomi ( $Y_2$ )	$R_2^2 = 0,4891$

Sumber : Output,2013 (data diolah)

Nilai *predictive relevance* untuk model struktural pada inner model dapat dicari dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2)$$

$$Q^2 = 1 - (1 - 0,2610) (1 - 0,4891)$$

$$Q^2 = 1 - (0,739) (0,5109)$$

$$Q^2 = 0,6224$$

Hasil perhitungan *predictive relevance* senilai 0,6224 atau 62,24% di atas menunjukkan bahwa variabilitas konstruk kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi dapat dijelaskan oleh desentralisasi fiskal sebesar 62,24% sedangkan selebihnya 37,76% dijelaskan oleh variabel-variabel lain selain desentralisasi fiskal yang tidak masuk pada model.

#### 4.2.3 Hasil Pendugaan Model Pengukuran (Outer Model)

Nilai *loading weight* menunjukkan bobot dari setiap indikator sebagai pengukur dari masing-masing variabel konstruk. Indikator dengan *loading weight* terbesar menunjukkan bahwa indikator tersebut sebagai pengukur variabel yang terkuat (dominan).

##### 4.2.3.1 Outer Model Variabel Desentralisasi Fiskal

Variabel desentralisasi fiskal pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat refleksif atau yang dapat terlihat dari konstruk menuju indikator-indikatornya. Hasil outer loading indikator-indikator dari variabel konstruk desentralisasi fiskal dapat dilihat pada tabel 4.2.6.

Tabel 4.2.6 : Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel Desentralisasi Fiskal

Indikator	Outer Loading	T-Statistik
Rasio PAD + BHPBP terhadap belanja daerah ( $X_{1,1}$ )	0,9496	135,35
Rasio PAD terhadap DAU ( $X_{1,2}$ )	0,8100	33,42

Sumber : Output,2013 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas, untuk indikator pertama yaitu proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah ( $X_{1,1}$ ) memiliki nilai outer loading senilai 0,9496 dalam arti indikator ini berpengaruh positif terhadap desentralisasi fiskal dengan nilai t-statistik 135,35. Berpedoman pada taraf signifikansi 5% (t-tabel = 1,96) maka indikator pertama yang digunakan untuk mengukur desentralisasi fiskal dinyatakan signifikan, dikarenakan nilai t-statistik  $X_{1,1}$  yaitu  $135,35 > 1,96$  dan untuk indikator kedua yakni rasio PAD terhadap DAU ( $X_{1,2}$ )



memiliki nilai *outer loading* 0,9101 dan t-statistik 33,42 > 1,96. Sehingga dapat dinyatakan bahwa kedua indikator yang digunakan relevan dalam mengukur variabel desentralisasi fiskal dan indikator terkuat yang mampu merefleksikan variabel laten desentralisasi fiskal secara dominan yakni indikator proporsi pendapatan daerah terhadap belanja daerah ( $X_{1.1}$ ) dan hal ini juga dibuktikan dengan t-statistik ( $X_{1.1}$ ) yang sangat tinggi.

#### 4.2.3.2 Outer Model Variabel Kualitas Pemerintahan

Variabel kualitas pemerintahan pada penelitian diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat refleksif. Di mana terdapat 4 (lima) indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pemerintahan antara lain : Indeks Akses Lahan, Indeks Biaya Transaksi, Indeks Keamanan & Penyelesaian Konflik, dan Indeks Perizinan Usaha. Untuk hasil *loading factor* pada variabel kualitas pemerintahan dapat dilihat pada tabel 4.2.7 sebagai berikut.

Tabel 4.2.7 : Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel Kualitas Pemerintahan

Indikator	<i>Loading Factor</i>	T-statistik
Akses Lahan ( $Y_{1.1}$ )	0,8117	16,8105
Biaya Transaksi ( $Y_{1.2}$ )	0,7213	10,7207
Keamanan & Penyelesaian Konflik ( $Y_{1.3}$ )	0,8399	16,3755
Perizinan Usaha ( $Y_{1.4}$ )	0,6024	5,4679

Sumber : Output, 2013 (data diolah)

Berdasarkan output di atas maka dapat dijelaskan nilai *loading factor* dan t-statistik untuk masing-masing indikator. Secara keseluruhan indikator yang digunakan telah valid dan signifikan sebagai ukuran yang mampu merefleksikan

kualitas pemerintahan pada penelitian ini, yang mana dari hasil pengamatan indikator indeks keamanan dan penyelesaian konflik memberikan kontribusi terkuat sebagai ukuran dari kualitas pemerintahan dengan hasil *outer loading* senilai 0,8399 atau dengan kata lain secara positif 83,99% secara positif indikator ini mampu merefleksikan kualitas pemerintahan. Sedangkan tingkat pengaruh terendah yakni dibentuk oleh indikator indeks perizinan usaha dengan nilai *outer loading* sebesar 0,6024.

#### 4.2.3.3 Outer Model Variabel Kinerja Ekonomi

Selaras dengan variabel lain sebelumnya, variabel kinerja ekonomi pada penelitian ini diukur dengan menggunakan tiga indikator ekonomi yang bersifat refleksif yakni Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_{2.1}$ ), Pendapatan Perkapita ( $Y_{2.2}$ ) dan Pengangguran ( $Y_{2.3}$ ). Adapun di bawah ini hasil *outer loading* dari indikator yang digunakan untuk mengukur variabel konstruk kinerja ekonomi sebagai berikut:

Tabel 4.2.8 : Hasil Pengujian Indikator Pembentuk Variabel Kinerja Ekonomi

Indikator	<i>Loading Factor</i>	T-statistik
Pertumbuhan Ekonomi ( $Y_{2.1}$ )	0,7949	19,4737
Pendapatan Perkapita ( $Y_{2.2}$ )	0,9160	85,2018
Pengangguran ( $Y_{2.3}$ )	0,7391	21,7336

Sumber :Output, 2013 (data diolah)

Berdasarkan pada pengamatan data di atas, maka dapat dijelaskan mengenai hasil *outer loading* dan t-statistik untuk masing-masing indikator pembentuk variabel kinerja ekonomi. Sebagaimana yang dapat dicermati dari output diatas bahwa pendapatan perkapita berkontribusi secara positif dengan



nilai *loading factor* tertinggi sebesar 0,9160 (91,60%) dalam variabel konstruk dibentuk secara kuat oleh indikator pendapatan perkapita. Sedangkan pengaruh terendah yakni dari indikator pengangguran dengan nilai *outer loading* 0,7391. Akan tetapi secara keseluruhan indikator-indikator yang digunakan untuk merefleksikan variabel kinerja ekonomi dinyatakan valid dan signifikan dengan hasil *loading factor* yang secara keseluruhan berada di atas 0,70 (kriteria indikator dikatakan baik).

#### 4.2.4 Hasil Pendugaan Model Struktural (Inner Model)

Pengujian *inner model* pada dasarnya ialah untuk menguji hipotesis yang dibangun oleh peneliti dalam penelitian ini. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-statistik pada masing-masing jalur pengaruh langsung secara parsial. Di bawah ini ditunjukkan hasil pengujian hipotesis.

**Tabel 4.2.8 : Hasil Pengujian Hipotesis dalam *Inner Model***

Variabel Independen	Variabel Dependen	Koefisien Jalur	T-Statistik	Keterangan
Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ )	Kualitas Pemerintahan ( $Y_1$ )	-0,5109	6,0457	Signifikan
Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ )	Kinerja Ekonomi ( $Y_2$ )	0,7105	15,6643	Signifikan
Kualitas Pemerintahan ( $Y_1$ )	Kinerja Ekonomi ( $Y_2$ )	0,0224	0,3205	Tidak Signifikan

Sumber : Output, 2013 (data diolah)

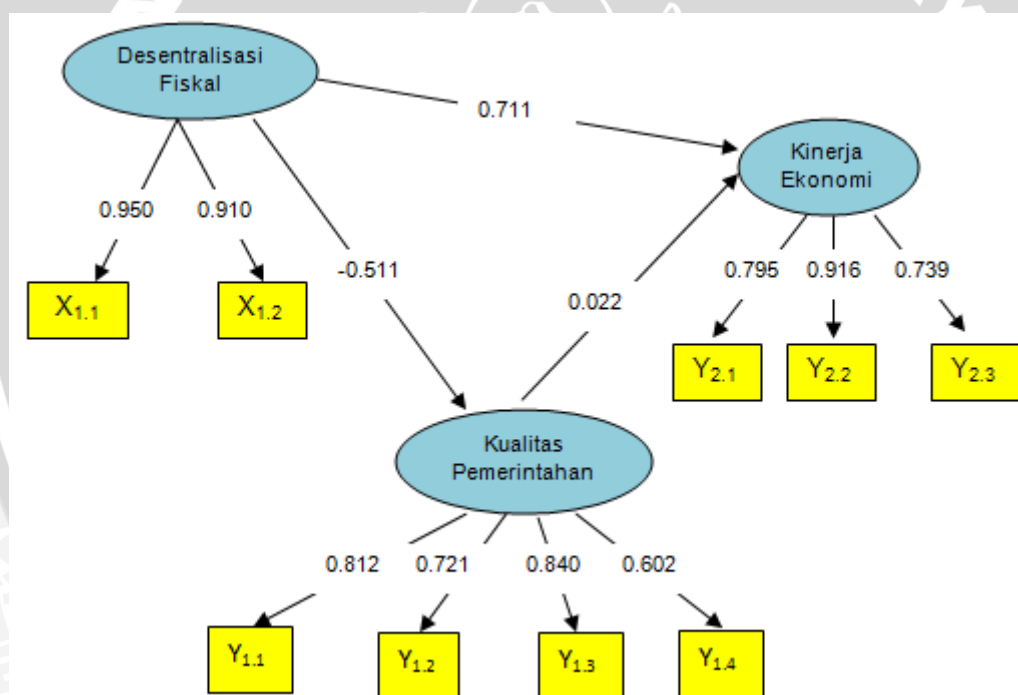
Keterangan : tanda \* menunjukkan signifikan pada tingkat 5%

Berdasarkan dari output di atas dapat diketahui bahwa variabel desentralisasi fiskal mempengaruhi kualitas pemerintahan secara negatif dengan nilai koefisien 0,5109 (51,09%) dan signifikan yang ditunjukkan dengan t-statistik



6,0457. Dengan kata lain perubahan desentralisasi yang semakin tinggi mengakibatkan penurunan kualitas pemerintahan sebesar 51,09%. Kemudian untuk pengaruh antar variabel desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi juga dinyatakan signifikan dengan nilai koefisien pengaruh senilai 0,7105 (71,05%). Namun, untuk pengaruh yang dibentuk dari kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi dinyatakan tidak signifikan dengan nilai t-statistik sangat kecil senilai 0,3205. Sebagai ilustrasi dari hasil pengujian hipotesis jalur-jalur dapat dilihat pada gambar diagram jalur pada gambar 4.2.1 sebagai berikut.

**Gambar 4.2.1 : Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis dalam *Inner Model***



Sumber : Output PLS Algorithm, 2013 (data diolah)

Berdasarkan pada tabel hasil pengujian hipotesis dalam *inner model* sebelumnya, maka dapat dinyatakan hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1 : ***Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara desentralisasi fiskal terhadap Kualitas Pemerintahan di daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur***

Berdasarkan hasil analisis koefisien pengaruh langsung antara variabel desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan menunjukkan terdapat pengaruh secara negatif sebesar -0,5109 (51,09%). Serta mencermati pada uji signifikansi untuk *coefficient loading* dari konstruk desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan menunjukkan t-statistik  $6,05 > t\text{-table } 1,96$  sehingga dinyatakan signifikan. Dalam hal ini hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif antara desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan tidak dibenarkan adanya dan kemudian dalam penelitian ini disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal mempengaruhi kualitas pemerintahan secara negatif dan signifikan. Dengan kata lain dengan lahirnya desentralisasi fiskal yang semakin baik direspon lebih buruk dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Timur pada khususnya.

Hipotesis 2 : ***Terdapat pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap Kinerja Ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur***

Sebagaimana dalam hasil analisis koefisien pengaruh langsung antara variabel desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,7105 dan nilai t-statistik 15,66 yang berarti dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif sebesar 71,05% yang diberikan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi dan signifikan pada taraf 5% yang mana ditunjukkan nilai t-statistik  $15,66 > 1,96$ . Sehingga hipotesis yang menyatakan

adanya pengaruh positif dari desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi telah cukup bukti untuk menerima hipotesis 2 di dalam penelitian ini.

Hipotesis 3 : ***Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi***

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas pemerintahan mempengaruhi kinerja ekonomi secara positif dengan nilai koefisien 0,022. Hanya saja pengaruh yang dibentuk tidak signifikan yang dibuktikan dengan uji statistik t-statistik  $0,32 < t\text{-tabel } 1,96$ . Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga ini tidak dapat diterima dalam penelitian ini dikarenakan tidak cukup bukti empiris yang mendukungnya.

Hipotesis 4 : ***Terdapat pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi melalui kualitas pemerintahan atau terdapat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi tidak secara langsung namun positif dan signifikan melalui kualitas pemerintahan di daerah kabupaten/kota***

Pengaruh tidak langsung adalah hasil perkalian diantara dua koefisien pengaruh langsung. Jika kedua pengaruh langsung yang membentuk pengaruh tidak langsung adalah signifikan maka pengaruh tidak langsung adalah signifikan. Akan tetapi, jika salah satu atau kedua pengaruh langsung bernilai tidak signifikan, maka pengaruh tidak langsung dinyatakan tidak signifikan. Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas pemerintahan. Di samping itu untuk variabel kualitas pemerintahan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi secara positif dan tidak signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi tidak secara langsung bernilai



negatif dan tidak signifikan. Sehingga tidak cukup bukti empiris dalam penelitian ini untuk menerima hipotesis keempat.

### **4.3 Pembahasan dan Implikasi Hasil Penelitian**

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk meninjau sejauh mana hipotesis dapat dibuktikan sebagaimana melihat pengaruh yang terjadi di antara variabel yang terlibat di dalam penelitian sesuai dengan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan hasil penelitian akan menggunakan dua sumber utama sebagai acuan yakni teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu.

#### **4.3.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kualitas Pemerintahan**

Melalui ukuran desentralisasi penerimaan yang merefleksikan desentralisasi fiskal di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur untuk tujuan melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan (tata kelola ekonomi daerah) hasil statistik menunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh secara negatif terhadap kualitas pemerintahan. Dengan kata lain pelimpahan wewenang fiskal terhadap daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jatim berimbas pada penurunan kualitas pemerintahan.

Hasil penelitian ini seolah-olah mematahkan asumsi *accountability government theory* di mana pemerintah dikatakan akuntabel jika voter (masyarakat) dapat menyikapi tindakan pemerintah apakah sesuai dengan voter interest dan memberikan sanksi sepantasnya jika tidak. Dalam kenyataanya pemilih lemah akan informasi mengenai perilaku dan type politisi, sehingga proses pemilihan umum yang dilakukan kurang bekerja maksimal dalam memilih *good incumbent*.

Hasil ini cukup berbeda dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang mana desentralisasi berpengaruh positif bagi kualitas pemerintahan seperti yang diungkapkan oleh Faguet (2011), Altunbas & Thornton (2011), Ivanyna & Shah (2010), dan Kyriacou & Sagales (2010) bahwa penyelenggaraan desentralisasi mampu memperbaiki *government quality* yang lebih baik. Perbedaan ini juga dipicu oleh perbedaan studi kasus yang mana sebagian besar penelitian terdahulu tersebut melakukan kajiannya pada negara-negara maju di mana kondisi kelembagaan yang mapan menciptakan desentralisasi fiskal mampu berperan dalam meningkatkan kualitas pemerintahan.

Berdasarkan pada hasil penelitian ini maka implikasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah meningkatkan sinergisitas yang lebih kuat dengan perguruan tinggi, LSM dan instansi lain yang bersangkutan dalam hal pengambilan keputusan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis tata kelola daerah untuk menghasilkan keputusan bijak dan berdampak bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meminimalisir tindakan tidak semestinya melalui tingginya partisipasi monitoring dan pengawasan oleh pihak-pihak terkait terhadap jalannya desentralisasi fiskal di daerah. Selain itu juga perlu kiranya meningkatkan keseriusan dalam penegakan perundang-undangan bagi para pelaku yang terlibat penyalagunaan wewenang dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian setidaknya keberhasilan desentralisasi dalam memperbaiki kualitas pemerintahan dapat dijamin sesuai dengan makna desentralisasi itu sendiri.

Beberapa penelitian yang senada dengan hasil tersebut yakni Bartolini & Santolini (2013) menunjukkan hubungan negatif antara otonomi fiskal dan kualitas pemerintahan bahwa semakin tinggi otonomi fiskal yang dilimpahkan pada pemerintah daerah maka semakin rendah kualitas pemerintahan suatu



negara. Treisman (2000) menambahkan pendapat bahwa desentralisasi cenderung menyebabkan kualitas pemerintahan menurun yang mana dengan bukti empiris persepsi korupsi tinggi di negara yang terdiri dari jumlah pemerintahannya besar secara vertikal.

#### **4.3.2 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi. Dalam hal ini berarti penyelenggaraan pelimpahan wewenang fiskal di daerah efektif bagi perbaikan kinerja ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Adapun teori yang mengemukakan secara tegas bahwa desentralisasi fiskal akan menciptakan efisiensi dan kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi (Jin & Zou, 2005). Efisiensi tersebut dapat dibentuk melalui kedekatan dan keuntungan informasi yang diperoleh pemerintah daerah (Oates, 2007) dan pada akhirnya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi (Zhang & Zou, 1996; Hammond & Tosun, 2006; Lessman, 2009). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang direspon positif oleh tingkat kesempatan kerja akan mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita melalui produktivitas yang tinggi.

Hal tersebut disebabkan kewenangan mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dapat dimaksimalkan guna mendukung penguatan kapasitas fiskal seperti peningkatan tarif pajak bagi sektor-sektor potensial dan perluasan basis pajak atau non-pajak (terutama bagi daerah maju). Otomatis daerah yang semakin mandiri mampu untuk mendanai anggaran kebutuhan sesuai dengan aspirasi dan prioritas masyarakat sehingga pencapaian efisiensi semacam ini dapat memacu peningkatan kinerja lebih baik. Selain upaya melalui pajak, desentralisasi fiskal yang tercermin pada pemberdayaan melalui perusahaan-



perusahaan turut mendukung upaya perbaikan ekonomi daerah setidaknya mampu mengurangi angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja.

Teori yang mendukung dari hasil penelitian tersebut yakni *The Tiebout Model* dengan asumsi *citizen mobility* yang sebagaimana dibangun oleh Charles M. Tiebout (Hyman, 1983) menjelaskan bahwa :

*"The level and mix of local expenditures and taxes are likely to exhibit wide variations among local political. Therefore, many citizens will choose to live in communities where the government budget best satisfies their own preferences for public service, provided they are not restricted in their mobility among communities. Thus, government expenditure and revenue patterns tend to be set on the local level and the mobile citizen maximizes personal well being by choosing to live in some particular political jurisdiction".*

Keberadaan desentralisasi yang menciptakan *political jurisdiction* pada masing-masing tingkatan pemerintahan mendorong manusia untuk memilih daerah yang memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi melalui penyediaan layanan publik yang lebih baik sehingga hal ini lah yang kemudian mempengaruhi pengeluaran dan penerimaan pemerintah cenderung untuk menggerakkan perbaikan layanan publik.

Oleh sebab itu kesejahteraan yang tinggi perlu dibayar dengan harga layanan publik yang disediakan oleh pemerintah yakni disebut pajak. Eksistensi input publik memperbaiki peran positif bagi pengeluaran publik dan sebagai mekanisme langsung di mana kebijakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Melalui *Endogenous Growth Model* dapat diterangkan bagaimana pajak dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi didorong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah yang dibiayai oleh pajak (*public input*). Pada tingkat input publik yang rendah pertumbuhan negatif, selanjutnya dengan tingkat pajak yang positif untuk

meningkatkan pertumbuhan konsumsi (g). Namun pada akhirnya pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang terlalu eksekutif akan menurunkan pertumbuhan ekonomi disebabkan tingkat pajak yang terlalu tinggi sehingga mendistorsi ekonomi.

Dengan demikian, implikasi kebijakan yang relevan untuk diterapkan yakni meningkatkan kemampuan dan kreativitas daerah dalam menstimulus titik-titik pertumbuhan baru guna meningkatkan potensi pendapatan daerah serta diiringi dengan tingkat diskresi fiskal pendapatan lebih tinggi di daerah yang tetap memperhatikan tingkat perekonomian untuk menghindari efek pajak yang mendistorsi perekonomian terlebih tidak semua daerah perekonomiannya setara dengan Kota Surabaya dan Kota Kediri yang *notabennya* memiliki aktivitas perekonomian sangat eksis. Oleh sebab itu pungutan pajak semestinya perlu memperhatikan prinsip-prinsip pajak sebagaimana mestinya sesuai kriteria pemungutan pajak antara lain prinsip kecukupan & elastis, pemerataan, kelayakan administrasi, kesepakatan politis dan distorsi terhadap perekonomian dalam hal ini beban pajak tidak memberatkan masyarakat miskin terlalu berlebihan.

Beberapa penelitian yang senada dengan ini yaitu desentralisasi fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di China di pertengahan 1980an (Lin & Liu, 2000). Pendapat lainnya dari Hammond & Tosun (2006) melalui studinya di wilayah metropolitan dan non-metropolitan U.S menunjukkan hasil hubungan negatif antara desentralisasi lokal dan pertumbuhan ekonomi lokal di wilayah non-metropolitan. Sedangkan ada hubungan sebaliknya “positif” di wilayah metropolitan. Sedikit berbeda dengan studi di Indonesia oleh Adi (2005) yang menggerakkan penelitiannya di kabupaten dan kota se Jawa bali selama periode sebelum dan sesudah otonomi daerah, hasil yang diperoleh ialah pertumbuhan



ekonomi signifikan lebih baik selama pelaksanaan desentralisasi fiskal dibandingkan sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sedangkan Rodriguez-pose & Kroijer (2009) yang mengkaji mengenai desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis selanjutnya menyatakan bahwa ada korelasi negatif antara desentralisasi pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi akan tetapi sebaliknya kecenderungan korelasi positif desentralisasi pendapatan (*Taxes assigned*) terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian terbaru di Indonesia lainnya yang senada oleh Yulindra (2012) bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap PDRB secara signifikan di wilayah Sumatera Barat.

#### **4.3.3 Pengaruh Kualitas Pemerintahan Terhadap Kinerja Ekonomi**

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi dinyatakan positif dan tidak signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa dalam jangka pendek pengaruh secara langsung yang dibentuk oleh kualitas pemerintahan tidak mampu mempengaruhi kinerja ekonomi. Ketidadaan pengaruh dari kualitas pemerintahan terhadap kinerja ekonomi disebabkan beberapa hal yang bervariasi mengingat keduanya merupakan variabel laten sehingga butuh kehati-hatian dalam menjelaskannya.

Kualitas pemerintahan yang direfleksikan pada bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah seperti pada penelitian kali ini yakni kebijakan tentang akses lahan, biaya transaksi, keamanan & penyelesaian konflik dan perizinan usaha merupakan suatu konsep yang membutuhkan proses dan dukungan mediasi lainnya selama proses waktu tertentu agar mampu mempengaruhi variabel lainnya baik itu pengaruh secara negatif atau positif. Pernyataan tidak berbeda dengan Ahrens & Meurers (2002) bahwa secara tidak langsung



keberadaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi kebijakan yang lebih efektif dan stabil serta kerangka kelembagaan market-enhancing akan mendorong terciptanya tingginya investasi dan kemudian menarik pertumbuhan ekonomi lebih baik.

Pernyataan senada juga ditambahkan oleh Kong (2011) bahwa kualitas pemerintahan merupakan fundamental krusial bagi eksistensi kinerja ekonomi. Bergeraknya kemampuan tata kelola yang bagus melalui keputusan kebijakan publik seperti perlindungan hak milik, penegakan hukum yang berlaku dan stabilitas ekonomi dapat menstimulus peningkatan kegiatan investasi yang pada akhirnya dapat menaikkan tingkat pertumbuhan.

Pentingnya menarik investor agar optimis memulai aktivitas investasi yang dijalankannya juga diperkokoh oleh teori pertumbuhan yang dicetuskan oleh Schumpeter bahwa keberadaan investor untuk menciptakan inovatif dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Investasi-investasi penting dan menguntungkan sedemikian mampu menumbuhkan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat.

Meringkas dari beberapa uraian di atas berarti kualitas pemerintahan sebenarnya berfungsi sebagai stimulator iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mampu meningkatkan lapangan ketenagakerjaan dan produktivitas masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sukses menarik investor dapat melahirkan kinerja ekonomi yang sukses juga. Dengan demikian, benar adanya jika kualitas pemerintahan mampu meningkatkan kinerja ekonomi secara tidak langsung yakni melalui investasi.

Implikasi hasil penelitian yakni perlu adanya upaya konsistensi peningkatan kualitas pemerintahan secara berkelanjutan melalui perumusan kebijakan strategis usaha yang baik, menciptakan regulasi biaya-biaya perijinan usaha mudah dan fleksibel, serta menjamin adanya hak keamanan usaha bagi para pelaku usaha. Sehingga dalam jangka panjang kualitas pemerintahan semacam ini akan mendorong kinerja ekonomi.

#### **4.3.4 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi Melalui Kualitas Pemerintahan**

Hasil uji hipotesis menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kinerja ekonomi melalui kualitas pemerintahan secara negatif akan tetapi tidak signifikan. Fenomena yang mendukung kondisi desentralisasi fiskal justru menurunkan kinerja ekonomi melalui kualitas pemerintahan bahwa implementasi desentralisasi fiskal di daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tidak mampu memperbaiki kualitas pemerintahan yang dibuktikan dengan sangat rendahnya integritas pemerintah daerah pada tahun 2011 dalam memerangi korupsi menurut laporan KPK (2011) yang dapat disebutkan antara lain Pemko Surabaya (4,89), Pemkab Sidoarjo (4,54), Pemko Malang (3,43), Pemko Madiun (3,00), Pemko Kediri (2,32), Pemkab Jember (1,01) akan tetapi terlihat daerah-daerah tersebut justru mencapai kinerja ekonomi yang baik. Sebagaimana Aidt,et.all (2007) berpendapat bahwa *"In the regime with high quality political institutions, corruption has a substantial negative impact on growth. In the regime with low quality institutions, corruption has no impact on growth"*. Kualitas institusi yang lemah ini lah yang kemudian membawa desentralisasi fiskal tidak mempengaruhi kinerja ekonomi melalui kualitas pemerintahan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kualitas pemerintahan dan kinerja ekonomi pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengukur variabel desentralisasi digunakan 2 indikator refleksif yaitu kontribusi pendapatan daerah terhadap pengeluaran daerah dan tingkat kemandirian daerah. Terdapat 4 indikator kualitas pemerintahan antara lain indeks akses lahan, indeks biaya transaksi, indeks keamanan dan penyelesaian konflik dan indeks perizinan usaha. Terdapat 3 indikator kinerja ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita dan pengangguran. Sumber data terkait berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pusat Statisti (BPS), Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan sumber-sumber lainnya yang menunjang kelengkapan data pada tahun 2011. Sebagaimana hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Implementasi desentralisasi fiskal pada tahun 2011 di Indonesia belum mampu menstimulus kualitas pemerintahan yang baik di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur disebabkan masih rendahnya kapasitas fiskal dan kapasitas pemerintah dalam menjalankan pelimpahan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat.
- b) Penyelenggaraan desentralisasi fiskal pada tahun 2011 di Indonesia menstimulus peningkatan kinerja ekonomi yang berasal faktor *endowment* yang memberikan peluang perluasan basis penerimaan



pendapatan daerah bagi daerah maju khususnya dan bagi daerah kurang maju berasal dari besarnya suntikan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang mampu menstimulus pertumbuhan perekonomian.

- c) Secara langsung kondisi baik dan buruknya kualitas pemerintahan belum mampu meningkatkan atau menurunkan pemerintahan kinerja ekonomi pada daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Kemungkinan yang dapat dijelaskan ialah kualitas pemerintahan dapat mendorong kinerja ekonomi secara tidak langsung seperti halnya melalui penciptaan iklim investasi yang bagus sehingga dapat menstimulus peningkatan kinerja ekonomi.
- d) Melalui kualitas pemerintahan, desentralisasi fiskal pun belum berdampak apapun terhadap kinerja ekonomi pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pada beberapa kesimpulan di atas, maka setidaknya terdapat beberapa rekomendasi yang relevan bagi kebijakan selanjutnya, yaitu antara lain :

- a) Mengingat pelaksanaan desentralisasi fiskal justru memperburuk kualitas pemerintahan pada daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka seyogyanya perlu adanya reformasi tatanan pemerintahan yang lebih baik dari sisi politik, kelembagaan, birokrasi dan kepegawaian. Karena sebenarnya tanpa hadirnya semua ini desentralisasi tidak akan berhasil memperbaiki kualitas pemerintahan dan tata kelola pemerintahan. Lebih detailnya, hal yang dapat diupayakan ialah memperpendek birokrasi pelayanan publik, meningkatkan transparansi, partisipasi dan

akuntabilitas sistem rekrutmen pegawai pemerintah guna menghadirkan pegawai yang memiliki kredibilitas tinggi.

- b) Mempertimbangkan dari hasil analisis, penyelenggaraan desentralisasi fiskal mampu memperbaiki kinerja ekonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang berasal dari suntikan dana transfer yang tinggi dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, perlu kiranya meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap kapasitas fiskal melalui perubahan kebijakan desentralisasi fiskal dalam hal perluasan wewenang keuangan untuk menggali potensi sumber pendapatan baik secara intensifikasi maupun intensifikasi sesuai dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah serta meningkatkan sistem pengawasan dan hukum yang jelas tentang pelaksanaan desentralisasi di daerah. Dengan demikian daerah yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih tinggi pantas kiranya memperoleh pelimpahan wewenang pengelolaan penerimaan lebih tinggi dan pengawan yang lebih tinggi pula dibandingkan daerah yang miskin.
- c) Mengingat kualitas pemerintahan sama sekali tidak memiliki dampak pada kinerja ekonomi daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Maka bagi penelitian selanjutnya perlu memasukkan variabel lain yang berkaitan langsung dengan kinerja ekonomi atau dengan menambah rentangan waktu penelitian guna melihat analisis kebijakan yang lebih komprehensif.
- d) Berdasarkan hasil analisis, melalui kualitas pemerintahan desentralisasi tidak berdampak sama sekali bagi kinerja ekonomi. Oleh sebab itu untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel yang dekat

dengan kinerja ekonomi serta menambah rentangan waktu penelitian guna menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik lagi.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2005. Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi : Studi pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. *Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW*
- Ahrens, Joachim & Meurers, Martin. 2002. How Governance Affects the Quality of Policy Reform and Economic Performance: New Evidence for Economies in Transition. Goettingen: Department of economics. University of Goettingen
- Aidith, Toke. Dutta, Jayasri. Sena, Vania. 2007. Governance regimes, Corruption and Growth Theory and Evidence. UK: ScienceDirect
- Altunbas, Yener & Thornton, John. 2012. Fiscal Decentralization and Governance. United States of America: SAGE.
- Aristovnik, Aleksander. 2012. Fiscal Decentralization in Eastern Europe: a Twenty-year Perspective. Muenchen: Munich Personal RePec Archive
- Badjun, Marijana. 2005. The Quality of Governance and Economic Growth in Croatia. Economic Faculty, Zagreb
- Bartolini, David & Santolini, Raffaella. 2013. Fiscal Autonomy and Quality of Governance in OECD Countries. *Economic Bulletin*, 3013, Vol. 33.1 pp. 706-713
- Baskaran, Thushyanthan & Feld, Lars P. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries : Is There a Relationship?. *CESifo Working Paper No. 2721*
- Bird, Richard M. 2000. A Perspective On Fiscal Federalism In Rusia. University Of Toronto and Petro-Canada Scholar : <http://citeseerx.ist.psu.edu> diakses pada tanggal 24 Maret 2014
- Creswell, John W. 1994. Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches. United States of America: SAGE Publications
- Davas, Nick. et. al. 1987. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Birmingham
- Dethier, Jean-Jacques. 1999. Governance and Economic Performance : A survey. Bonn: ZEF Center for Development Research
- Ebel, Robert D. & Yilmaz Serdar. 2002. On the Measurement and Impact of Fiscal Decentralization. Washington DC : World Bank
- Faguet, Jean-Paul. 2011. Decentralization and Governance. London : Department of International Development and STICERD

- Faridi, Muhammad Zahir.Nazar,Raima.Zakariya,Bahauddin. 2013. Impact of Fiscal Autonomy on Poverty in Pakistan.*Pakistan Journal of Commerce and Social Science*,2012, Vol.7(1),141-156
- Faridi, Muhammad Zahir.Chaudhry,Mumtaz Anwar.Ansari,Fahad Nuzair. 2012. The Impact of Fiscal Decentralization, Inequality and Poverty on Employment : Evidence from Pakistan.*Pakistan Journal of Social Science*,Vol.32,No.2 (2012).pp.357-369
- Hammond, George W & Tosun, Mehmet. 2009. The Impact of Local Decentralization on Economic Growth : Evidence from U.S Countries.Germany:IZA Discussion Paper
- Hanafi,Imam & Mugroho,Tri Laksono. 2009. Desentralisasi Fiskal:Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia.Malang : UB Press
- Hyndriks, Jean & Myles, Gareth D. 2004. *Intermediete Public Economics*.
- Hyman, David N. 1983. *Public Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy*.USA : The dryden Press
- Ivanyina,Maksym & Shah,Anwar. 2010. Decentralization (Localization) and Corruption New Cross-country Evidence.The World Bank:*Policy Research Working Paper 5299*
- Jaya, I Gede Nyoman Mindra & Sumertajaya, I Made. 2008. Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Squares. Bandung : Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika
- Jin,Jing & Zou,Heng-fu. 2005. Fiscal Decentralization, Revenue and Expenditure Assignmnet, and Growth in China. *Journal of Asian Economics 16 (2005) 1047-1064:ScienceDirect*
- Khramov, Vadim & Lee, John Ridings. 2013. The Economic Performance Index (EPI) : an Intuitive Indicator for Assessing a Country's Economic Performance Dynamics in an Historical Perspective. IMF Working Paper
- Khusaini, Moh. 2006. Kajian Desentralisasi Fiskal, Pengaruhnya Terhadap Efisiensi Ekonomi, Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Kabupaten/Kota Di Jawa Timur).Malang : Prasetya
- Kong,Tao. 2011. Governance Quality and Economic Growth. Canbera:Australian National University
- Kuncoro,Haryo. 2012. Apakah Tata Kelola Perekonomian Daerah Di Indonesia Telah Meningkat?.Banjarmasin:Indonesian Regional Science Association



- Kyriacou, Andreas P. & Roca-Sagales, Oriol. 2009. Fiscal Decentralization and The Quality of Government Evidence from Panel Data. *Hacienda Publica Espanola/Revista de Economica Publica*, 189-(2/2009):131-156
- Lessman, Cristian. 2009. Fiscal Decentralization and Regional Disparity Evidence from Cross-section and Panel Data. Germany: Department of Business and Economics
- Lin, Justin Yifu & Liu, Zhiqiang. 2000. Fiscal Decentralization and Economic Growth in China. The University of Chicago
- Lipsey, Richard G. et al. 1987. *Makroekonomi: Edisi Kedelapan*. Jakarta : Erlangga
- Malik, Hussain Muhammad. 2008. Fiscal Decentralization For Poverty Reduction In Asia : Opportunities, Challenges and Policy Issues. Vol.15 No.2, December 2008. Bangkok Economic Affairs Office
- Martinez-Vasquez, Jorge & Rider, Mark. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth : A Comparative Study of China and India. *Indian Journal of Economics & Business*
- Matei, Ani & Popa, Florin. 2009. Impact of Decentralization on The Corruption Phenomenon: Munich Personal RePEc Archive (MPRA)
- McChulloch, Neil & Malesky, Edmund. 2011. Does Better Local Governance Improve District Growth Performance in Indonesia. UK: Institute of Development Studies
- Mello, Luiz de & Barenstein, Matias. 2001. Fiscal Decentralization and Governance. *International Monetary Fund*
- Oates, Wallace E. 2007. On The Theory and Practice of Fiscal Decentralization. USA: CREI
- Oktarida, Anggreani. 2012. Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Ilmiah Volume IV No.2*, 2012
- Parry, Taryn. 2007. The Role of Fiscal Transparency in Sustaining Growth and Stability in Latin America. IMF Working Paper
- Parhah, Siti. Kontribusi Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Data Cross-Section Tahun 2002. [http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI\\_EKONOMI\\_DAN\\_KOPERASI/SITI\\_PARHAH/KONTRIBUSI\\_DESENTRALISASI\\_FISKAL\\_TERHADAP\\_PERTUMBUHAN\\_EKONOMI.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPEB/PRODI_EKONOMI_DAN_KOPERASI/SITI_PARHAH/KONTRIBUSI_DESENTRALISASI_FISKAL_TERHADAP_PERTUMBUHAN_EKONOMI.pdf). Diakses pada 23 desember 2013
- Rodriguez-Pose, Andres & Kroijer, Anne. 2009. Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe. London: LEQS Paper



- Rodriguez-Pose, Andres & Ezcurra, Roberto. 2010. Is Fiscal Decentralization Harmful for Economic Growth Evidence from the OECD Countries. Spatial Economics Research Centre
- Sapulveda, Cristian F. & Martinez-Vasquez. 2010. The Consequences of Fiscal Decentralization on Poverty and Income Inequality. USA: International Studies Program. Andrew Young School of Policy Studies
- Sjahrir, Bambang Suharnoko & Kis-Katos, Krisztina. 2011. Does Local Government' Responsiveness Increase with Decentralization and Democratization? Evidence from Sub-national Budget Allocation in Indonesia. Freiburg: University of Freiburg, Germany
- Sukirno, Sadono. 2002. *Pengantar Teori Makroekonomi*: Edisi Kedua. Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Sumarto, Sudarno. Suryahadi, Asep. Arifianto, Alex. 2004. Tata Kelola Pemerintah dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti-bukti Awal Desentralisasi di Indonesia. Jakarta: SMERU
- Steiner, Susan. 2005. Decentralization and Poverty Reduction : *A Conceptual Framework for The Economic Impact*. Germany: German Overseas Overseas Institute
- Treisman, Daniel. 2000. Decentralization The Quality of Government. Los Angeles: Department of Political Science
- Uchimura, Hiroko & Suzuki, Yurika. 2009. Measuring Fiscal Decentralization in The Philippines. Japan: Institute of Developing Economies (IDE)
- Utomo, Tri Widodo Wahyu. Building Good Governance Through Decentralization In Indonesia (Recognizing Some Inhibiting Factors In The Implementation Stage): Chapter 7. [http://www2.qsid.nagoya-u.ac.jp/blog/anda/files/2012/01/7\\_tri-widodo-wahyu1.pdf](http://www2.qsid.nagoya-u.ac.jp/blog/anda/files/2012/01/7_tri-widodo-wahyu1.pdf). diakses pada 10 februari 2014.
- Yulindra, Sonni. 2012. The Effect of Fiscal Decentralization on Local Economic Growth in Sumatera Barat Province. The Hague: Institute of Social Studies
- Watts, Harold W. 1964. An Economic Definition of Poverty. Madison : Institute for Research on Poverty
- Zulianto, Aan. 2010. Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. Semarang : UNDIP
- Zhang, Tao & Zou, Heng-fu. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics* 67 (1998) 221-240

### Referensi Lain-lain

Badan Pusat Statistik Indonesia : [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan : [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia : [www.menkeu.go.id](http://www.menkeu.go.id)

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah : [www.kppod.org](http://www.kppod.org)

United Nations Development Programme : [www.undp.org](http://www.undp.org)

USAID (U.S Agency For International Development) : [www.usaid.gov](http://www.usaid.gov)

World Bank : [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)

Riset dan Teknologi : [www.ristek.go.id](http://www.ristek.go.id)

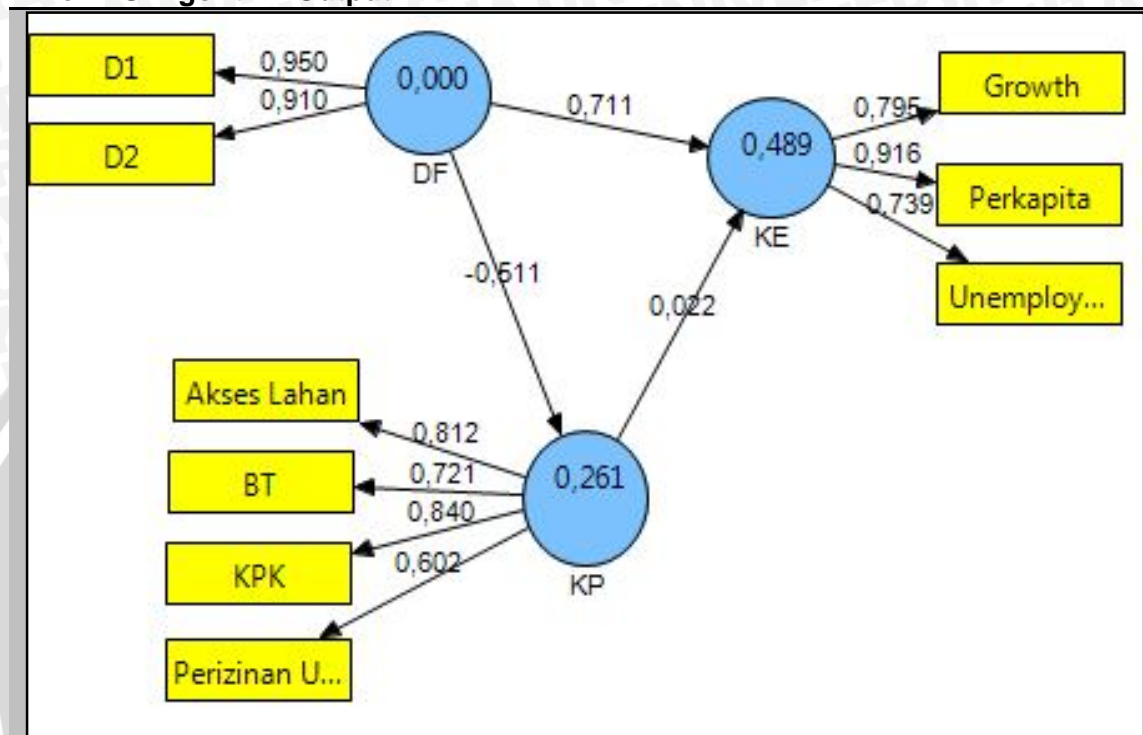
Komisi Pemberantasan Korupsi : [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id)

Publikasi berita : [www.tempo.co](http://www.tempo.co)



## LAMPIRAN 1 : SmartPLS Output

The PLS Algorithm Output



Partial Least Squares (PLS)-> Calculation Results: Outer Loadings

	DF	KE	KP
D1	0,9496	0,0000	0,0000
D2	0,9101	0,0000	0,0000
Akses Lahan	0,0000	0,0000	0,8117
BT	0,0000	0,0000	0,7213
KPK	0,0000	0,0000	0,8399
Perizinan Usaha	0,0000	0,0000	0,6024
Growth	0,0000	0,7949	0,0000
Perkapita	0,0000	0,9160	0,0000
Unemployment	0,0000	0,7391	0,0000

Partial Least Squares (PLS)-> Calculation Results : Path Coefficients

	DF	KE	KP
DF	0,0000	0,7105	-0,5109



KE	0,0000	0,0000	0,0000
KP	0,0000	0,0224	0,0000

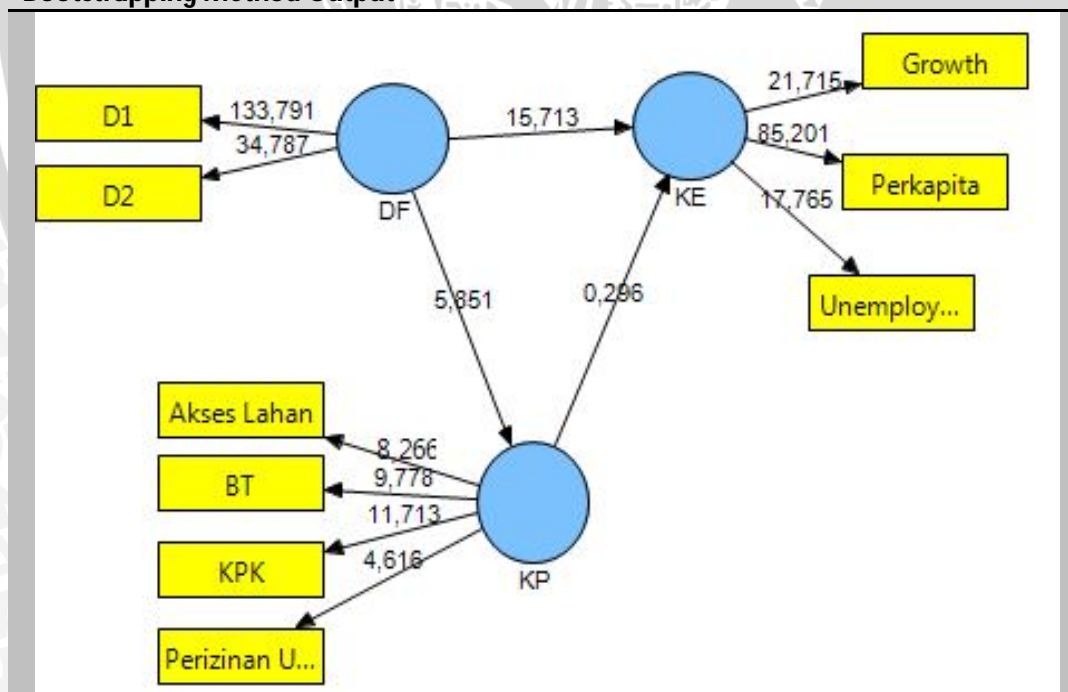
#### Partial Least Squares (PLS)-> Quality Criteria : Latent Variable Correlations

	DF	KE	KP
DF	10,000	0,0000	0,0000
KE	0,6991	10,000	0,0000
KP	-0,5109	-0,3406	10,000

#### Partial Least Squares (PLS)-> Quality Criteria : Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
DF	0,8651	0,9276	0,0000	0,8469	0,8651	0,0000
KE	0,6724	0,8593	0,4891	0,7580	0,6724	0,3152
KP	0,5618	0,8347	0,2610	0,7646	0,5618	0,1103

#### Bootstrapping Method Output



#### Bootstrapping Method : Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
---------------------	-----------------	--------------------	------------------------	--------------------------

			(STDEV)		
DF -> KE	0,7105	0,7107	0,0468	0,0468	151,672
DF -> KP	-0,5109	-0,5009	0,0965	0,0965	52,921
KP -> KE	0,0224	-0,0022	0,0774	0,0774	0,2898

Indicator <- Laten	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics ( O/STERR )
DF1 <- DF	0,9496	0,9536	0,0081	0,0081	135,35
DF2 <- DF	0,8100	0,9149	0,0296	0,0296	33,42
Aks_Lah <- KP	0,8117	0,7915	0,0681	0,0681	168,105
Biay_Trans <- KP	0,7213	0,7292	0,0641	0,0641	107,207
Kea_Peny-Konfl <- KP	0,8399	0,8330	0,0700	0,0700	163,755
Per_Usaha <- KP	0,6024	0,5888	0,1312	0,1312	54,679
Ec_Growth <- KE	0,7949	0,7962	0,0372	0,0372	194,737
Inc_PerCap <- KE	0,9160	0,9172	0,0100	0,0100	852,018
Unemployment <- KE	0,7391	0,7418	0,0374	0,0374	217,336

## LAMPIRAN 2

	Akses Lahan	Perizinan Usaha	BT	KPK	Unemployment	Perkapita	Growth	BHPBP/TB	PAD/DAU
Kab. Bangkalan	88	62	75.3	69.2	3.91	3.96	6.25	18.57218	0.114988
Kab. Banyuwangi	76.8	57.1	71.3	49.7	3.71	4.23	7.02	15.05003	0.139071
Kab. Blitar	76.2	72.7	91.5	72.6	3.61	4.09	6.33	13.50336	0.109211
Kab. Bojonegoro	87.2	73.6	68.5	82.9	4.18	4.36	9.19	34.30267	0.247417
Kab. Bondowoso	83.3	65	82.7	69.6	2.84	4.02	6.2	16.19729	0.123753
Kab. Gresik	69.9	61.7	87.8	57.7	4.36	4.56	7.39	33.60146	0.488299
Kab. Jember	71.5	61.7	72.5	60.1	3.95	4.08	7	15.93351	0.172384
Kab. Jombang	82.1	64.6	91.7	76.1	4.24	4.12	6.83	19.14356	0.187819
Kab. Kediri	81.3	62.8	89.5	73.1	4.54	4.06	6.2	16.3238	0.129055
Kab. Lamongan	85.5	75.3	86.4	87.5	4.4	4.06	7.02	15.33463	0.146431
Kab. Lumajang	57.7	67.3	73.1	44.1	2.7	4.19	6.26	19.17519	0.13922
Kab. Madiun	74.9	57.6	81.9	68.7	3.37	4.07	6.41	14.17541	0.11089
Kab. Magetan	93.5	77.5	85	78.9	3.16	4.12	6.16	14.59358	0.113051
Kab. Malang	77	49.5	65	39.1	4.63	4.16	7.17	18.77219	0.164292
Kab. Mojokerto	87.6	67.2	86.8	72	4.31	4.3	7.03	19.52503	0.181586
Kab. Nganjuk	73	60.2	88.9	67.4	4.73	4.08	6.42	19.3314	0.140807
Kab. Ngawi	80	70	83.6	77.2	4.06	3.99	6.14	15.80362	0.094037
Kab. Pacitan	78.8	80.8	89.9	84.4	2.7	3.84	6.67	11.64946	0.100628
Kab. Pamekasan	76.1	70.7	77.6	74.7	2.89	3.85	6.21	15.76078	0.13776
Kab. Pasuruan	75.5	55.6	62.8	43.7	4.83	4.06	7.02	19.50232	0.217414
Kab. Ponorogo	70.5	70.7	80.8	65.8	4.37	3.99	6.21	13.57397	0.103934
Kab. Probolinggo	76.8	73.6	76.3	69.8	3.2	4.18	6.23	16.55745	0.118427



<b>Kab. Sampang</b>	84.3	79.2	86.3	77.1	3.91	3.86	6.04	13.24611	0.094055
<b>Kab. Sidoarjo</b>	71	67.9	80.1	58.5	4.75	4.52	6.9	38.42944	0.638346
<b>Kab. Situbondo</b>	84.7	58.8	70.7	68.3	4.74	4.15	6.31	17.64978	0.119535
<b>Kab. Sumenep</b>	70.5	65.3	86.7	67.3	3.71	4.08	6.24	23.17729	0.087206
<b>Kab. Trenggalek</b>	86.1	71.5	92.4	77	3.18	3.99	6.46	12.86386	0.11786
<b>Kab. Tuban</b>	71.8	60.1	90.2	59.3	4.15	4.28	7.12	23.37593	0.226584
<b>Kab. Tulungagung</b>	89.1	72.9	82.1	69.4	3.58	4.27	6.73	20.87671	0.172056
<b>Kota Blitar</b>	75.6	77.4	87.7	74.8	4.2	4.23	6.59	14.97518	0.210183
<b>Kota Kediri</b>	80.1	78.6	75.6	69.5	4.93	5.38	7.93	35.87579	0.29937
<b>Kota Madiun</b>	76.1	78.3	75.4	75.6	5.15	4.52	7.18	20.21516	0.205932
<b>Kota Malang</b>	61.3	59.8	75.1	63	5.19	4.62	7.08	27.76979	0.348306
<b>Kota Mojokerto</b>	78.1	65.2	81.8	70.4	5.86	4.42	6.68	19.88477	0.158842
<b>Kota Pasuruan</b>	74.5	65	73.2	65.7	4.92	4.2	6.29	19.01208	0.171297
<b>Kota Probolinggo</b>	77.9	82.5	73	69.4	4.66	4.39	6.58	23.59616	0.184549
<b>Kota Surabaya</b>	48.6	60.6	66.5	57.5	5.15	4.93	7.56	48.37626	2.777297
<b>Kota Batu</b>	77.1	72.3	89.3	59.7	4.57	4.29	8.04	16.13995	0.110577

Sumber : Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan RI dan Badan Pusat Statistik

